

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Limboto, April 2021



Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 - 2026



Disusun oleh:

KELOMPOK KERJA KLHS

SK Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 9/11/I/2021

Dr. Fitryane Lihawa, M.Si

Ketua Tim Ahli

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat ijin dan Ridho-Nya, maka Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 bisa diselesaikan. Tujuan dari KLHS ini adalah untuk diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Penyusunan KLHS ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KLHS ini dilakukan pada tahap awal penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026, sehingga dapat dihasilkan suatu kebijakan, rencana dan program yang telah terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026, Tim penyusun RPJMD dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Gorontalo, April 2021

Ketua Tim Ahli

Dr. Fitryane Lihawa, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I. PENDAHULUAN	12
2.1 Latar Belakang	12
2.2 Dasar Hukum KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo	13
2.3 Tujuan dan Manfaat KLHS	14
2.4 Proses dan Metodologi Penyelenggaraan KLHS.....	15
2.5 Proses dan Metodologi KLHS RPJMD.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TEORI DASAR KLHS	19
2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	19
2.1.1 Tata Cara Penyelenggaraan KLHS RPJMD	20
2.1.2 Pengkajian Kebijakan Rencana Program dalam KLHS	22
2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	23
2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	26
2.4 Enam muatan KLHS.....	28
2.4.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	28
2.4.2 Risiko dan Dampak Lingkungan	29
2.4.3 Jasa Ekosistem.....	30
2.4.4 Sumber Daya Alam	33
2.4.5 Perubahan Iklim.....	33
2.4.6 Keanekaragaman Hayati.....	33
BAB III GAMBARAN WILAYAH.....	36
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo.....	36
3.1.1 Kondisi Geografis	36

3.1.2	Struktur Ruang Kabupaten Gorontalo.....	75
3.1.3	Rencana Pola Ruang	76
3.1.4	Kondisi Demografi dan Sosial Budaya.....	53
3.2	Kondisi Umum Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	58
3.2.1	Capaian Target TPB Pilar Sosial	60
3.2.2	Capaian Target TPB Pilar Ekonomi.....	61
3.2.3	Capaian Target TPB Pilar Lingkungan Hidup	61
3.2.4	Capaian Target TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan.....	62
3.3	Kondisi Keuangan Kabupaten Gorontalo	62
3.3.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	62
3.3.2	Kinerja Pelaksanaan APBD 2016-2021.....	65
3.3.3	Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2016-2021.....	69
3.3.4	Kerangka Pendanaan	71
3.4	Daya Dukung Lingkungan Hidup.....	54
3.4.1	Daya Dukung Air di Kabupaten Gorontalo.....	54
3.4.2	Daya Dukung Lahan Kabupaten Gorontalo.....	57
3.5	Jasa Ekosistem.....	60
3.5.1	Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan	61
3.5.2	Jasa Lingkungan Penyediaan Air.....	63
3.5.3	Status Daya Dukung Pangan	65
3.6	Sumber Daya Alam	67
3.7	Perubahan Iklim.....	68
3.8	Keanekaragaman Hayati.....	68
BAB IV. CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....		71
4.1	Indikator yang Telah Mencapai Target.....	71
4.2	Indikator yang Belum Mencapai Target.....	91
4.3	Indikator yang Belum Dilaksanakan.....	112

4.4	Indikator yang belum memiliki data	117
4.5	Analisis TPB Prioritas di Kabupaten Gorontalo	140
4.6	Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB.....	140
BAB V. ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN		144
5.1	Analisis Daya Dukung Lingkungan Hidup	144
5.2	Analisis Risiko/dampak Lingkungan Hidup.....	152
5.3	Analisis Jasa Ekosistem	155
5.4	Analisis Sumber Daya Alam.....	156
5.5	Analisis Perubahan Iklim	156
5.6	Analisis Keanekaragaman hayati.....	157
BAB VI. RUMUSAN ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KLHS UNTUK RPJMD KABUPATEN GORONTALO 2021-2026.....		166
6.1	Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	166
6.2	Arah Kebijakan Kabupaten Gorontalo.....	170
6.2.1	Proses Penyusunan RPJMD	170
6.2.2	Arahan Rekomendasi Visi, Misi untuk RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026	172
6.3	Rumusan Alternatif dan Rekomendasi Berdasarkan Sasaran Visi dan Misi RPJMD	175
6.4	Integrasi Rekomendasi KLHS ke Dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021 – 2026	181
BAB VII. PENUTUP.....		200
DAFTAR PUSTAKA.....		201

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tiga Konsep dan data utama dalam penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem.....	31
Tabel 2. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Gorontalo	36
Tabel 3. Kemiringan Lereng Kabupaten Gorontalo	12
Tabel 4. Ketinggian Wilayah Kabupaten Gorontalo	12
Tabel 5. Luas Cekungan Air Tanah (CAT) Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Gorontalo	20
Tabel 6. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Kecamatan	23
Tabel 7. Jumlah dan rata-rata curah hujan bulanan di Kabupaten Gorontalo selama 10 tahun (2009-2018).....	26
Tabel 8. Suhu Udara Rata-rata di Kabupaten Gorontalo (2009-2018)	27
Tabel 9. Kelembaban Udara Rata-rata di Kabupaten Gorontalo (2009-2018)....	27
Tabel 10. Tekanan Udara Rata-rata di Kabupaten Gorontalo (2009-2018)	28
Tabel 11. Penyinaran Matahari Rata-rata di Kabupaten Gorontalo (2009-2018)	29
Tabel 12. Luasan Daerah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Gorontalo	29
Tabel 13. Luasan Daerah Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Gorontalo.....	33
Tabel 14. Luasan Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gorontalo	36
Tabel 15. Luasan Daerah Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Gorontalo	37
Tabel 16. Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo Per Kecamatan Tahun 2017 – Tahun 2020	53
Tabel 17. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gorontalo Per Kecamatan ...	54
Tabel 18. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2020.....	55
Tabel 19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015- 2020	57

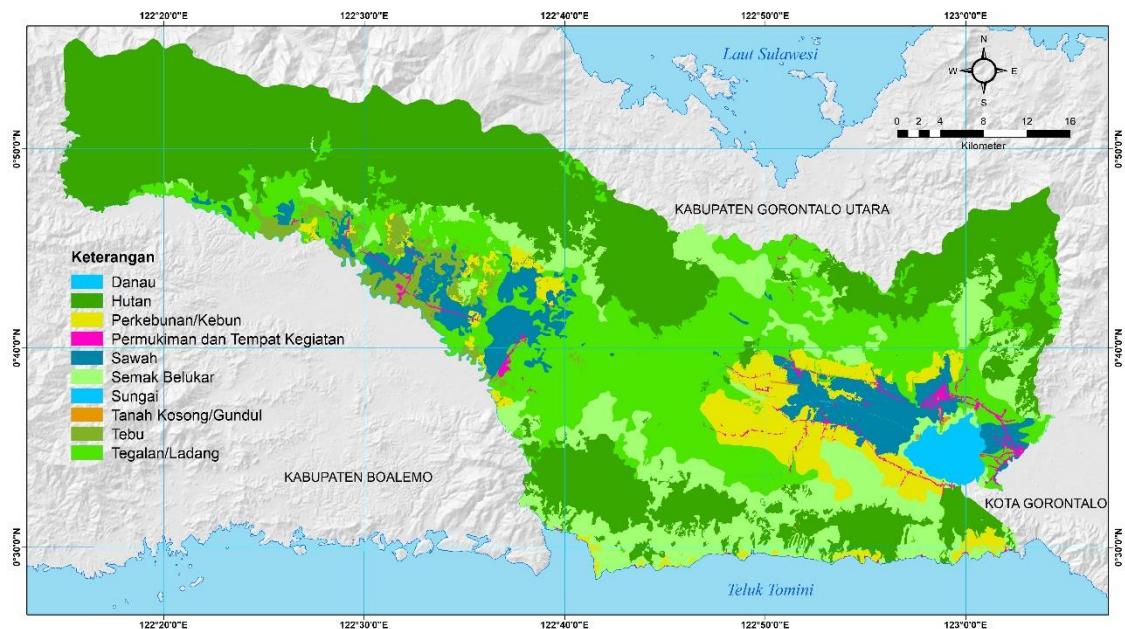
Tabel 20. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu Kabupaten Gorontalo, Tahun 2019	57
Tabel 21. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2019	58
Tabel 22. Perkembangan kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Gorontalo, 2010-2019.....	63
Tabel 23. Nilai Location Quotient (LQ) Kabupaten Gorontalo, 2010-2019.....	63
Tabel 24. Laju pertumbuhan sektor lapangan usaha di Kabupaten Gorontalo, 2010-2019	64
Tabel 25. Rata-rata pertumbuhan dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016-2020 Kabupaten Gorontalo	66
Tabel 26. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2019 Kabupaten Gorontalo.....	67
Tabel 27. Proporsi Sumber Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2019 Kabupaten Gorontalo	68
Tabel 28. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi/Kabupaten Gorontalo	70
Tabel 29. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gorontalo	70
Tabel 30. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gorontalo.....	70
Tabel 31. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Gorontalo.....	71
Tabel 32. Perkembangan Ruang Fiskal Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2019	71
Tabel 33. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo	72
Tabel 34. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d 2026 Kabupaten Gorontalo	53
Tabel 35. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang.....	55
Tabel 36. Perhitungan rata-rata curah tahunan wilayah di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2018	56
Tabel 37. Hasil analisis nilai produksi total lahan di Kabupaten Gorontalo.....	59
Tabel 38. Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Gorontalo.....	62
Tabel 39. Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air ..	64
Tabel 40. Status Daya Dukung Pangan Indikatif Setiap Kecamatan	66

Tabel 41. Indikator pilar sosial yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional	72
Tabel 42. Indikator pada pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional	79
Tabel 43. Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup.....	85
Tabel 44. Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan	88
Tabel 45. Indikator-indikator pilar social yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	91
Tabel 46. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional	102
Tabel 47. Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup	106
Tabel 48. Indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan.....	110
Tabel 49. Indikator TPB pada pilar sosial yang belum dilaksanakan	112
Tabel 50. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum dilaksanakan.....	112
Tabel 51. Indikator yang belum dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup.....	114
Tabel 52. Indikator TPB pada pilar sosial yang belum memiliki data.....	117
Tabel 53. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum memiliki data	126
Tabel 54. Indikator yang belum memiliki data dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup	132
Tabel 55. Indikator yang belum memiliki data pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan	138
Tabel 56. Pembagian peran para pihak dalam pencapaian TPB	141
Tabel 57. Hasil pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap enam muatan KLHS	159
Tabel 58. Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan muatan daya dukung pangan dan penyediaan air, serta masalah persampahan di Kabupaten Gorontalo	166
Tabel 59. Rumusan alternatif rekomendasi KRP Kabupaten Gorontalo	176
Tabel 60. Matriks penelaahan integrasi KLHS dalam RPJMD	183

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. KLHS dalam UU No. 32 Tahun 2009	20
Gambar 2. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan ...	20
Gambar 3. Mekanisme penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018.....	22
Gambar 4. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	24
Gambar 5. Arsitektur Rencana Pembangunan Daerah.....	25
Gambar 6. Sinkronisasi perencanaan dan peanggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional	26
Gambar 7. Startegi Pengelolaan Risiko	30
Gambar 8. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gorontalo	11
Gambar 9. Peta Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Gorontalo	13
Gambar 10. Peta Topografi Kabupaten Gorontalo	13
Gambar 11. Peta Geologi Kabupaten Gorontalo	13
Gambar 12. Peta Jenis Tanah Kabupaten Gorontalo	13
Gambar 13. Peta Hidrologi di Wilayah Kabupaten Gorontalo	22
Gambar 14. Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Gorontalo	25
Gambar 15. Peta Rawan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Gorontalo	32
Gambar 16. Peta Rawan Bencana Longsor di Wilayah Kabupaten Gorontalo....	35
Gambar 17. Peta Rawan Bencana Gempa dan Tsunami di Wilayah Kabupaten Gorontalo.....	39
Gambar 18. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gorontalo.....	53
Gambar 19. APM SD/MI di Kabupaten Gorontalo.....	56
Gambar 20. APM SMP/MTs di Kabupaten Gorontalo	56
Gambar 21. Kaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan pencapaian TPB (Sumber: Folke, dkk., 2016)	59
Gambar 22. Grafik persentase hasil evaluasi pencapaian TPB	60
Gambar 23. Grafik capaian TPB untuk pilar sosial	60
Gambar 24. Capaian TPB untuk pilar ekonomi.....	61
Gambar 25. Hasil evaluasi TPB pilar lingkungan hidup.....	61
Gambar 26. Grafik hasil evaluasi pilar hukum dan tata kelola pemerintahan.....	62

Gambar 27. Grafik perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan Indonesia.....	65
Gambar 28. Persentase Pengeluaran Daerah Terhadap Jumlah Belanja Dan Transfer Kabupaten Gorontalo	69
Gambar 29. Perkembangan Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gorontalo 2016-2019	72
Gambar 30. Data Eksisting dan Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Gorontalo	57
Gambar 31. Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Gorontalo ...	60
Gambar 32. Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Gorontalo.....	61
Gambar 33. Persentase Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Gorontalo(Pemda Kabupaten Gorontalo, 2020)	63
Gambar 34. Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air Kabupaten Gorontalo.....	63
Gambar 35. Persentase Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air <i>Sumber : BALITBANG Kabupaten Gorontalo, (2020)</i>	65
Gambar 36. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gorontalo.....	67
Gambar 37. Hirarki tingkat kepentingan 17 Goals SDG's di Kabupaten Gorontalo	140
Gambar 38. Arah TPB Kabupaten Gorontalo 2016-2021.....	140
Gambar 47. Hasil evaluasi capaian dan prediksi indikator akses rumah tangga terhadap layanan air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.....	145
Gambar 48. Daya Dukung air berdasarkan Kapasitas Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kabupaten Gorontalo tanpa perlakuan hingga Tahun 2030 ...	146
Gambar 49. Daya Dukung air dengan memanfaatkan potensi maksimal ketersediaan air permukaan di Kabupaten Gorontalo	146
Gambar 50. D-P-S-I-R Isu Ketersediaan Air Bersih	147
Gambar 51. Grafik kecendrungan perubahan tutupan lahan di Kabupaten Gorontalo 2005 – 2035.....	148



Gambar 52. Tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2005..... 148

Gambar 53. Tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 149

Gambar 54. Tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 149

Gambar 55. Peta Tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 150

Gambar 56. Peta Prediksi perubahan tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 150

Gambar 57. Prediksi perubahan tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2030 151

Gambar 58. Peta Prediksi perubahan tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2035 151

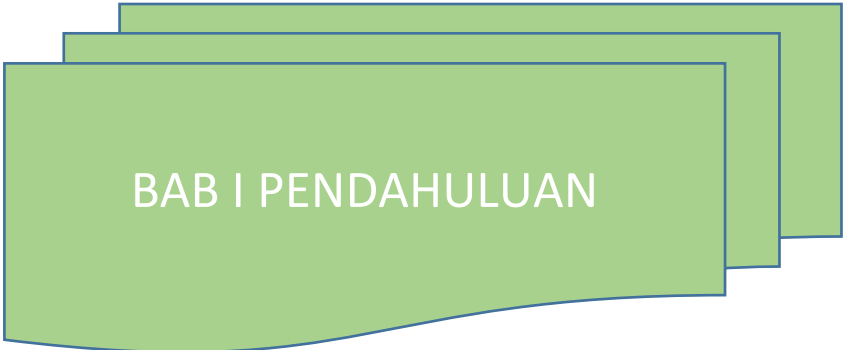
Gambar 60. Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo.... 154

Gambar 61. Skenario pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo..... 154

Gambar 62. D-P-S-I-R Isu Sampah 155

Gambar 63. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo 172

Gambar 64. Proses integrasi hasil KLHS ke dalam muatan KRP 181



BAB I PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Tahun 2021 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMD 2016-2021. Bupati Gorontalo telah terpilih. Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) pada setiap masa berakhirnya RPJMD periode sebelumnya. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah menyusun RPJMD 2021-2026.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan. RPJMD Kabupaten Gorontalo merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional serta memerlukan hasil analisis yang sistematis, menyeluruh, dan selaras dengan visi serta misi suatu daerah. Dalam penyusunan tersebut dibutuhkan masukan analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mendukung perumusan isu-isu strategis daerah dan arah kebijakan atau rencana program pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) pembangunan dalam suatu wilayah.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 15). Dalam hal ini, KLHS menjadi instrumen wajib yang memberikan rekomendasi dalam penyusunan dokumen RPJMD melalui pengkajian terhadap kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup. Dokumen ini merupakan hasil analisis dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang ditujukan sebagai dasar bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

2.2 Dasar Hukum KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo

Selain diamanatkan oleh UUPPLH Nomor 32/2009, isu lingkungan hidup juga dijadikan dasar pertimbangan utama dalam perencanaan program pembangunan daerah sehingga diperlukan adanya KLHS. Berikut ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang penyusunan KLHS

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Neri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 32 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011-2025
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032.

2.3 Tujuan dan Manfaat KLHS

Tujuan dari pelaksanaan KLHS adalah :

1. Diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Gorontalo.

2. Menyusun rumusan alternatif rekomendasi dalam penyusunan RPJMD yang telah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Manfaat dari penyusunan KLHS adalah:

1. Menjamin terwujudnya pembangunan yang produktif dan berwawasan lingkungan hidup dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
2. Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan pada RPJMD Kabupaten Gorontalo telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah Kabupaten Gorontalo melalui kebijakan, rencana, dan/atau program.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

2.4 Proses dan Metodologi Penyelenggaraan KLHS

Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan pada awal penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021 - 2026. Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD.

Tata cara penyusunan dan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 diuraikan tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

1. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
Tim pembuat KLHS telah ditetapkan melalui SK Bupati Nomor 69/11/I/2021 tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja, Tim Ahli, Moderator, dan Sekretariat dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026.
Tim Pokja melakukan penyusunan kerangka acuan kerja KLHS. Kerangka acuan kerja disusun oleh Pokja KLHS dengan memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, hasil yang diharapkan, tahapan pengkajian yang telah disepakati dan pelaporan, rencana kerja yang

mencakup jadwal kerja, kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan, serta pembiayaan.

2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;

Pengkajian pembangunan berkelanjutan diawali dengan melakukan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo sejak Tahun 2016 s/d Tahun 2020. Hasil evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam identifikasi isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo. Penentuan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui konsultasi publik yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 18 Maret 2021 di ruang rapat Kantor DLH dan SDA Kabupaten Gorontalo. Uji publik dilaksanakan guna memperoleh aspirasi dari masyarakat terkait isu-isu riil yang terjadi. Isu tersebut kemudian diidentifikasi dan dirumuskan menjadi isu pembangunan berkelanjutan yang strategis dan prioritas dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.

Uji Publik I dilaksanakan untuk menyepakati isu utama berdasarkan pilar lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum dan tata kelola; tantangan; dan kondisi pencapaian TPB dalam penyusunan KLHS RPJMD.

Muatan KRP disandingkan dengan isu strategis hasil uji publik untuk diidentifikasi pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan diberi muatan pertimbangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Isu hasil uji publik dicross cutting dengan isu-isu strategis yang tercantum pada dokumen teknokratik RPJMD dan isu-isu strategis berdasarkan visi misi kepala daerah terpilih. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi isu terhadap isu TPB yang kemudian diurutkan berdasarkan ranking melalui analisis kesenjangan antara data eksisting dengan target yang telah ditetapkan

3. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan;

Rumusan scenario pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan evaluasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis scenario menjadi dasar dalam perumusan alternative dan rekomendasi KRP. Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan adalah mengembangkan berbagai alternatif perbaikan muatan yang sedang dalam proses penyusunan dan menjamin pembangunan berkelanjutan, melalui identifikasi muatan RPJMD yang potensial memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan. Setelah itu, rekomendasi memberikan usulan perbaikan muatan RPJMD berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan. Rekomendasi berupa materi perbaikan RPJMD maupun informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup beserta tindak lanjut/skenario pencapaian target. Penyepakatan rekomendasi dan skenario pencapaian dilakukan pada Uji Publik II Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026

4. Integrasi hasil KLHS dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo

Proses integrasi hasil KLHS dengan RPJMD dilakukan antara tim Pokja KLHS dengan Tim penyusun RPJMD melalui rapat bersama.

Hasil integrasi dituangkan dalam berita acara integrasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026.

5. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD

Penjaminan kualitas bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan dalam penyelenggaraan KLHS



BAB II TEORI DASAR KLHS

BAB II TEORI DASAR KLHS

2.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrument dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ada dalam bingkai pembangunan berkelanjutan (berwawasan lingkungan hidup) sesuai dengan norma hukum dan aturan yang berlaku dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, perhatian terhadap pembangunan lingkungan global, dan hukum international untuk lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KLHK RI, 2009). Dasar hukum KLHS dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, PP RI Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS, Permen LHK Nomor 16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam konteks KLHS untuk RPJMD, ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

KLHS sebagai suatu kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada saat menyusun rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional dan RPJM daerah. Sebagaimana tercantum pada pasal 2, ayat (2) huruf a,b tercantum jenis dokumen yang wajib dibuatkan KLHS yaitu :

- a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup

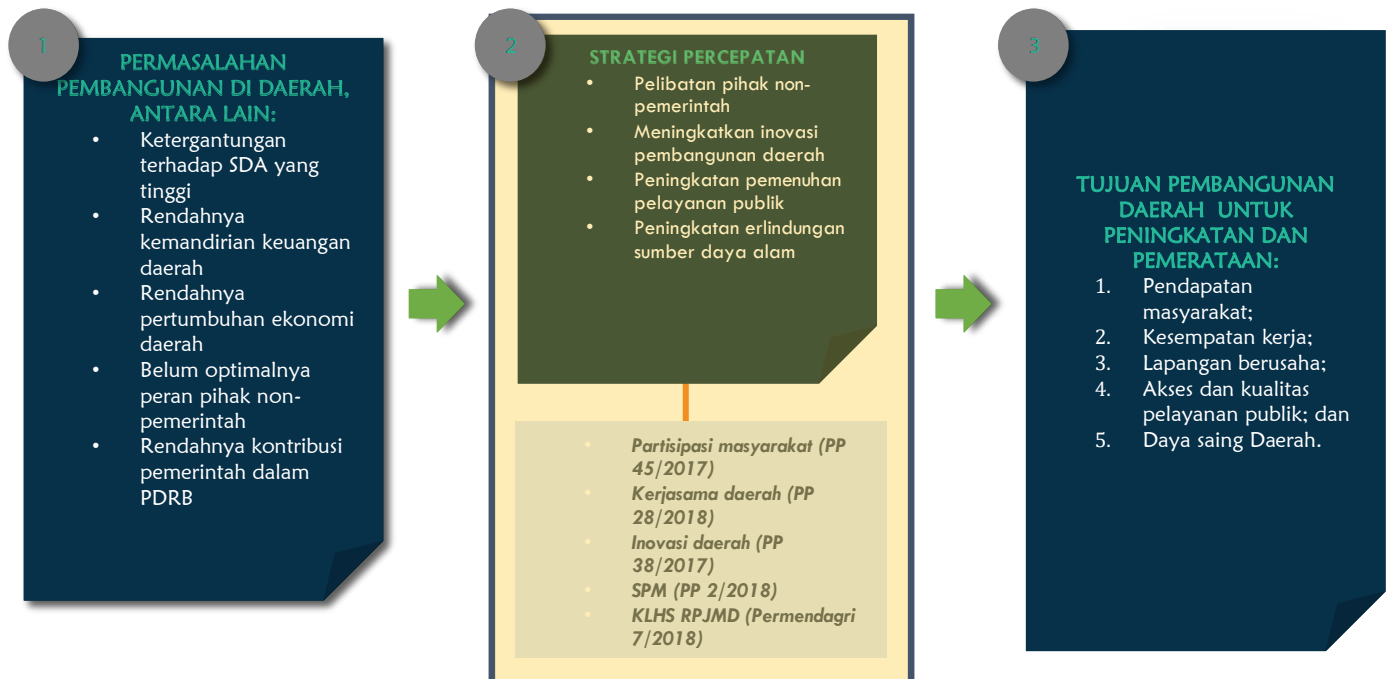


Gambar 1. KLHS dalam UU No. 32 Tahun 2009

Sumber: Djuwita, (2019)

2.1.1 Tata Cara Penyelenggaraan KLHS RPJMD

Tata cara penyelenggaraan KLHS RPJMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS RPJMD bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD (Lihat Gambar 2)



Gambar 2. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan

Tahapan penyelenggaraan KLHS menurut PP 46/2016 dilakukan dengan tahapan:

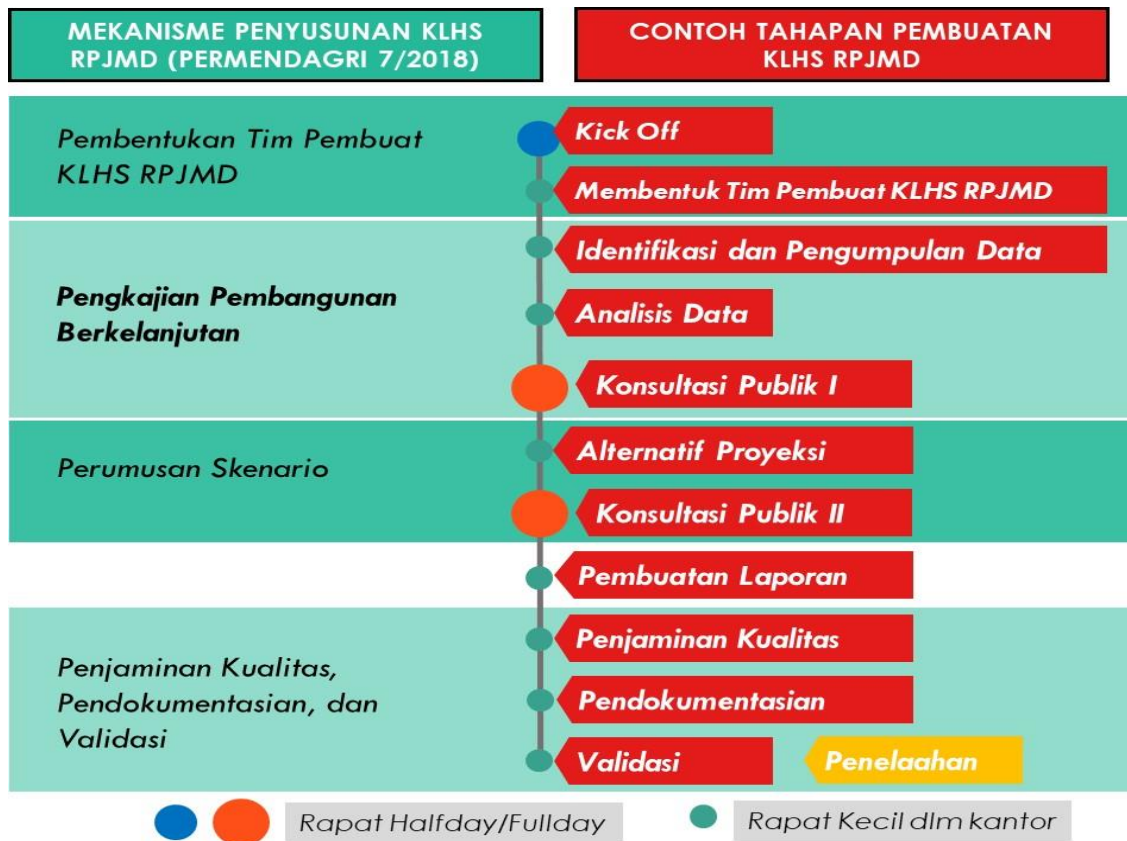
- a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS;
- b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS dan;
- c. Validasi KLHS

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

- Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
- Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Tahapan KLHS RPJM berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018; pasal 3 sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- b. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
 - kondisi umum daerah;
 - capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan;
 - pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan;
Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan. Alternatif proyeksi disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- d. penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.



Gambar 3. Mekanisme penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018

Sumber : Dirjen Bina Pembangunan Daerah, (2019)

2.1.2 Pengkajian Kebijakan Rencana Program dalam KLHS

Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan tahapan:

- Melaksanakan identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan;
- Melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- Menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dan muatan KRP.

Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan dirumuskan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit:

- karakteristik wilayah;
- tingkat pentingnya potensi dampak;
- keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
- keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;

Hasil analisis paling sedikit memuat kajian:

- a) kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
- b) perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
- c) kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
- f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
- b. partisipatif;
Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan
- c. politis;
Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah (Gambar 4).

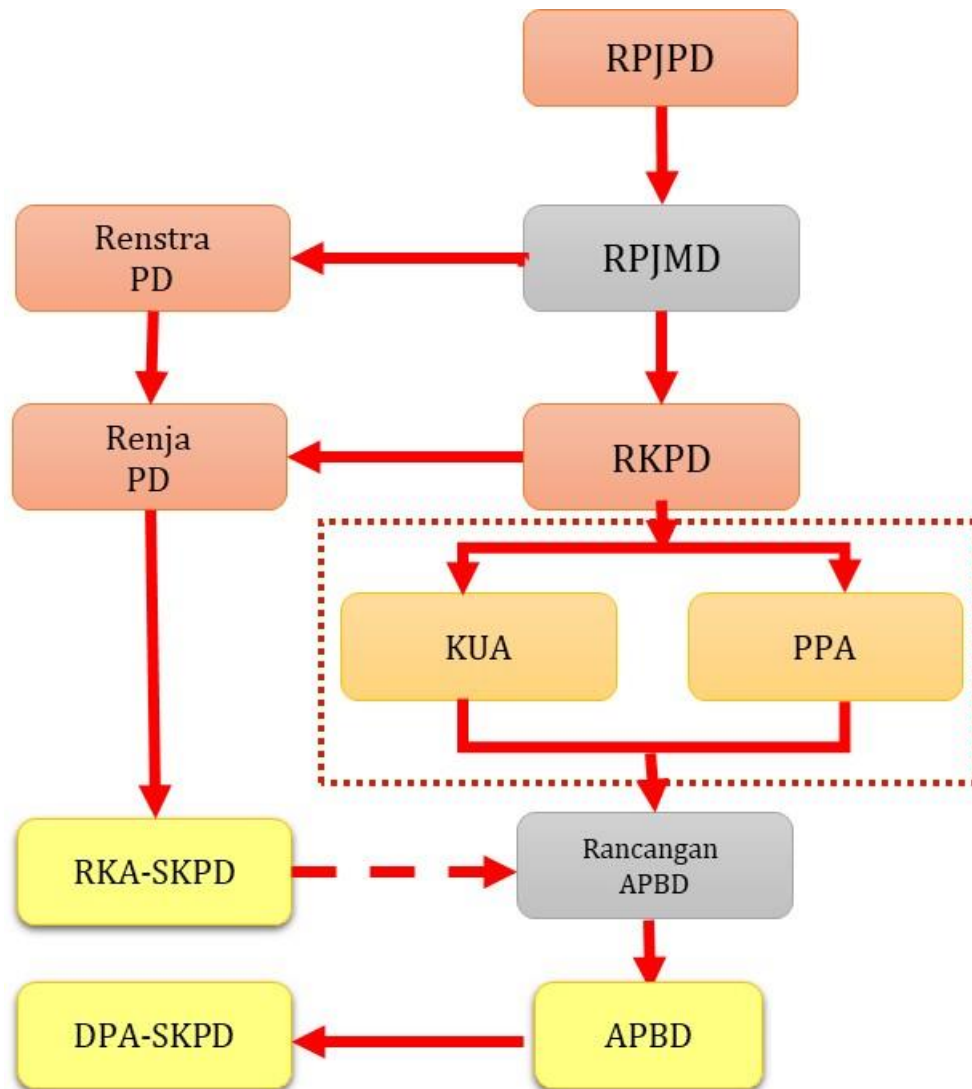


Gambar 4. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Sumber : Dirjen Bina Pembangunan Daerah, (2019)

RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan:

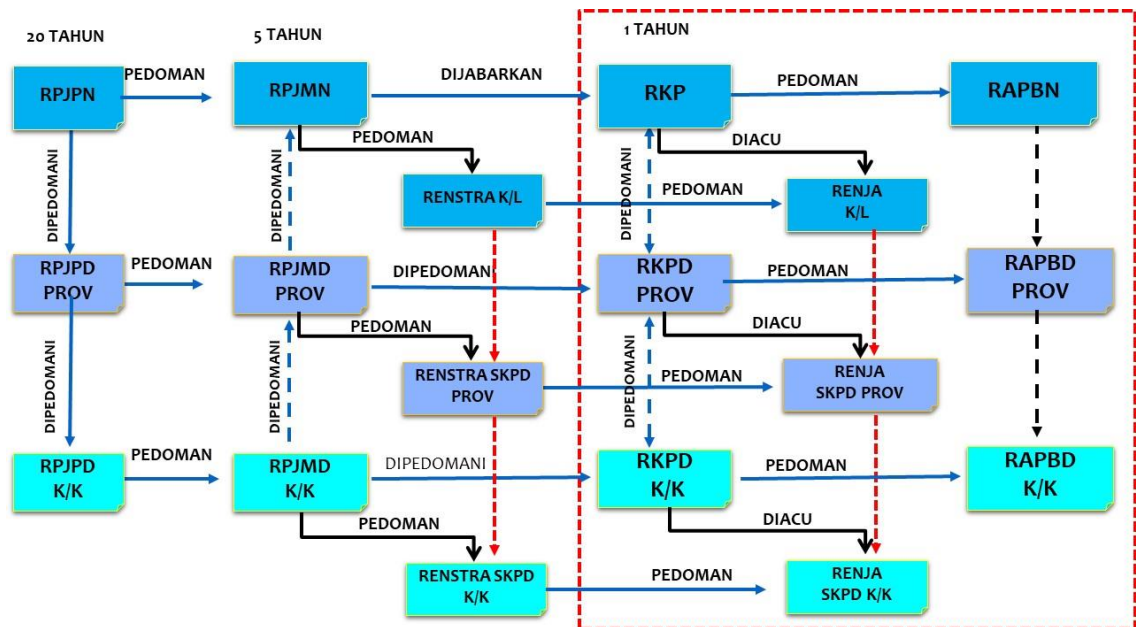
- 1) Persiapan penyusunan
- 2) Penyusunan rancangan awal
- 3) Penyusunan rancangan
- 4) Pelaksanaan Musrenbang
- 5) Perumusan rancangan akhir
- 6) Penetapan



Gambar 5. Arsitektur Rencana Pembangunan Daerah
Sumber : Dirjen Bina Pembangunan Daerah, (2019)

- RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;
- RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD;
- RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;
- Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;
- Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD;
- RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

- Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas;
- RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
- Realisasi (triwulan) DPA-SKPD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja SKPD



Gambar 6. Sinkronisasi perencanaan dan peanggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional

2.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB. SDGs sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari :

1. Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan (*No poverty*)
Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.
2. Tujuan 2 - Tanpa kelaparan (*Zero hunger*)
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera (*Good health and well-being*)
Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas (*Quality education*)
Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Tujuan 5 - Kesetaraan gender (*Gender equality*)
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.
6. Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak (*Clean water and sanitation*)
Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua
7. Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau (*Affordable and clean energy*)
Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua
8. Tujuan 8 - Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent work and economic growth*)
Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua
9. Tujuan 9 - Industri, inovasi dan infrastruktur (*Industry, innovation, and infrastructure*)
Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi
10. Tujuan 10 - Berkurangnya kesenjangan (*Reduced inequalities*)
Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara
11. Tujuan 11 - Kota dan komunitas berkelanjutan (*Sustainable cities and communities*)
Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan
12. Tujuan 12 - Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (*Responsible consumption and production*)
Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Tujuan 13 - Penanganan perubahan iklim (*Climate action*)
Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya
14. Tujuan 14 - Ekosistem laut (*Life below water*)
Pelindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan

15. Tujuan 15 - Ekosistem daratan (*Life on land*)

Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati

16. Tujuan 16 - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh (*Peace, justice, and strong institutions*)

Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif

17. Tujuan 17 - Kemitraan untuk mencapai tujuan (*Partnerships for the goals*)

Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan

Tujuan-tujuan tersebut dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pilar Sosial
2. Pilar EKonomi
3. Pilar Lingkungan
4. Pilar Hukum

2.4 Enam muatan KLHS

2.4.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009). Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem secara operasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan keruangan yaitu menyusun peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem sebanyak jenis jasa ekosistem yang dikaji (20 jasa ekosistem). Sesuai pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Norma Standar Prosedur dan kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, menyebutkan bahwa Ruang lingkup inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup terdiri dari: a) daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pulau dan kepulauan; b) daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor; dan/atau c). daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup subyek lainnya seperti daerah aliran sungai, karst, pesisir dan laut, danau, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta subyek ekosistem esensial lainnya.

Daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam dan lingkungan hidup disusun berdasarkan: a. Pendekatan kemampuan kapasitas dan ketersediaan

sumber daya alam; b. Pendekatan kemampuan kapasitas biologi wilayah untuk memproduksi sumber daya dan menyerap limbahnya; c. Pendekatan kemampuan layanan jasa ekosistem, meliputi jasa penyedia, jasa pengatur, jasa pendukung dan jasa budaya; dan/atau d. Pendekatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan untuk menyusun daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup. Adapun Data dan informasi, antara lain: a. isu strategis di wilayah ekoregion; b. potensi dan aktivitas sektor; atau c. tutupan lahan, bentang lahan, dan potensi lahan.

Hasil inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah disusun menjadi bahan masukan bagi: a. Penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup nasional dan daerah; b. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah; c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ecoregion.

2.4.2 Risiko dan Dampak Lingkungan

Beberapa terminology istilah yang menggambarkan risiko bahaya terhadap lingkungan hidup adalah risiko, bahaya, tekanan, paparan, probabilitas, kosekuensi/keparahan dampak dan risiko dampak.

Bahaya (Hazard) adalah sumber risiko, dapat berupa senyawa atau suatu tindakan yang dapat menyebabkan dampak negatif. Bahaya lingkungan adalah senyawa, situasi, atau kejadian yang berpotensi mengancam lingkungan alam atau mempengaruhi kesehatan manusia. Satu atau kombinasi dari agen fisik, kimia, biologi yang di lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas manusia atau alami, yang dapat menimbulkan dampak kesehatan terhadap masyarakat yang terpapar (Nastiti dkk, 2019).

Risiko adalah kemungkinan timbulnya konsekuensi/dampak yang tidak diinginkan akibat suatu kondisi/tindakan. Risiko merupakan kombinasi kemungkinan dan tingkat keparahan dari suatu peristiwa yang membahayakan.

Analisis risiko dampak lingkungan dalam KLHS bertujuan untuk memberikan informasi mengenai dampak lingkungan dan kesehatan potensial akibat kegiatan pembangunan, misalnya melalui pemetaan risiko. Manajemen risiko proses

memformulasikan dan mengimplementasikan tindakan mitigasi atau eliminasi bahaya. Strategi pengelolaan risiko ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Startegi Pengelolaan Risiko

Sumber : Nastiti dkk, (2019)

2.4.3 Jasa Ekosistem

Jasa Ekosistem adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikategorikan menjadi empat, yaitu meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*) (MA, 2005). Berdasarkan empat kategori ini dikelaskan ada 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu (De Groot, 2002):

1. Jasa penyediaan: (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias.
2. Jasa Pengaturan: (7) Pengaturan kualitas udara, (8) Pengaturan iklim, (9) Pencegahan gangguan, (10) Pengaturan air, (11) Pengolahan limbah, (12) Perlindungan tanah, (13) Penyerbukan, (14) Pengaturan biologis, (15) Pembentukan tanah.
3. Budaya: (16) Estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan indentitas budaya, (20) Spiritual dan keagamaan, (21) Pendidikan.

4. Pendukung: (22) Habitat berkembang biak, (23) Perlindungan plasma nutfah. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005). Berdasarkan Batasan konsep tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diukur dengan pendekatan jasa ekosistem. Untuk memperoleh nilai jasa ekosistem digunakan dua penaksiran yaitu *landscape base proxy* dan *landcover/landused based proxy*, yang selanjutnya digunakan dasar untuk melakukan pemetaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan pengertian dan klasifikasi di atas, terdapat kesamaan substansi pengertian jasa ekosistem dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dimana pengertian jasa penyediaan, budaya lebih mencerminkan konsep daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan memiliki kesamaan substansi dengan daya tampung lingkungan. Sedangkan jasa pendukung bisa bermakna dua yaitu daya dukung maupun daya tampung lingkungan secara operasional, kajian ini menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar sebagai berikut:

- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung).
- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan).

Data dan indikator yang digunakan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Manado terdiri dari dua konsep input data yang meliputi *landuse/landcover* dan ekoregion dan satu konsep output yaitu jasa ekosistem. Selengkapny data dan indikator ketiga konsep tersebut disajikan dalam klasifikasi berikut (Tabel 1). Sistem klasifikasi ekoregion mengikuti Verstappen dan klasifikasi liputan lahan menggunakan SNI 7645-1 2014 dan *one map policy*. Ketiga data tersebut diilustrasikan pada tabel berikut dengan mengambil contoh skala 1:50.000.

Tabel 1. Tiga Konsep dan data utama dalam penyusunan Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

Ekoregion*	Liputan Lahan*	Jasa Ekosistem
1. Kerucut Gunung api	1. Bangunan Bukan Permukiman	1. Pangan
2. Lereng Gunung api	2. Bangunan Permukiman/Campuran	2. Air bersih
3. Kaki Gunung api	3. Danau/Telaga	3. Serat (<i>fiber</i>)
4. Pegunungan Patahan		4. Bahan bakar (<i>fuel</i>) Kayu dan Fosil
5. Pegunungan Lipatan		

Ekoregion*	Liputan Lahan*	Jasa Ekosistem
6. Perbukitan Patahan	4. Hutan Lahan Rendah (Hutan lahan basah)	5. Sumberdaya genetic
7. Perbukitan Lipatan		6. Pengaturan iklim
8. Lereng kaki Patahan	5. Hutan Lahan Tinggi (HutanLahan Kering)	7. Pengaturan tata aliran air dan banjir
9. Lereng kaki Lipatan	6. Hutan Mangrove	8. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam
10. Lembah antar Patahan	7. Hutan Rawa/Gambut	9. Pemurnian air
11. Lembah antar Lipatan	8. Hutan Tanaman	10. Pengolahan dan penguraian limbah
12. Dataran Fluvio Gunung api	9. Kebun dan Tanaman Campuran (Tahunan dan semusim)	11. Pemeliharaan kualitas udara
13. Dataran Aluvial	10. Kolam air asin/payau	12. Pengaturan penyerbukan alami (pollination)
14. Dataran Fluvimarin	11. Lahan Terbuka (hamparan pasir, lava)	13. Pengendalian hama dan penyakit
15. Pegunungan Solusional	12. Lahan Terbuka Diusahkan	14. Tempat tinggal dan ruang hidup (<i>sense of place</i>)
16. Perbukitan Solusional	13. Perkebunan	15. Rekreasi dan <i>ecotourism</i>
17. Lembah antar Perbukitan PegununganSolusional	14. Pertambangan	16. Estetika (Alami)
18. Pegunungan Denudasional	15. Rawa Pesisir	17. Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan
19. Perbukitan Denudasional	16. Rawa Pedalaman	18. Siklus hara (<i>nutrient cycle</i>)
20. Lereng kaki Perbukitan/Pegunungan Denudasional	17. Savana/Padang rumput	19. Produksi primer
21. Lembah antar Perbukitan/Pegunungan Denudasional	18. Semak dan belukar.	20. Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)
22. Gumuk Pasir	19. Sungai	
23. Padang Pasir	20. Tanaman Semusim Lahan Basah (Sawah)	
24. Pantai (<i>Shore</i>)	21. Semusim LahanKering (Tegalan/Ladang)	
25. Pesisir (<i>Coast</i>)	22. Waduk dan Danau Buatan	
26. Pegunungan Glasial	23. Tambak/Empang	
27. Perbukitan Glasial		
28. Lembah antar Perbukita/ Pegunungan Glasial		
29. Dataran Gambut		
30. Dataran Terumbu		
31. Dataran Reklamasi		

Sebagaimana Pasal 17 Undang-undang No 32 Tahun 2009, apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

- Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS;
- Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

2.4.4 Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam itu sendiri dikategorikan berdasarkan jenisnya yaitu sumber daya alam hayati (tumbuhan, hewan, perikanan) dan sumber daya alam non hayati (air, angin, hasil tambang).

Sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi, pada kenyataannya hal tersebut justru sangat bertentangan karena negara-negara di dunia yang kaya akan sumber daya alamnya sering kali merupakan negara dengan tingkat ekonomi yang rendah (Alayli, 2005).

2.4.5 Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah perubahan yang terjadi secara signifikan terhadap unsur-unsur iklim dan cuaca (curah hujan, angin, suhu) yang terjadi dalam rentang waktu berpuluh-puluh tahun. Pada prinsipnya unsur-unsur iklim dikendalikan oleh keseimbangan energy antara bumi dan atmosfer. Radiasi matahari yang sampai di permukaan bumi berupa cahaya tampak sebagian di serap oleh bumi dan sebagian lagi dipantulkan ke atmosfer. Radiasi matahari yang dipancarkan kembali ke atmosfer berupa radiasi panas dari sinar infra merah . Radiasi sinar infra merah tersebut kemudian diserap oleh gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), nitrous oksida (N_2O) yang ada di atmosfer (Murdiyarso, 2005). Meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer bersumber dari bahan bakar fosil. Beberapa hasil penelitian menunjukkan konsentrasi CO_2 mempengaruhi peningkatan suhu bumi sebesar $0,5\text{ }^\circ\text{C}$ (Murdiyarso, 2005).

Dampak yang dapat terjadi dari adanya perubahan iklim adalah kepunahan ekosisten, produktivitas pertanian, ancaman banjir, kesehatan dan majamen air terganggu.

2.4.6 Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merupakan gambaran terhadap keragaman jenis sumber daya hayati dalam suatu ekosistem. Eksistem akan semakin mantap dalam

suatu keanekaragaman yang tinggi. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Sumber daya genetik merupakan kekayaan keanekaragaman hayati sangat tinggi atau *megadiversity* yang potensi tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran. Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik.

Berdasarkan proporsi persentase jasa ekosistem penyedia sumberdaya genetik sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Hutan merupakan tempat sempurna untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Hutan di kota Manado terdapat di Manado dan Gunung Tumpa. Ekosistem hutan menyediakan situasi dimana flora dan fauna dapat bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik. Hal ini seperti udara yang bersih, ketersediaan air yang melimpah, zat hara, bahan makanan, beragamnya jenis flora dan fauna di kawasan hutan.

Pada vegetasi teratur atau pada perkebunan didominasi oleh satwa yang sejenis, sedangkan pada kawasan hutan memiliki satwa yang beragam. Hutan menyediakan kondisi alami yang mendukung pembentuk lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Ranting pohon, sampah daun, atau bangkai binatang menjadi pupuk alami untuk tumbuhan di hutan. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Sumber daya genetik merupakan kekayaan keanekaragaman hayati sangat tinggi atau *megadiversity* yang potensi tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran. Sumber daya genetik merupakan wujud keanekaragaman hayati yang berupa bahan genetik yang terdiri dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat. Sebagai bangsa yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya genetik



BAB III GAMBARAN WILAYAH

BAB III GAMBARAN WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Gorontalo

3.1.1 Kondisi Geografis

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah 2.125,47 km². Secara geografis, Kabupaten Gorontalo terletak di antara 0° 30' – 0° 54' LU dan 122° 07' – 123° 44' BT.

Secara administrasi Kabupaten Gorontalo berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara di sebelah utara; Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo di sebelah timur; Teluk Tomini di sebelah timur; dan Kabupaten Boalemo di sebelah barat. Berdasarkan BPS Kabupaten Gorontalo (2019), Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 kecamatan, 191 desa, 14 Kelurahan, 65 lingkungan dan 815 dusun. Distribusi luas setiap kecamatan di Kabupaten Gorontalo disajikan pada Tabel 2. Peta administrasi Kabupaten Gorontalo disajikan pada Gambar 8.

Tabel 2. Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	Luas	
		Km ²	%
1	Batudaa Pantai	63,13	2,97
2	Biluhu	79,20	3,73
3	Batudaa	32,86	1,55
4	Bongomeme	144,16	6,78
5	Tabongo	54,80	2,58
6	Dungaliyo	46,62	2,19
7	Tibawa	145,34	6,84
8	Pulubala	240,57	11,32
9	Boliyohuto	60,59	2,85
10	Mootilango	211,49	9,95
11	Tolangohula	171,75	8,08
12	Asparaga	430,51	20,25
13	Bilato	112,34	5,29
14	Limboto	103,32	4,86
15	Limboto Barat	79,61	3,75
16	Telaga	28,16	1,32
17	Telaga Biru	108,84	5,12

No.	Kecamatan	Luas	
		Km ²	%
18	Tilango	5,79	0,27
19	Talaga Jaya	6,41	0,30
Kabupaten Gorontalo		2125,47	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, (2020)

B. Topografi

Topografi merupakan faktor fisik penting yang perlu dipertimbangkan dalam setiap perencanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dikarenakan topografi mempengaruhi kesesuaian lahan, kemampuan lahan, resiko bencana alam, dan merupakan salah satu faktor pembentukan tanah. Kondisi topografi Kabupaten Gorontalo sangat bervariasi dari topografi datar, berombak, bergelombang, berbukit dan bergunung. Tabel 3 menunjukkan kemiringan lereng di Kabupaten Gorontalo. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Gorontalo disajikan pada Gambar 9.

Tabel 3. Kemiringan Lereng Kabupaten Gorontalo

No	Kemiringan Lereng	Luas	%
1	0 - 8%	87208.23	40.53
2	8 - 15%	46776.13	21.74
3	15 - 25%	50111.26	23.29
4	25 - 40%	27345.53	12.71
5	> 40%	3388.31	1.57
6	Sungai	354.19	0.16
	Total	215183.67	100.00

Sumber : Analisis Peta Topografi RTRW Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 - 2032

Berdasarkan elevasinya, Kabupaten Gorontalo memiliki ketinggian rata-rata 50-meter dpal. Distribusi elevasi Kabupaten Gorontalo secara rinci ditunjukkan pada Tabel 4. Peta Topografi Kabupaten Gorontalo ditampilkan pada Gambar 9.

Tabel 4. Ketinggian Wilayah Kabupaten Gorontalo

No	Ketinggian	Luas (Ha)	%
1	0 - 500	178026.06	82.73
2	500 - 1000	30355.56	14.11
3	1000 - 1500	5911.51	2.75
4	1500 -2072	536.58	0.25
5	Sungai	354.19	0.16
	Total	215183.90	100

Sumber : Analisis Peta Topografi RTRW Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 - 2032

C. Kondisi Geologi

Secara rinci stratigrafi regional Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada peta geologi regional Lembar Tilamuta (Bachri, Sukido dan Ratman (1993) dan sebagian Lembar Kotamobagu (T. Apandi dan S. Bachri, 1997), menguraikan bahwa daerah Provinsi Gorontalo disusun oleh:

- Aluvium terdiri dari pasir, lempung, lanau, lumpur, kerikil dan kerakal yang dijumpai pada daerah aliran sungai dan daerah sekitar pantai.
- Batugamping Terumbu, terdiri dari koral, berwarna putih sampai kecoklatan, tidak selaras di atas batuan gunungapi Pinogu dan satuan batuan granit, dijumpai memanjang arah hampir tenggara-barat laut di selatan Danau Limboto (Batudaa) dan di pantai selatan.
- Endapan Danau, batulempung, batupasir dan kerikil, menyebar pada daerah sekitar danau Limboto.
- Endapan Sungai Tua; terdiri atas konglomerat, batupasir, batupasir konglomeratan menyebar dibagian selatan Marisa.
- Batugamping Klastika, terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batugamping koral, berwarna putih - kecoklatan, pejal, dijumpai di daerah sekitar Kecamatan Tibawa (utara Limboto), memanjang arah barat-timur.
- Batuan Gunungapi Pinogu, berupa aglomerat, tufa dan lava andesit-basal, menyebar secara terbatas di sekitar Anggrek, Monano dan P. Dudepo.
- Formasi Dolokapa, terdiri dari batupasir wake, batulanau, batulumpur, konglomerat, tufa, tufa lapili, aglomerat, breksi gunungapi dan lava andesit sampai basal, dijumpai di sekitar Dolokapa, Sumalata.
- Batuan Gunungapi Bilungala, terdiri dari breksi gunungapi, tufa dan lava andesit sampai basal, mempunyai hubungan jari-jemari dengan Formasi Tinombo, dijumpai di daerah Kecamatan Kwandang, Gorontalo Utara dan Kec. Tibawa Kab. Gorontalo.
- Formasi Tinombo terdiri atas lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batupasir wake, batulanau, batupasir hijau, batugamping merah, batugamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi Tinombo menyebar di bagian selatan lembar peta memanjang dari utara ke selatan (mulai dari Batulanggero ke arah selatan Pegunungan Utilemba hingga perbatasan Sulawesi Tengah dan di daerah sekitar Batudaa Pantai.
- Granodiorit Bumbulan; terdiri atas granodiorit, granit, dasit dan monzonit kuarsa, tersingkap di bagian selatan Tilamuta dan Pegunungan Dapi.
- Satuan Batuan Diorit Boliyohuto berupa granit, berwarna abu-abu sampai kehitaman, setempat kemerahan bintik hitam, umumnya terkekarkan, pelapukan mengulit bawang. Batuan segar berupa bongkah dijumpai pada

lereng bukit dan puncak-puncak bukit, seperti terlihat di daerah sekitar Biluhu Timur, Batudaa Pantai.

D. Tanah

Berdasarkan Nortcliff (2012), tanah merupakan material halus yang menutupi permukaan lahan sebagai akibat dari pelapukan material batuan in situ atau akumulasi bahan mineral yang diangkut oleh air, angin, atau es. Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena fungsinya yang sangat sentral. Dalam bidang pertanian, tanah merupakan media pertumbuhan tanaman. Tanah menyediakan habitat bagi flora fauna dan organisme tanah yang sangat penting perannya dalam daur bahan makanan. Tanah berfungsi sebagai buffer untuk air hujan yang akan masuk dalam sistem air tanah. Selain itu hampir semua aktivitas manusia dilakukan diatas lahan/tanah. Jenis dan karakteristik tanah pada suatu wilayah ditentukan oleh berbagai faktor yaitu bahan induk, iklim, topografi, faktor biologi/organisme dan waktu.

Berdasarkan Peta Tanah RTRW Kabupaten Gorontalo (2012) yang disajikan pada Gambar 11, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Gorontalo yaitu:

- Brown Forest Soil, Mediteran Merah Kuning
- Brown Forest Soil, Aluvial, Aluvial Hidromorf
- Grumusol, Mediteran Merah Kuning
- Latosol, Latosol, Latosol
- Mediteran Merah Kuning, Latosol
- Mediteran Merah Kuning, Mediteran Merah Kuning
- Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning
- Rendzina, Mediteran Merah Kuning

Jenis tanah yang mendominasi Kabupaten Gorontalo yaitu Mediteran Merah Kuning dengan persentase 37.78%, diikuti jenis tanah grumusol 17.30%. pengelolaan tanah dan pemilihan komoditas pertanian maupun perkebunan perlu memperhatikan jenis dan karakteristik tanah.

E. Hidrologi

Hidrologi merupakan cabang dari ilmu geografi yang mempelajari tentang pergerakan air. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat. Menurut Peraturan Menteri ESDM No 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, cekungan air tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologik, tempat semua kejadian hidrogeologik seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut : (1) mempunyai batas hidrogeologik yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulis air tanah ; (2) mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah ; dan (3) memiliki satu kesatuan sistem akuifer. Adapun luas cekungan air tanah (CAT) di Kabupaten Gorontalo berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Luas Cekungan Air Tanah (CAT) Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	Luas Cekungan Air Tanah (Ha)			Jumlah
		CAT Gorontalo	CAT Mohiyolo	CAT Molombulahe	
1	Batudaa	2.688			2.688
2	Batudaa Pantai	2.495			2.495
3	Bilato	475		4.113	4.588
4	Boliyohuto			6.059	6.059
5	Bongomeme	15.651		30	15.681
6	Limboto	2.552			2.552
7	Limboto Barat	4.324			4.324
8	Mootilango			6.514	6.514
9	Pulubala	6.744		6.630	13.374
10	Tabongo	5.003			5.003
11	Telaga	368			368
12	Telaga Biru	1.158			1.158
13	Telaga Jaya	641			641
14	Tibawa	5.841			5.841
15	Tilango	579			579
16	Tolangohula			5.895	5.895
17	Asparaga		2.676	1.198	3.874
Jumlah		48.519	2.676	30.439	81.634

Luas cekungan air tanah (CAT) di Kabupaten Gorontalo berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4. Cekungan air tanah di Kabupaten Gorontalo di bagi menjadi 3 cekungan, yakni cekungan Gorontalo, cekungan Miihiyolo, dan cekungan Molombulahe yang terdiri dari 17 Kecamatan.

Cekungan Gorontalo hanya meliputi 13 kecamatan yaitu, Kecamatan Batudaa, Batudaa Pantai, Bilato, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Pulubala, Tabongo, Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, Tibawa dan Tilango dengan total luas 48,519 ha. Sedangkan Cekungan Mohiyolo hanya meliputi 1 kecamatan yaitu Kecamatan Aspraga dengan total luas 2,676 ha. Cekungan Molombulahe meliputi 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Bilato, Boliyohuto, Bongomeme, Mootilango, Pulubala, Tolangohula dan Asparaga dengan total luas 30,439 ha. Jumlah luas keseluruhan cekungan air tanah (CAT) yang ada di Kabupaten Gorontalo yaitu 81,364 ha. Kecamatan yang memiliki cekungan air tanah (CAT) paling besar yaitu Kecamatan Bongomeme dengan luas 15,681 ha dan Kecamatan yang memiliki cekungan air tanah (CAT) paling kecil yaitu Kecamatan Telaga dengan luas 368 ha.

Berdasarkan Gambar 13 tentang Peta Hidrologi, Kabupaten Gorontalo terdiri dari 3 cekungan air tanah (CAT) yaitu CAT Gorontalo, CAT Mohiyolo, dan CAT Molombulahe. Cekungan air tanah ini memiliki luasan masing-masing dan mencakup kecamatan yang berbeda-beda.

Cekungan air tanah (CAT) Gorontalo memiliki luas 48.519 ha yang mencakup 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Cekungan air tanah (CAT) Mohiyolo memiliki luas 2.676 ha yang meliputi Kecamatan Asparaga. Cekungan Air tanah (CAT) Molombulahe memiliki luas 30.439 ha yang meliputi Kecamatan Bilato, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Tolangohula dan Kecamatan Asparaga.

Menurut PP No 37 tahun 2012 tentang DAS, daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Luas daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Gorontalo berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (Ha)									
		Batudaa Pantai	Batulangea	Bolango	Botulobuato	Kayubulan	Limboto	Luluo	Telehu	Tontayu	Jumlah
1	Batudaa					60,1	3.226,0				3.286,1
2	Batudaa Pantai		1.229,3			4.266,2	24,0			792,9	6.312,4
3	Bilato	1,0					6,1		3.559,0		3.566,0
4	Biluhu	4504,5	1651,7		499,7		33,3	473,9	756,5		7.919,5
5	Bongomeme	16,2	77,1		0,0		18.373,9	2,2	4,8	1,4	18.475,7
6	Limboto						10.332,1				10.332,1
7	Limboto Barat						7.961,1				7.961,1
8	Mootilango						9,7				9,7
9	Pulubala						18.071,1				18.071,1
10	Tabongo					0,5	5.475,2			4,8	5.480,5
11	Telaga			2.237,2			578,9				2.816,1
12	Telaga Biru			5.655,8			5.227,8				10.883,6
13	Telaga Jaya			348,2			292,9				641,1
14	Tibawa						14.533,8				14.533,8
15	Tilango			424,5			154,1				578,6
Jumlah		4.521,6	2.958,1	8.665,8	499,7	4.326,8	84.299,8	476,1	4.320,3	799,1	110.867,2

Luas daerah aliran sungai (DAS) Kabupaten Gorontalo berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 6. Daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Gorontalo terbagi menjadi 9 daerah aliran sungai yaitu DAS Batudaa Pantai, DAS Batulangea, DAS Bolango, DAS Botulobuato, DAS Kayubulan, DAS Limboto, DAS Luluo, DAS Telehu, dan DAS Tontayu.

DAS Batudaa Pantai meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bilato, Kecamatan Biluhu dan Kecamatan Bongomeme dengan luas 4.521,6 ha. DAS Batulangea meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Biluhu dan Kecamatan Bongomeme dengan luas 2.958,1 ha. DAS Bolango meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Telaga Jaya dan Kecamatan Tilango dengan luas 8.665,8 ha. DAS Botulobuato meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Biluhu dan Kecamatan Bongomeme luas 499,7 ha. DAS Kayubulan meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batudaa, Kecamatan Batudaa Pantai dan Kecamatan Tabongo dengan luas 4.326,8 ha. DAS Limboto meliputi 15 kecamatan yaitu Kecamatan Batudaa, Batudaa Pantai, Bilato, Biluhu, Bongomeme, Limboto, Limboto Barat, Mootilango, Pulubala, Tabongo, Telaga, Telaga Biru, Telaga Jaya, Tibawa, dan Tilango dengan luas 84.299,8 ha. DAS Luluo meliputi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Biluhu dan Bongomeme dengan luas 476,1 ha. DAS Telehu meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bilato, Kecamatan Biluhu, dan Kecamatan Bongomeme dengan luas 4.320,3 ha. DAS Tontayu meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Bongomeme dan Kecamatan Tabongo dengan luas 799,1 ha.

Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Gorontalo dengan Skala 1 : 100.000 dapat dilihat pada Gambar 7. Berdasarkan hasil analisis, daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Gorontalo di bagi menjadi 10 DAS yaitu DAS Batudaa Pantai, DAS Botulobuato, DAS Lamu, DAS Luluo, DAS Telehu, DAS Batulangea, DAS Bolango, DAS Kayubulan, DAS Limboto, dan DAS Paguyaman.

Daerah aliran sungai tersebut memiliki luasan masing-masing yakni DAS Batudaa Pantai dengan luas 4.521,6 ha, DAS Batulangea dengan luas 2.958,1 ha, DAS Bolango dengan luas 8.665,8 ha, DAS Botulobuato dengan luas 499,7 ha, DAS Kayubulan dengan luas 4.326,8 ha, DAS Limboto dengan luas 84.299,8 ha, DAS Luluo dengan luas 476,1 ha, DAS Telehu dengan luas 4.320,3 ha, DAS Tontayu dengan luas 799,1 ha. Daerah aliran sungai (DAS) terbesar yang ada di Kabupaten Gorontalo yaitu DAS Paguyaman dan DAS terkecil yaitu DAS Luluo.

F. Meteorologi dan Klimatologi

Curah hujan merupakan banyaknya air hujan yang tercurah atau turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah dan rata-rata hujan bulanan di Kabupaten Gorontalo selama 10 tahun terakhir yang diolah dari data BMKG Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah dan rata-rata curah hujan bulanan di Kabupaten Gorontalo selama 10 tahun (2009-2018)

Bulan	Tahun										Jumlah	Rata-Rata Curah Hujan
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
Januari	148	100	59	109	148	146	120	116	199	348	1.493	149,3
Februari	147	47	322	130	152	15	68	7	179	139	1.206	120,6
Maret	169	37	302	67	110	108	15	7	200	148	1.163	116,3
April	137	151	113	159	153	124	23	76	160	160	1.256	125,6
Mei	228	336	116	254	308	136	188	214	219	219	2.218	221,8
Juni	106	263	205	118	99	112	177	201	253	253	1.787	178,7
Juli	49	173	27	244	247	45	0	103	120	22	1.030	103,0
Agustus	23	277	7	107	161	54	-	28	99	56	812	90,2
September	-	302	44	46	37	6	-	219	73	7	734	91,8
Oktober	37	252	182	154	202	72	45	323	121	94	1.482	148,2
November	144	77	91	412	108	321	154	134	93	110	1.644	164,4
Desember	61	252	186	27	168	266	55	293	87	111	1.506	150,6
Jumlah	1.249	2.267	1.654	1.827	1.893	1.405	845	1.721	1.803	1.667		

Sumber: Diolah Dari Data BMKG Stasiun Meteorologi Jalaluddin Gorontalo, 2019

Berdasarkan data curah hujan 10 tahun terakhir (Tabel 6) Kabupaten Gorontalo memiliki curah hujan rata-rata tertinggi sebesar 221,8 mm dan rata-rata curah hujan terendah sebesar 90,2 mm dan menghasilkan rata-rata 8 bulan basah dan 3 bulan kering, sehingga diperoleh nilai Q sebesar 0,38 atau 38%. Dengan demikian menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson (1951), wilayah Kabupaten Gorontalo termasuk tipe iklim C (agak basah).

Suhu udara merupakan keadaan suhu panas/dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya panas matahari yang diterima bumi. Adapun suhu udara rata-rata di Kabupaten Gorontalo selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Suhu Udara Rata-rata di Kabupaten Gorontalo (2009-2018)

Bulan	Tahun										Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Januari	26.8	27.2	26.6	26.6	27	26	26.7	27.9	27	27	26.88
Februari	27	27	26.5	26.6	26.8	24.2	24.1	27.8	27.1	27.2	26.43
Maret	27	27.9	26.3	26.9	27.6	27.2	27	28.6	27.3	27.2	27.3
April	27	27.9	26.3	27.1	27.6	26.5	26.8	28.5	26.6	26.6	27.09
Mei	27.6	28	27.4	27.3	27.3	27.4	27.4	28	27.8	27.8	27.6
Juni	27.1	27	26	27.1	27.3	26.2	26	27.2	27.2	27.2	26.83
Juli	26.9	26.7	27	26.3	26.2	27	26.9	27.3	27.1	28.1	26.95
Agustus	27.4	26.9	27.4	27.1	26.5	26.5	26.8	27.7	27	28.5	27.18
September	28.1	26.9	27.5	27.5	27.2	27.1	26.5	27.6	27.3	28.7	27.44
Oktober	27.8	27.7	27.4	27.6	27.5	27.7	27.8	27.3	28	28.8	27.76
November	27.5	27.3	26.7	27.2	27.4	27.3	27.2	28	26.9	28.6	27.41
Desember	27.3	26.8	27.1	27	27.2	27.1	28.4	27.3	27.6	30.5	27.63
Jumlah	328	327.3	322	324.3	325.6	320.2	321.6	333.2	326.9	336.2	

Berdasarkan data suhu udara 10 tahun terakhir (Tabel 8), Rata-rata suhu udara di Kabupaten Gorontalo berada di rentang 26,43 - 27,76°C dengan suhu rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Oktober dan suhu rata-rata terendah terjadi pada Bulan Februari.

Kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kelembaban udara rata-rata di Kabupaten Gorontalo selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kelembaban Udara Rata-rata di Kabupaten Gorontalo (2009-2018)

Bulan	Tahun										Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Januari	84.1	81.4	84.4	84	85	84	85	78.6	85	86	83.75
Februari	82	79.4	85.4	85	84	72	75	77.7	75.4	84	79.99
Maret	81	88.9	86.1	84	82	80	80	73.6	82.4	82	82
April	83.5	81.1	81.9	85	83	82	77	77.8	83.6	84	81.89
Mei	81.3	83.7	83.6	84	86	84	82	84.1	84.3	84	83.7
Juni	80.2	85.2	81.1	84	85	82	82	84	84.3	84	83.18
Juli	79.1	85.6	79.8	85	86	80	77	82.8	82.8	75	81.31
Agustus	72.2	84.1	75	79	82	81	81	77.4	81.3	69	78.2
September	68.2	84.9	77.3	77	77	73	62	80.4	80.5	65	74.53
Oktober	74.6	84.6	80.8	78	78	70	66	83.6	80.5	75	77.11
November	80.6	83.2	80.7	85	81	84	78	81.8	80	79	81.33

Bulan	Tahun										Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Desember	80.1	85.6	83.9	81	84	85	78	84.5	84.3	81	82.74
Jumlah	946.9	1008	980	991	993	957	923	966.3	984.4	948	

Berdasarkan Tabel 9, rata-rata kelembapan udara di Kabupaten Gorontalo berada di rentang 74,53% - 83,75% dengan kelembapan rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan kelembapan rata-rata terendah terjadi pada Bulan September.

Tabel 10. Tekanan Udara Rata-rata di Kabupaten Gorontalo (2009-2018)

Bulan	Tahun									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Januari	1009.17	1010.2	1008.1	1009.2	1009.2	1009.6	1010.4	1011.9	1,009.10	1,007.90
Februari	1008.53	1011.3	1008.7	1009	1008.9	1010	1011	1011.3	1,009.90	1,010.00
Maret	1010.05	1010.7	1008.6	1008.8	1010.1	1010.7	1011.7	1011.4	1,010.10	1,009.10
April	1009.34	1010.3	1009.3	1009.6	1009	1009.9	1010.2	1010.6	1,010.40	1,010.40
Mei	1009.12	1008.6	1009.6	1009.7	1009.4	1010.3	1010.9	1009.9	1,009.70	1,009.70
Juni	1010.23	1010	1009.6	1009.3	1008.5	1009.3	1010.2	1010.6	1,010.50	1,010.50
Juli	1009.99	1009.8	1009.7	1009.4	1009.1	1010.5	1011.3	1009.4	1,010.40	1,010.00
Agustus	1010.07	1010.1	1010.2	1010.5	1010.3	1011.2	1011.7	1009.9	1,010.00	1,010.70
September	1009.8	1009.9	1010.5	1010.4	1010.1	1011.3	1011.9	1010.1	1,010.40	1,008.90
Oktober	1010.43	1009.1	1009.8	1010.2	1010.6	1010.8	1012	1009.8	1,009.30	1,009.10
November	1008.66	1009	1008.9	1009.4	1009	1009.9	1010	1009.5	1,007.90	1,008.00
Desember	1010.04	1007.1	1008.2	1009.6	1008.5	1009.1	1010.6	1008.8	1,008.50	1,009.30
Jumlah	12115.43	12116.1	12111.2	12115.1	12112.7	12122.6	12131.9	12123.2	12116.2	12113.6

Tekanan udara adalah sebuah tenaga yang menggerakkan massa partikel udara dalam setiap satuan luas tertentu. Berikut rata-rata tekanan udara di Kabupaten Gorontalo selama 10 tahun (2009-2018) dapat dilihat pada Tabel 9.

Berdasarkan data tekanan udara 10 tahun terakhir (Tabel 9), Rata-rata tekanan udara di Kabupaten Gorontalo berada di rentang 1008,974-1010,467 milibar dengan tekanan udara rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan Agustus dan tekanan rata-rata terendah terjadi pada Bulan Desember.

Penyinaran matahari merupakan sebuah aktivitas dari matahari yang memancarkan sinarnya ke Bumi. Rata-rata penyinaran matahari di Kabupaten Gorontalo selama 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Penyinaran Matahari Rata-rata di Kabupaten Gorontalo (2009-2018)

Bulan	Tahun										Rata-Rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Januari	5	5.7	4.4	5.2	3.7	5.3	6.2	6.9	4.9	4.4	5.17
Februari	5.4	7.8	4.4	5.8	5.7	6.7	5.9	8.1	4.4	4.6	5.88
Maret	5.6	8.2	4.2	5.3	6.2	6.8	7.3	8.4	4.5	4.8	6.13
April	5.7	6	5.4	5.3	5.2	6.9	7.4	6.2	4.8	4.8	5.77
Mei	6.5	6	5.5	5.4	5	5.9	7.4	5.7	4.6	4.6	5.66
Juni	5.8	5.4	5.3	5.9	5.3	5.7	6.2	5.9	3.6	3.6	5.27
Juli	7.5	4.9	7	4.5	4.6	8.2	8.8	5.9	3.8	11	6.62
Agustus	8.1	4.9	7.6	7.6	6	6.6	8.9	8.1	4	6.3	6.81
September	8.8	5.2	6	7.5	6.4	8.3	9.7	6	3.8	6.7	6.84
Oktober	8.8	5.3	6.3	6.1	6.8	8.6	8.7	5.2	4.3	5.2	6.53
November	5.3	6	5.6	5.5	6	5.8	6.8	5.4	5	5.2	5.66
Desember	7.3	4.4	4.3	6.7	4.9	6	8.1	4.7	4.2	5.1	5.57
Jumlah	79.8	69.8	66	70.8	65.8	80.8	91.4	76.5	51.9	66.3	

Berdasarkan data penyinaran matahari 10 tahun terakhir (Tabel 11), rata-rata lama penyinaran matahari di Kabupaten Gorontalo berada di rentang 5,17 - 6,84 jam dengan lama penyinaran matahari rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan September dan lama penyinaran matahari rata-rata terendah terjadi pada Bulan Januari.

G. Kebencanaan

Aspek kebencanaan yang dianalisis dalam laporan ini meliputi kerawanan banjir, kerawanan longsor, dan kerawanan gempa dan tsunami di Kabupaten Gorontalo.

1) Rawan Banjir

Banjir merupakan peristiwa yang sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi dalam waktu yang berkepanjangan sehingga menyebabkan aliran air yang berlebihan dan merendam daratan. Daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Luasan Daerah Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	Rawan Banjir (Ha)		
		Rendah	Tinggi	Jumlah
1	Batudaa	643,64	137,96	781,61
2	Bilato	9,00		9,00
3	Boliyohuto	4.419,90		4.419,90
4	Bongomeme	2.150,14		2.150,14
5	Dungaliyo	1.760,89		1.760,89

No.	Kecamatan	Rawan Banjir (Ha)		
		Rendah	Tinggi	Jumlah
6	Limboto	2.201,22	1.277,73	3.478,95
7	Limboto Barat	2.247,75	747,26	2.995,01
8	Mootilango	4.788,76		4.788,76
9	Pulubala	3.548,75		3.548,75
10	Tabongo	1.688,04	1.039,23	2.727,26
11	Telaga	918,58		918,58
12	Telaga Biru	1.294,65	300,97	1.595,63
13	Telaga Jaya	377,78	263,23	641,01
14	Tibawa	3.728,75		3.728,75
15	Tilango	225,34	353,28	578,62
16	Tolangohula	5.430,75		5.430,75
17	Asparaga	2.106,37		2.106,37
Jumlah		37.540,38	4.119,66	41.660,04

Sumber: Hasil analisis Peta Rawan Banjir Kab. Gorontalo, 2021

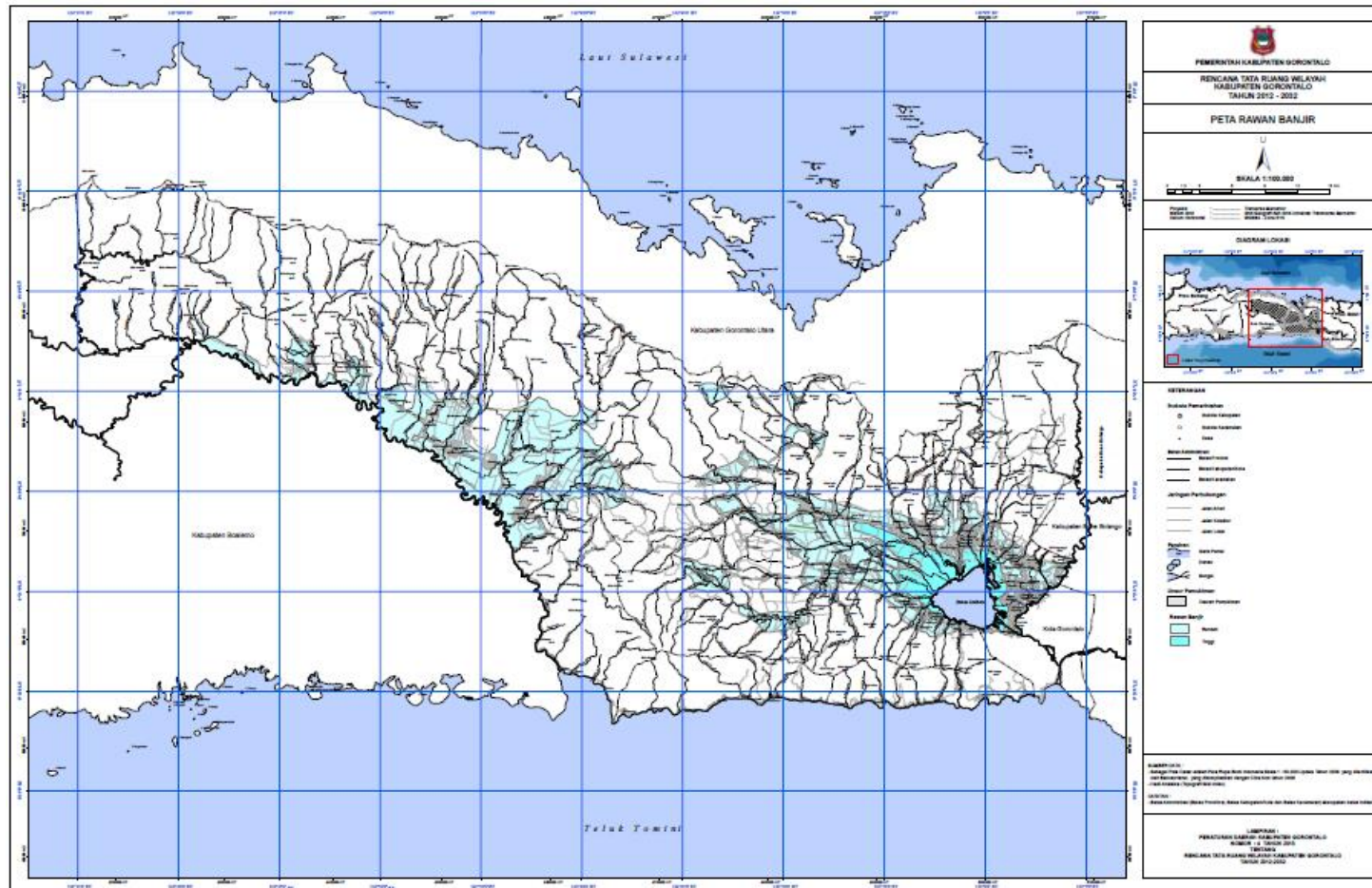
Daerah rawan banjir di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 12. Rawan banjir di Kabupaten Gorontalo dibagi menjadi 2 kategori yaitu rendah dan tinggi. Kecamatan yang termasuk daerah rawan banjir tinggi terjadi pada 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Batudaa dengan luas 137,96 ha, Kecamatan Limboto dengan luas 1.277,73 ha, Kecamatan Limboto Barat dengan luas 747,26 ha, Kecamatan Tabongo dengan luas 1.039,23 ha, Kecamatan Telaga biru dengan luas 300,97 ha, Kecamatan Telaga Jaya dengan luas 263,23 ha, dan Kecamatan Tilango dengan luas 353,28 ha dengan luas keseluruhan 4.119,66 ha.

Daerah rawan banjir kategori rendah meliputi 17 kecamatan, yaitu Kecamatan Batudaa, Kecamatan Bilato, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Telaga Jaya, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Tilango, Kecamatan Tolangohula dan Kecamatan Asparaga dengan total luas 37.540,38 ha. Peta daerah rawan bencana banjir di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 15.

Peta rawan bencana banjir di wilayah Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 15. Peta ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013. Berdasarkan hasil analisis, daerah rawan banjir dibagi menjadi 2 kelas yakni kelas rendah dan kelas tinggi.

Daerah rawan banjir yang termasuk kelas tinggi memiliki luas 4.199,66 ha yang meliputi 7 kecamatan yaitu Kecamatan Batudaa, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Telaga Jaya, dan Kecamatan Tilango. Sungai yang melewati ketujuh

kecamatan ini muaranya langsung ke Danau Limboto. Banjir yang tinggi bisa menyebabkan banyaknya sedimentasi-sedimentasi yang terbawa oleh air dan sehingga menyebabkan pendangkalan Danau Limboto. Daerah rawan banjir yang termasuk kelas rendah meliputi 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo dengan luas 37.540,38 ha.



Gambar 15. Peta Rawan Bencana Banjir di Wilayah Kabupaten Gorontalo

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, (2012)

2) Rawan Longsor

Longsor merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah. Daerah rawan bencana longsor di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Luasan Daerah Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	Rawan Longsor (Ha)			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah
1	Batudaa	1.264,05	2.021,97		3.286,02
2	Batudaa Pantai	486,04	5.086,71	739,76	6.312,51
3	Bilato	2.052,31	8.714,11	467,41	11.233,83
4	Biluhu	473,20	6.711,99	734,34	7.919,54
5	Boliyohuto	4.990,65	1.067,77		6.058,41
6	Bongomeme	8.377,06	5.918,90	0,29	14.296,25
7	Dungaliyo	2.666,59	2.097,97	17,65	4.782,21
8	limboto	4.296,87	5.929,96	70,02	10.332,02
9	Limboto Barat	4.314,84	3.646,29		7.961,13
10	Mootilango	6.836,83	13.785,95	525,89	21.148,67
11	Pulubala	13.249,02	10.214,45	593,16	24.056,63
12	Tabongo	3.271,56	2.168,99	39,89	5.480,43
13	Telaga	998,87	1.817,24		2.816,11
14	Telaga Biru	2.327,56	8.274,88	273,49	10.883,50
15	Telaga Jaya	640,93			640,93
16	Tibawa	5.920,75	7.801,42	811,69	14.533,87
17	Tilango	574,29	4,17		578,46
18	Tolangohula	6.091,52	9.762,30	1.318,56	17.174,85
19	Asparaga	4.291,15	33.716,97	5.033,66	43.049,93
	Jumlah	73.124,10	128.742,03	10.625,81	212.545,30

Berdasarkan Tabel 13 tentang daerah rawan bencana longsor di Kabupaten Gorontalo, rawan longsor dibagi menjadi 3 kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Daerah rawan longsor kategori tinggi terjadi pada 13 kecamatan yaitu Kecamatan Batudaa Pantai dengan luas 739,76 ha, Kecamatan Bilato dengan luas 467,41 ha, Kecamatan Biluhu dengan luas 734,34 ha, Kecamatan Bongomeme dengan luas 0,29 ha, Kecamatan Dungaliyo dengan luas 17,65 ha, Kecamatan Limboto dengan luas 70,02 ha, Kecamatan Mootilango dengan luas 525,89 ha, Kecamatan Pulubala dengan luas 539,16 ha, Kecamatan Tabongo dengan luas 39,89 ha, Kecamatan Telaga Biru dengan luas 273,49 ha, Kecamatan Tibawa dengan luas 811,69 ha, Kecamatan Tolangohula dengan luas 1.328,56 ha dan Kecamatan Asparaga dengan luas 5.033,66 ha dan total keseluruhan 10.625,81 ha.

Daerah rawan bencana longsor kategori rendah seluas 73.124,10 ha yang meliputi 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Tingkat rawan bencana longsor kategori sedang seluas 128.742,03 ha yang meliputi 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Peta Daerah Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 16.

Berdasarkan Gambar 16, tentang peta rawan longsor sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 – 2032, dapat dilihat persebaran daerah rawan longsor berdasarkan perbedaan warna. Daerah rawan longsor di Kabupaten Gorontalo dibagi menjadi 3 kelas yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Daerah rawan longsor di Kabupaten Gorontalo didominasi oleh kelas sedang dengan luas 128.742,03 ha yang meliputi 18 Kecamatan dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Daerah rawan bencana longsor selanjutnya didominasi oleh kelas rendah dengan luas 73.124,10 ha yang meliputi semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Daerah rawan bencana longsor yang termasuk kelas tinggi hanya sedikit dengan luas 10.625,81 ha yang meliputi 13 kecamatan seperti Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Limboto, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Tolangohula dan Kecamatan Asparaga.



Gambar 16. Peta Rawan Bencana Longsor di Wilayah Kabupaten Gorontalo
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, (2012)

3) Rawan Gempa dan Tsunami

Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi pada permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Daerah rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Luasan Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	Kerawanan Gempa (Ha)					Jumlah
		Stabil	Tipologi A	Tipologi B	Tipologi C	Tipologi D	
1	Batudaa	621,83	1.647,36	1.013,31	3,57		3.286,07
2	Batudaa Pantai	614,66	5.117,70	580,32	0,01		6.312,69
3	Bilato	2.377,14	8.404,73	452,14			11.234,01
4	Biluhu	170,69	7.352,33	396,64			7.919,67
5	Boliyohuto	3.501,67	2.507,26	49,67			6.058,60
6	Bongomeme	92,45	13.183,32	1.020,44			14.296,21
7	Dungaliyo	132,86	3.933,85	715,50			4.782,21
8	limboto	920,42	6.799,85	2.510,04	101,94		10.332,25
9	Limboto Barat	516,09	4.591,85	2.688,55	128,78	35,86	7.961,14
10	Mootilango	1.768,04	10.585,35	8.795,08			21.148,48
11	Pulubala	1.287,29	12.170,73	10.548,62	49,88		24.056,53
12	Tabongo	619,22	3.479,57	1.381,67			5.480,46
13	Telaga	443,90	1.781,37	590,88			2.816,14
14	Telaga Biru	193,71	6.733,48	3.956,49			10.883,68
15	Telaga Jaya		641,01				641,01
16	Tibawa	1.047,81	10.291,14	3.129,87	65,04		14.533,86
17	Tilango	2,61	429,49	143,69	2,80	0,03	578,63
18	Tolangohula	1.623,45	10.856,93	4.694,49			17.174,87
19	Asparaga	1.780,26	14.873,25	26.397,10			43.050,61
Jumlah		17.714,12	125.380,58	69.064,51	352,02	35,89	212.547,12

Berdasarkan Tabel 14 tentang daerah rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Gorontalo, terbagi menjadi 5 kategori kerawanan gempa bumi yaitu Stabil, Tipologi A, Tipologi B, Tipologi C, dan Tipologi D. Kerawanan gempa bumi ini meliputi 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo.

Kerawanan gempa Tipologi D meliputi 2 kecamatan yakni Kecamatan Limboto Barat dengan luas 35,86 ha dan Kecamatan Tilango dengan luas 0,03 ha dan total luas 35,89 ha untuk Daerah Rawan Gempa Tipologi D. Daerah rawan gempa Tipologi C meliputi 7 kecamatan yaitu Kecamatan Batudaa dengan luas 3,57 ha, Kecamatan Batudaa Pantai dengan luas 0,01 ha, Kecamatan Limboto dengan luas 101,94 ha, Kecamatan Limboto Barat

dengan luas 128,78 ha, Kecamatan Pulubala dengan luas 49,88 ha, Kecamatan Tibawa dengan luas 65,04 ha, dan Kecamatan Tilango dengan luas 2,80 ha dan total luas 352,02 ha untuk daerah rawan gempa Tipologi C.

Kerawanan gempa Tipologi B meliputi 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo, kecuali Kecamatan Telaga Jaya dengan total luas 69.064,51 ha untuk Daerah Rawan Gempa Tipologi B. Kerawanan Gempa Tipologi A meliputi 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo dengan total luas 125.380,58 ha untuk yang rawan akan gempa. Kerawanan gempa kategori Stabil meliputi 18 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo dengan total luas 17.714,12 ha.

Gempa bumi dengan skala yang besar biasanya akan memicu terjadi Tsunami. Tsunami ini merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi tersebut. Daerah rawan bencana tsunami di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Luasan Daerah Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	Rawan Tsunami (Ha)
1	Batudaa Pantai	769
2	Bilato	14
3	Biluhu	1.040
Jumlah		1.823

Sumber : hasil analisis Peta Rawan Bencana Tsunami, 2021

Berdasarkan Tabel 15, daerah yang teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana tsunami yang ada di Kabupaten Gorontalo mencakup 3 kecamatan yaitu Kecamatan Batudaa Pantai dengan luas 769 ha, Kecamatan Bilato dengan luas 14 ha, dan Kecamatan Biluhu dengan luas 1.823 ha. Ketiga kecamatan ini berdekatan dengan garis pantai sehingga sangat Rawan akan Bencana Tsunami. Peta daerah rawan bencana gempa dan tsunami di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 17.

Peta rawan bencana gempa dan tsunami di wilayah Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 10. Berdasarkan hasil analisis, rawan bencana gempa di bagi menjadi 3 tingkat kestabilan wilayah yaitu Stabil, Kurang Stabil dan Tidak Stabil. Daerah yang Stabil ini memiliki luas 17.714,12 ha yang meliputi 18 kecamatan kecuali Kecamatan Telaga Jaya. Daerah rawan gempa yang Kurang Stabil dibagi lagi menjadi 3, yakni Tipologi A dengan luas 125.380,58 ha, Tipologi B dengan luas 69.064,51 ha, dan Tipologi C dengan luas 352,02 ha. Daerah rawan gempa yang Tidak Stabil

dibagi lagi menjadi Tipologi D, memiliki luas 35,89 ha yang meliputi Kecamatan Limboto Barat dan Kecamatan Tilango. Kecamatan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan bencana tsunami ada 3 kecamatan yakni Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Bilato dan Kecamatan Biluhu. Berdasarkan hasil analisis peta rawan gempa dan tsunami, ketiga Kecamatan ini berdekatan dengan garis pantai sehingga peluang untuk terjadinya Tsunami sangat besar.

3.1.2 Struktur Ruang Kabupaten Gorontalo

Rencana struktur tata ruang Kabupaten Gorontalo merupakan rencana pengaturan pemanfaatan dan pengembangan setiap bagian wilayah Kabupaten Gorontalo secara optimal dan terpadu. Dengan demikian akan tercipta suatu keseimbangan dan keserasian pertumbuhan serta perkembangan wilayah Kabupaten Gorontalo secara menyeluruh. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Gorontalo akan melihat potensi dari masing-masing bagian wilayah kota atau kawasan-kawasan tertentu yang dilihat dari kegiatan fungsionalnya sehingga diharapkan rencana struktur Kabupaten Gorontalo membentuk sistem keterkaitan antara beberapa bagian wilayah atau kawasan yang ada di dalam Kabupaten Gorontalo, yang akan saling melakukan aktivitas tarikan dan dorongan yang menguntungkan.

Rencana struktur ruang Kabupaten Gorontalo diuraikan sebagai berikut :

1. Sistem perkotaan
 - a. Pengembangan kota orde II (Isimu, Limboto, Telaga dan Limboto Barat)
 - b. Pengembangan kota orde III (kota kecamatan lainnya)
2. Pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal
 - a. Pusat kegiatan wilayah
 - b. Pusat kegiatan lokal
 - c. Pusat pelayanan kawasan
 - d. Pusat pelayanan lingkungan
3. Sistem jaringan transportasi
 - a. Sistem transportasi darat
 - b. Sistem transportasi udara
 - c. Sistem transportasi laut
4. Sistem jaringan energi
 - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya
 - b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya
5. Sistem jaringan telekomunikasi
6. Sistem jaringan sumberdaya air
7. Sistem jaringan prasarana lainnya
 - a. Sistem penyediaan air minum (SPAM)
 - b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)
 - c. Sistem jaringan persampahan
 - d. Sistem jaringan evakuasi bencana

- e. Sistem jaringan drainase

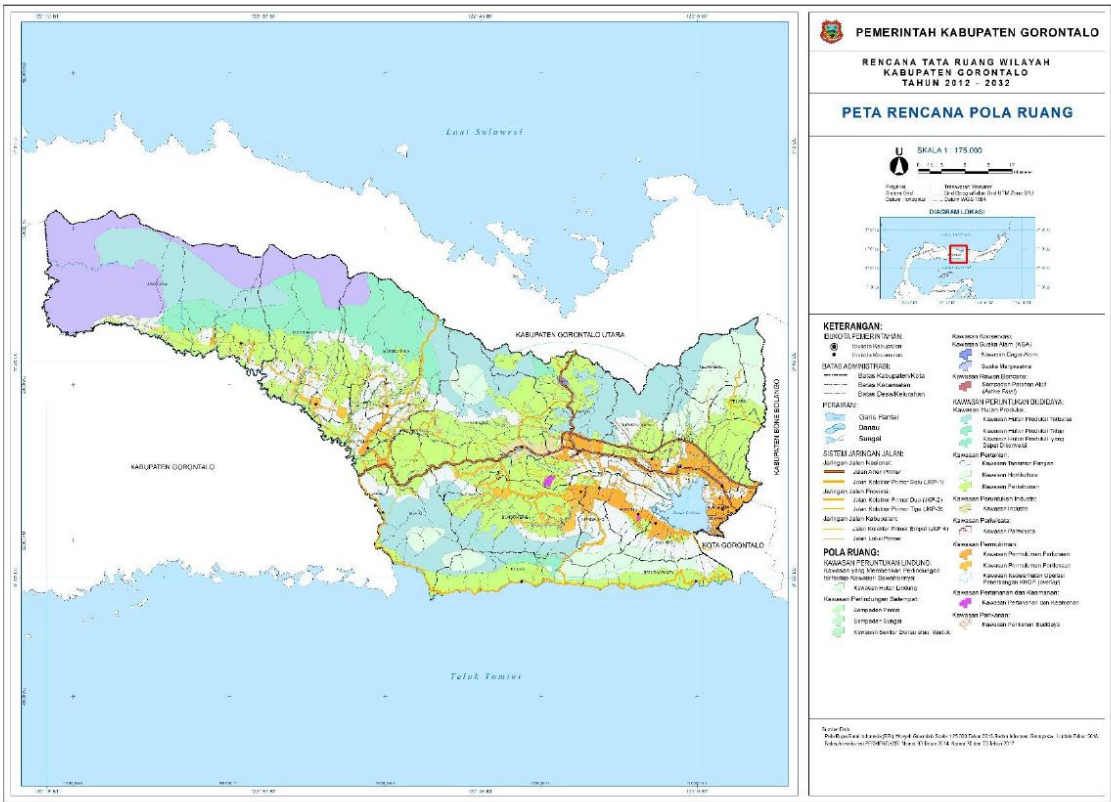
3.1.3 Rencana Pola Ruang

Tujuan kebijakan pengembangan pola ruang adalah untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari. Rencana pola ruang Kabupaten Gorontalo meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis kabupaten.

Rencana pola ruang Kabupaten Gorontalo meliputi kawasan dan sub kawasan sebagai berikut :

1. Kawasan Peruntukan Lindung
 - c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya
 - d. Kawasan perlindungan setempat
 - e. Kawasan rawan bencana
 - f. Kawasan cagar budaya
2. Kawasan Peruntukan Budidaya
 - a. Rencana kawasan hutan produksi
 - b. Rencana kawasan hutan rakyat
 - c. Rencana kawasan pertanian
 - d. Rencana kawasan perikanan
 - e. Rencana kawasan peternakan
 - f. Rencana kawasan pertambangan dan energi
 - g. Rencana kawasan peruntukan industry
 - h. Rencana kawasan pariwisata
 - i. Rencana kawasan pendidikan
 - j. Rencana kawasan permukiman

Rencana pola ruang Kabupaten Gorontalo digambarkan secara spasial pada Gambar 18.



Gambar 18. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Gorontalo

3.1.4 Kondisi Demografi dan Sosial Budaya

a. Demografi

Deskripsi keadaan demografi Kabupaten Gorontalo yang disajikan dalam laporan ini meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, proyeksi jumlah penduduk, jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk, jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga. Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 -2018 ditunjukkan pada Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo Per Kecamatan Tahun 2017 – Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)			
		2017	2018	2019	2020
1	Batudaa Pantai	11 966	11 955	50444	11886
2	Biluhu	8 615	8 642	23365	8267
3	Batudaa	14 417	14 591	14689	14330
4	Bongomeme	19 360	19 559	42041	19080
5	Tabongo	18 767	18 768	17244	18284
6	Dungaliyo	17 454	17 484	12062	17054
7	Tibawa	41 126	41 775	30412	40798
8	Pulubala	26 090	25 311	19620	24752
9	Boliyohuto	16 893	17 194	23104	16836
10	Mootilango	19 508	19 552	19610	18932

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)			
		2017	2018	2019	2020
11	Tolangohula	22 675	23 019	25244	22728
12	Asparaga	13 767	13 273	25406	13070
13	Bilato	9 868	9 905	15494	9732
14	Limboto	49 241	50 050	18801	49796
15	Limboto Barat	25 569	25 448	8621	25353
16	Telaga	22 651	23 254	13425	23240
17	Telaga Biru	29 378	29 920	12525	29999
18	Tilango	14 977	15 147	9873	16345
19	Telaga Jaya	12 162	12 359	17463	12625
Kabupaten Gorontalo		392 673	394 484	399443	393107

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, (2018) (2019); (2020); (2021)

Berdasarkan Tabel 16, jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo 2017 – Tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada Tahun 2016 sebanyak 392673 jiwa, Tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 394484 jiwa, dan pada Tahun 2018 meningkat lagi menjadi 397206 jiwa. Pada Tahun 2019 jumlah penduduk mengalami penurunan. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian dan migrasi. Perubahan jumlah penduduk jika dirinci per kecamatan pada umumnya mengalami peningkatan, namun terdapat 5 kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk yaitu Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Asparaga dan Kecamatan Limboto Barat. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gorontalo disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gorontalo Per Kecamatan (Tahun 2016-2017 dan Tahun 2017 – 2018)

Kecamatan		Laju Pertumbuhan Penduduk / Tahun (%)	
		2016-2017	2017-2018
1	Batudaa Pantai	0,521	-0,092
2	Biluhu	-1,034	0,313
3	Batudaa	0,586	1,207
4	Bongomeme	1,499	1,028
5	Tabongo	-0,593	0,005
6	Dungaliyo	-0,700	0,172
7	Tibawa	0,844	1,578
8	Pulubala	-0,405	-2,986
9	Boliyohuto	1,228	1,782
10	Mootilango	-0,924	0,226
11	Tolangohula	0,787	1,517
12	Asparaga	-0,058	-3,588
13	Bilato	-0,212	0,375
14	Limboto	2,145	1,643
15	Limboto Barat	-1,072	-0,473
16	Telaga	0,297	2,662
17	Telaga Biru	1,549	1,845
18	Tilango	0,053	1,135

Kecamatan		Laju Pertumbuhan Penduduk / Tahun (%)	
		2016-2017	2017-2018
19	Telaga Jaya	0,123	1,620
Kabupaten Gorontalo		0,461	0,690

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo (2019)

Berdasarkan Tabel 17, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2017 sebesar 0,461%, sedangkan Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan menjadi 0,690%. Laju pertumbuhan penduduk di setiap Kecamatan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kecamatan Batudaa Pantai Tahun 2016-2017 mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,521%, sedangkan pada Tahun 2017-2018 pertumbuhan penduduk menurun menjadi -0,092%. Berbeda dengan Kecamatan Biluhu, pertumbuhan penduduk pada Tahun 2016-2017 sebesar -1,034%, sedangkan pada Tahun 2017-2018 laju pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 0,313%. Komponen-komponen yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi) penduduk.

Tabel 18. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	16103	15333	31436
5-9	15429	14901	30330
10-14	17885	17252	35137
15-19	18170	17281	35451
20-24	18570	18022	36592
25-29	17481	16768	34249
30-34	15869	15035	30904
35-39	14905	14557	29462
40-44	13985	13819	27804
45-49	12561	12731	25292
50-54	11056	11202	22258
55-59	8924	9332	18256
60-64	6616	6932	13548
65-69	4677	5120	9797
70-74	2958	3402	6360
75+	2763	3468	6231
Kabupaten Gorontalo	197952	195155	393107

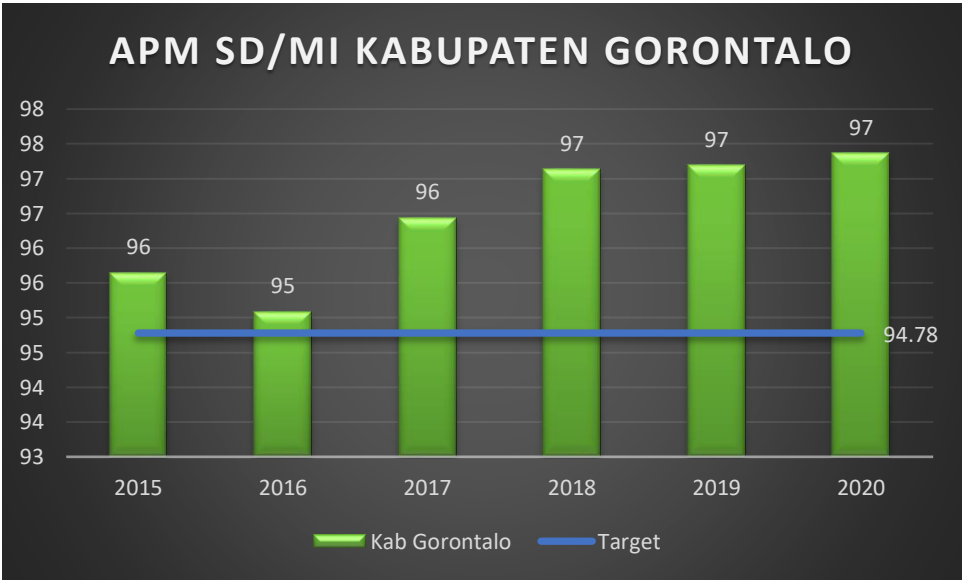
Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo (2019)

Tabel 18 menunjukkan bahwa di Kabupaten Gorontalo, penduduk laki-laki berjumlah 197952 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 195155 jiwa. Dilihat dari kelompok umur, penduduk di Kabupaten Gorontalo paling banyak didominasi oleh kelompok umur 20-44 Tahun, yaitu dengan jumlah laki-laki sebanyak 18570 jiwa dan perempuan 18022 jiwa dan total keseluruhan berjumlah 36592 jiwa. Kelompok umur dengan jumlah penduduk paling rendah yaitu kelompok umur yang sudah berusia 75 Tahun ke atas, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2763 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 3468 jiwa. Tabel 7 juga menunjukkan kelompok umur muda memiliki jumlah penduduk yang besar dan kecenderungan jumlah penduduk semakin kecil dengan bertambahnya umur. Kondisi tersebut jika

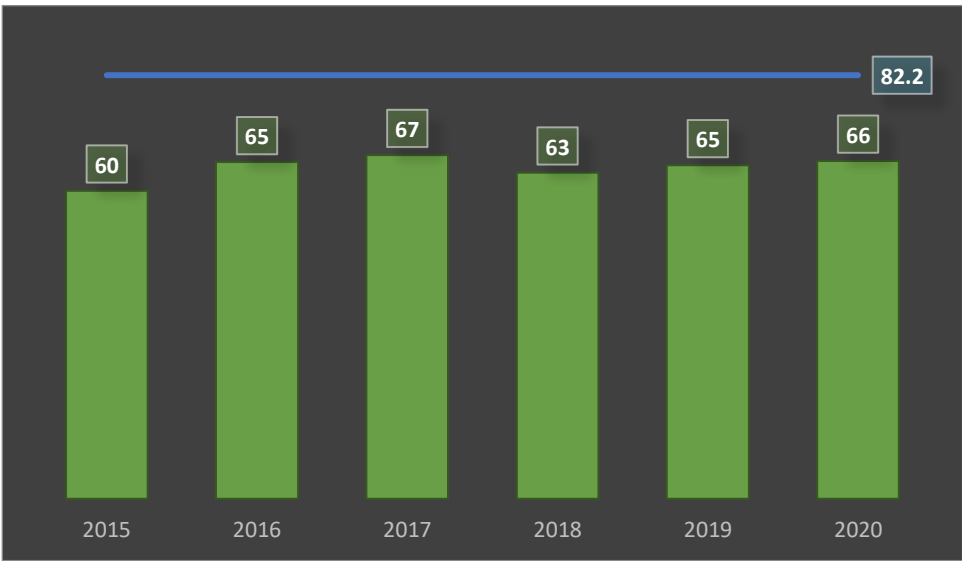
digambarkan dalam bentuk piramida akan memiliki bentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif mencirikan tingginya angka kelahiran yang tinggi, tingginya angka kematian, rendahnya angka harapan hidup. Piramida ekspansif juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kabupaten Gorontalo.

b. Pendidikan

Aspek sosial budaya yang dideskripsikan dalam laporan ini meliputi angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK), indeks pembangunan manusia (IPM), angka harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gorontalo.



Gambar 19. APM SD/MI di Kabupaten Gorontalo



Gambar 20. APM SMP/MTs di Kabupaten Gorontalo

Gambar 19 menunjukkan APM SD/Mi di Kabupaten Gorontalo telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa anak sekolah usia SD yang bersekolah sebesar 97%.

Gambar 20 menunjukkan APM SMP/MTs di Kabupaten Gorontalo belum mencapai target. Capaian Tahun 2020 APM SMP/MTs sebesar 66%.

Tabel 19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015- 2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2020	66,92
2019	66,69
2018	65,78
2017	64,95
2016	64,22
2015	63,63

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo, (2021)

Menurut BPS, IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak. Semakin tinggi nilai IPM daerah, maka pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Tabel 19 menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Gorontalo meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 IPM sebesar 65,78, tahun 2017 sebesar 64,95, tahun 2016 sebesar 64,22, tahun 2015 sebesar 63,63 dan tahun 2014 62,90. Angka-angka IPM tersebut menunjukkan IPM Kabupaten Gorontalo dari tahun 2014 - tahun 2018 berada pada kategori sedang (angka IPM 60 hingga 70 tingkat pertumbuhan sedang).

c. Ketenagakerjaan

Aspek ketenagakerjaan yang dideskripsikan dalam laporan ini meliputi jumlah penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu Kabupaten Gorontalo, Tahun 2018 dan jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2018. Jumlah penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja berdasarkan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu Kabupaten Gorontalo, Tahun 2019

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	113583	67418	181001
Bekerja	110832	64354	175186
Pengangguran Terbuka	2751	3064	5815
Bukan Angkatan Kerja	23015	71436	94451
Sekolah	9909	13035	22944
Mengurus Rumah Tangga	5391	54148	59539
Lainnya/	7715	4253	11968

Jumlah	136598	138854	275452
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/	83,15	48,55	65,71
Tingkat Pengangguran	2,42	4,54	3,21

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo,(2020)

Tabel 20 menunjukkan bahwa angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dengan jumlah 181001 orang dan pengangguran terbuka dengan jumlah 5815 orang. Bukan angkatan kerja terdiri dari 3 jenis kegiatan, yaitu sekolah dengan jumlah 22944 orang, mengurus rumah tangga dengan jumlah 593539 orang, dan kegiatan lainnya dengan jumlah 11968 orang. Jumlah seluruh angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk semua jenis kegiatan dalah sebesar 275452 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja untuk semua jenis kegiatan memiliki jumlah 65,71, sedangkan tingkat pengangguran untuk semua jenis kegiatan berjumlah 3,21.

Tabel 21. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2019

Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	22177	12068	34245
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tak dibayar	29355	8942	38297
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5036	1720	6756
Buruh,Karyawan,Pegawai	29647	25031	54678
Pekerja bebas di Pertanian	10799	2172	12971
Pekerja Bebas di non Pertanian	9296	1989	11285
Pekerja keluarga/tak dibayar	4522	12432	16954
Jumlah/ Total	110832	64354	175186

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo,(2020)

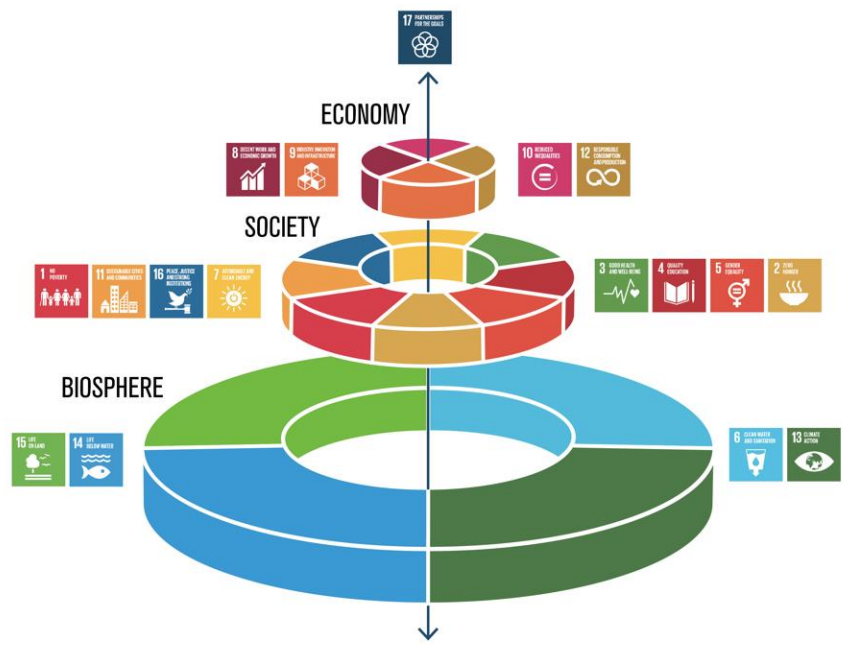
3.2 Kondisi Umum Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjtuan (TPB) atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDG’s) merupakan agenda dunia untuk pembangunan menuju kemaslahatan dunia. Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah. Analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan target TPB yang ingin dicapai biasanya diawali melalui identifikasi isu-isu strategis. Kaitannya dengan TPB yang memiliki empat pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, social, hukum dan tata kelola, maka identifikasi isu-isu strategis dalam perumusan KRP disesuaikan dengan tiga pilar utama dari TPB serta tata kelolanya, yang mencakup tujuan kelompok ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola; seperti yang diilustrasikan pada Gambar 21.

Gambar 21 menceritakan bahwa kondisi lingkungan (biosphere : ekosistem daratan, sumber daya kelautan, air bersih dan sanitasi yang layak, penanganan perubahan iklim) merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 21. Kaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan pencapaian TPB
(Sumber: Folke, dkk., 2016)

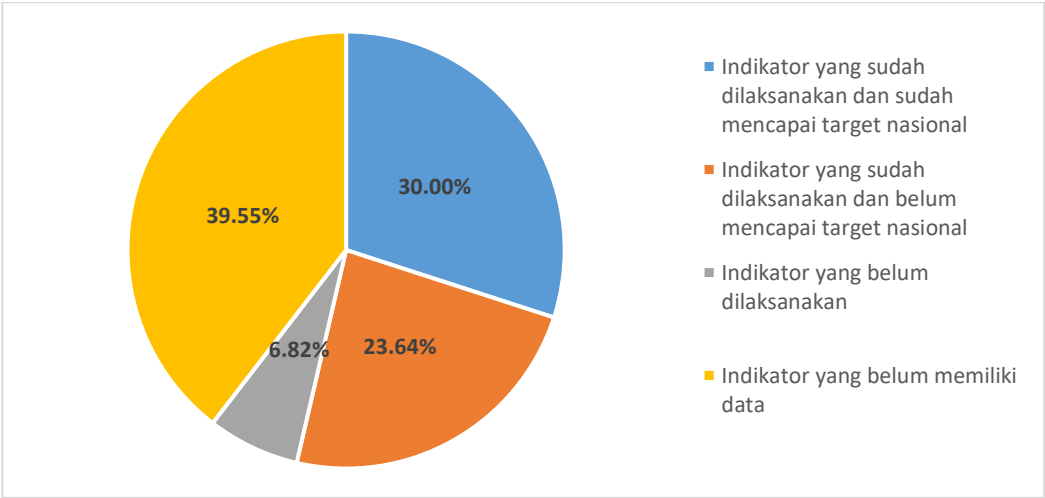
Tahap evaluasi dilakukan melalui evaluasi terhadap pencapaian TPB dalam periode Tahun 2016 hingga Tahun 2020. Sebagai acuan pencapaian adalah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah 220 indikator. Kategori pencapaian TPB dibagi atas 4 (empat) kategori yaitu :

- Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional (SS)

- Indiaktor yang sudah dilakanakan tapi belum mencapai target nasional (SP)
- Indikator yang belum dilaksanakan (SB)
- Indiaktor yang belum ada data (NA)

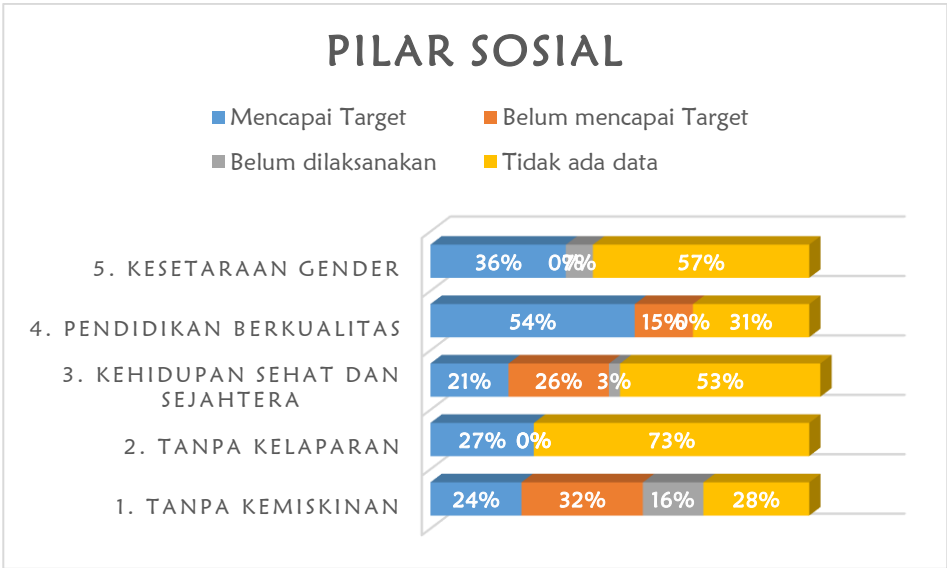
Hasil evaluasi pencapaian TPB di Kabupaten Gorontalo diperoleh 66 indikator (30%) indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator yang telah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional berjumlah 56 indikator (25,45%). Indikator yang belum dilaksanakan berjumlah 15 indikator (6,42%). Indikator yang belum ada data sejumlah 83 indikator (37,73%). Grafik persentase hasil evaluasi pencapaian TPB ditunjukkan pada Gambar 22.



Gambar 22. Grafik persentase hasil evaluasi pencapaian TPB

3.2.1 Capaian Target TPB Pilar Sosial

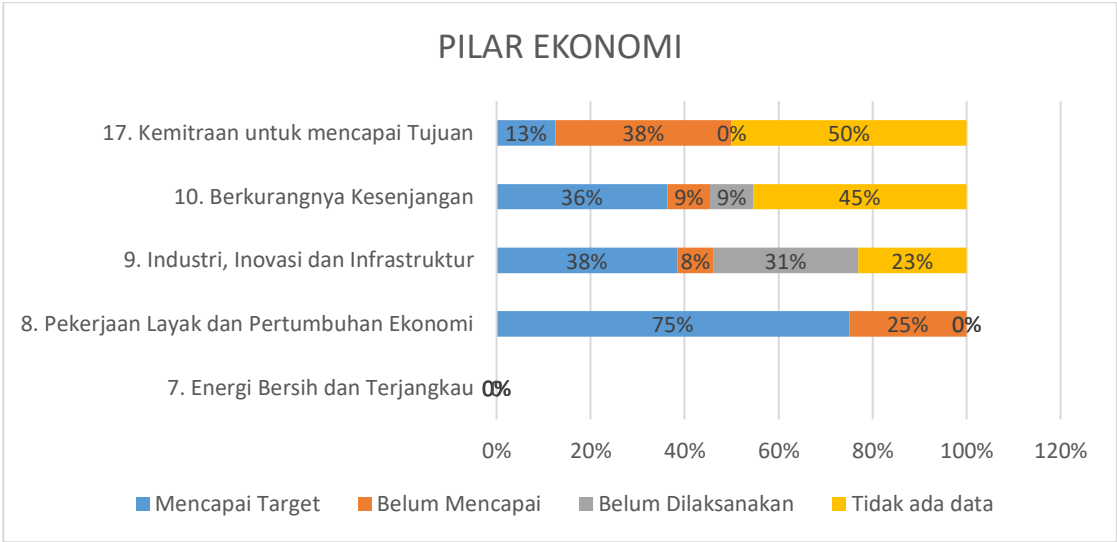
Total indikator pada Pilar sosial adalah 96 indikator. Hasil evaluasi capaian TPB untuk target sosial menunjukkan bahwa 29 indikator (30%) telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator yg telah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional berjumlah 30 indikator (31%). Indikator pada Pilar sosial yang belum dilaksanakan sejumlah 1 indikator (1%) dan indikator yang belum ada data sejumlah 36 indikator (38%).



Gambar 23. Grafik capaian TPB untuk pilar sosial

3.2.2 Capaian Target TPB Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Capaian TPB untuk pilar ekonomi ditunjukkan pada Gambar 24.

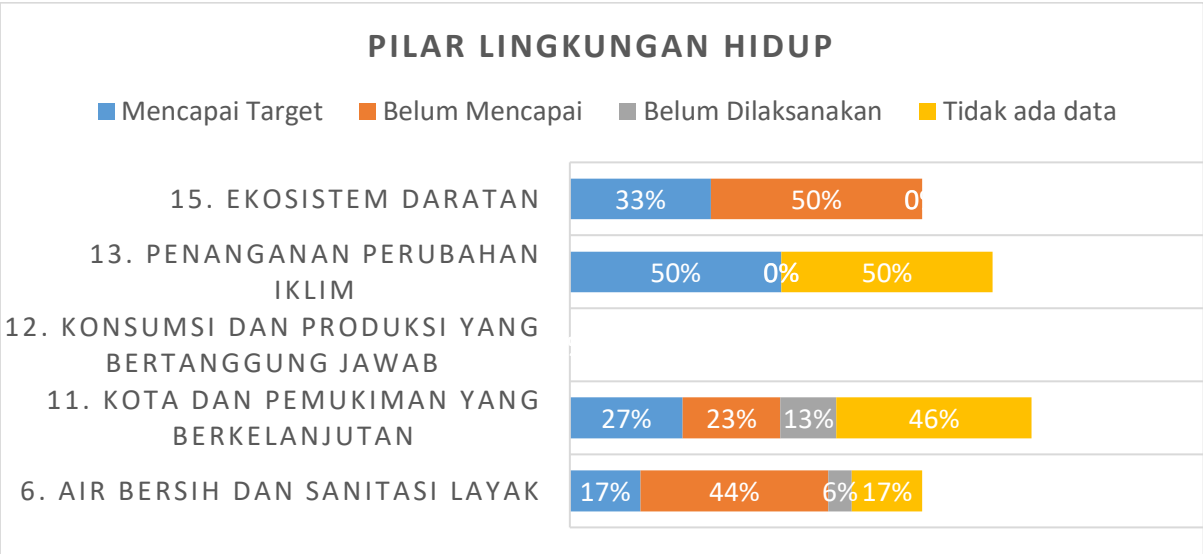


Gambar 24. Capaian TPB untuk pilar ekonomi

Data pada gambar 24 menunjukkan bahwa capaian tertinggi pada tujuan 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi mencapai 75%. Tujuan 9 yaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur mencapai 38%. Capaian indikator pada tujuan 10 yaitu Berkurangnya kesenjangan mencapai 36%. Pada tujuan 17 kemitraan untuk mencapai tujuan menunjukkan 13% dan pada tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau menunjukan 0%.

3.2.3 Capaian Target TPB Pilar Lingkungan Hidup

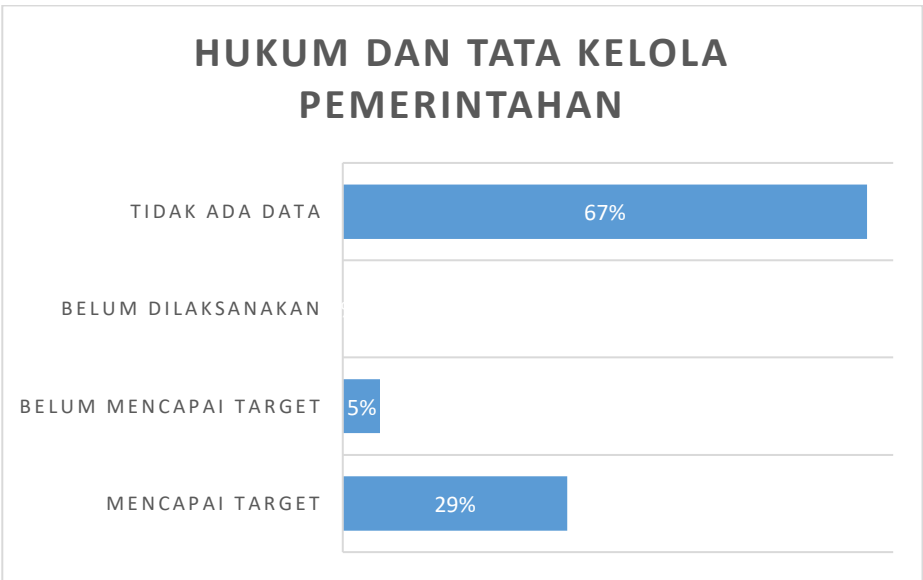
Pilar lingkungan hidup terdiri dari tujuan ke 6 (air bersih dan sanitasi layak), tujuan 11 (Kota dan pemukiman layak), tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), tujuan ke 13 (penanganan perubahan iklim), dan tujuan 15 (ekosistem daratan). Hasil evaluasi tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Gambar 25.



Gambar 25. Hasil evaluasi TPB pilar lingkungan hidup

3.2.4 Capaian Target TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola pemerintahan meliputi tujuan ke 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Capaian pada pilar ini adalah indicator yang telah mencapai target nasional 29%. Belum mencapai target 5% dan yang belum memiliki data sebesar 67%.



Gambar 26. Grafik hasil evaluasi pilar hukum dan tata kelola pemerintahan

3.3 Kondisi Keuangan Kabupaten Gorontalo

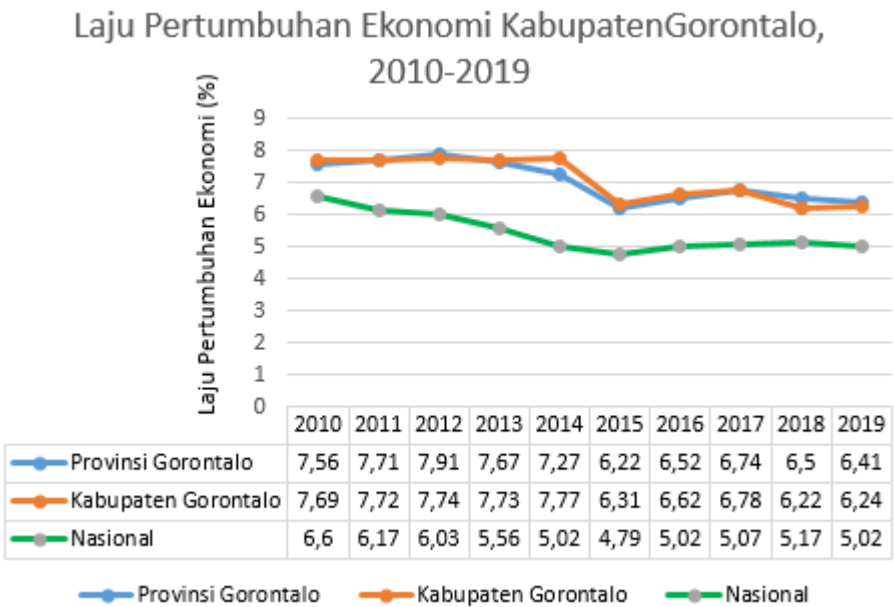
Keuangan daerah diartikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan daerah meliputi pendapatan dari penerimaan dan pembiayaan daerah. Untuk mengetahui kinerja (kapasitas) keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo, diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo tahun 2016 - 2019. Selanjutnya akan diuraikan kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja dan transfer daerah, serta pembiayaan daerah yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

3.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian Kabupaten Gorontalo didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi rata-rata terhadap PDRB sebesar 39,36 pada periode 2010-2019. Lapangan usaha yang memberi kontribusi terbesar kedua yaitu konstruksi dengan rata-rata kontribusi 15,33%. Transportasi dan perdagangan menyumbang rata-

Sumber : BPS Kabupaten Gorontalo,(2020)

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo menunjukkan tren menurun pada periode 2010-2019. Pada periode 2015-2019 terjadi penurunan angka pertumbuhan sebesar rata-rata 0,22% per tahun (Tabel 39). Laju pertumbuhan ekonomi tahun2019 diperkirakan sebesar 6,24%, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo sebesar 6,41% tetapi masih lebih tinggi laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (Gambar 27).



Gambar 27. Grafik perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan Indonesia

Berdasarkan data PDRB yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Gorontalo bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor ini merupakan sektor basis dengan nilai LQ 1,05. Laju Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 menunjukkan peningkatan dibanding laju pertumbuhan tahun 2018. LP tahun 2019 lebih tinggi dari LP nasional tapi lebih rendah dari LP Provinsi. Hal ini menunjukkan perkembangan perekonomian yang cukup baik secara nasional.

3.3.2 Kinerja Pelaksanaan APBD 2016-2021

APBD Kabupaten Gorontalo dibentuk oleh dua komponen utama yakni pendapatan dan pengeluaran daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat – Dana Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah, Bantuan Keuangan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pada sub bab ini akan diuraikan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo selama tahun anggaran 2016 – 2019. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah adalah sebesar 6.51 persen. Kontribusi paling besar diperoleh dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang mencapai 234.13 persen dan diikuti oleh transfer pemerintah pusat – dana lainnya sebesar 16.89 persen. Pendapatan daerah juga didorong oleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 11.59 persen. Sementara transfer pemerintah daerah mengalami

pertumbuhan rata-rata 7 persen dan dana perimbangan tumbuh sebesar 3.24 persen selama periode tersebut. Sedangkan dari sisi bantuan keuangan pemerintah daerah lain terus mengalami penurunan hingga mencapai rata-rata -39.94. Dibandingkan dengan komponen lainnya, dana perimbangan memiliki tingkat pertumbuhan yang paling kecil persentasenya setiap tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan dari 72.89 persen menjadi 68.76 persen di tahun 2017, dana perimbangan memiliki proporsi yang paling besar dalam pendapatan daerah

Kinerja Pendapatan Daerah selanjutnya dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya. Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 40, APBD Kabupaten Gorontalo tahun 2016 setelah perubahan adalah Rp. 1,306,043,203,343.00 dengan realisasi Rp. 1,247,786,283,114.68 atau sebesar 95.53 persen dari total anggaran. Pada tahun 2017 anggaran diturunkan menjadi Rp. 1,259,961,720 dengan realisasi Rp. 1,259,472,875,908.81 atau sebesar 99.96 persen. Dua tahun berikutnya mengalami kenaikan secara berturut-turut hingga mencapai Rp. 1,537,963,367,536.00 dengan realisasi Rp. 1,499,154,604,216.41 atau sebesar 97.48 persen.

Tabel 25. Rata-rata pertumbuhan dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2016-2020 Kabupaten Gorontalo

N o	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	RataRa ta Pertum buhan (%)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125,271,076,533.68	190,428,308,121.81	147,992,401,409.49	155,465,564,155.41	128.152.368.314,68	11.59
a	Pajak Daerah	17,383,835,346	22,180,564,490.	27,456,459,271	31,295,612,791	30.720.192.360	
b	Retribusi Daerah	4,874,089,189	5,940,899,236	9,099,111,575.00	5,306,381,095	2.585.830.730	
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,214,523,748	2,921,391,368	4,581,761,382	5,453,910,979	3.080.489.623	
d	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100,798,628,250.68	159,385,453,027.81	106,855,069,181.49	113,409,659,290.41	91.765.855.601,68	
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	909,418,387,567	866,050,166,339	1,002,264,188,745	988,549,822,562	894.245.031.176	3.24
a	Dana Bagi Hasil Pajak	14,582,008,911	10,086,970,835	9,607,643,593	9,708,707,700	9,840,933,391	
b	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1,259,825,831	2,616,095,261	1,012,502,336	1,082,877,200	1,008,065,429	
c	Dana Alokasi Umum	665,680,855,000	653,986,983,000	653,986,983,000	675,236,653,000	618.060.475.000	
d	Dana Alokasi Khusus	129,111,543,825	97,761,567,164	214,223,605,331	175,795,714,415	122,144,622,301	
e	Dana Alokasi Khusus (DAK Tambahan)	0.00	7,502,000,000	0.00	2,743,100,000	130,724,703,125	

N o	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	RataRa ta Pertum buhan (%)
f	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA	98,784,154,000	94,096,550,079	123,433,454,485	123,982,770,247	12,466.231.930	
3	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA LAINNYA	158,635,472,000	157,372,168,000	211,949,169,000	248,935,865,000	242.270.044.000	16.89
a	Dana Penyesuaian-Dana Insentif Daerah	41,084,894,000	7,500,000,000	41,000,000,000	35,068,584,000	30.466.918.000	
b	Dana Desa dan Desa Adat Yang Bersumber Dari APBN	117,550,578,000	149,872,168,000	170,949,169,000	213,867,281,000	211.803.126.000	
4	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	37,575,812,314	37,094,340,244	38,023,437,984	45,195,759,778	59.321.810.897	7
a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Provinsi	37,575,812,314	37,094,340,244	38,023,437,984	45,195,759,778	59.321.810.897	
5	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3,588,205,000	2,025,544,100	2,000,000,000	500,000,000	8.378.572.650	39.94
a	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Provinsi Lain	3,588,205,000	2,025,544,100	2,000,000,000	500,000,000	8.378.572.650	
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13,297,329,700	6,502,349,104	54,823,200,000	60,507,592,721	76.218.083.924	234.13
a	Pendapatan Hibah	13,297,329,700	6,500,277,500	54,823,200,000	60,507,592,721	76.218.083.924,20	
b	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c	Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
d	Pendapatan Lainnya	0.00	2,071,604.00	0.00	0.00	0.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,247,786,283,114.68	1,259,472,875,908.81	1,457,052,397,138.49	1,499,154,604,216.41	1.408.585.910.961,88	6.51

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

Tabel 26. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2019 Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	(%)
1	BELANJA OPERASI	856,943,943,099.45	896,601,432,343.80	926,241,884,342.70	998,093,149,403.48	5.23
1.1	Belanja pegawai	559,716,731,734	485,137,083,550.00	489,645,191,012.00	594,644,136,593.00	
1.2	Belanja barang	290,038,211,365.45	366,181,617,242.80	400,035,198,230.70	358,916,609,124.48	
1.3	Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.4	Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00	

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	(%)
1.5	Hibah	7,189,000,000.00	29,761,315,956.00	19,982,963,000.00	24,093,309,036.00	
1.6	Bantuan sosial	0.00	15,521,415,595.00	16,578,532,100.00	20,439,094,650.00	
2	BELANJA MODAL	192,888,815,088.00	157,773,897,450.00	281,061,413,959.00	254,330,253,622.00	16.81
2.1	Belanja Tanah	1,162,600,000.00	731,300,000.00	3,806,929,150.00	39,800,000.00	
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	41,373,621,574.00	50,174,465,583.00	90,834,141,024.00	79,353,052,274.00	
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	26,301,814,610.00	21,040,481,366.00	42,867,487,154.00	57,247,905,292.00	
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	123,725,749,154.00	78,311,837,516.00	127,519,216,932.00	103,296,278,225.00	
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	325,029,750.00	7,515,812,985.00	16,033,639,699.00	14,393,217,831.00	
2.6	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	BELANJA TAK TERDUGA	999,605,000.00	443,465,000.00	3,438,806,664.00	725,295,000.00	180.3
4	TRANSFER	187,444,064,532.00	221,404,484,335.00	241,047,955,236.00	289,482,038,762.00	15.7
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan					
4.1	Transfer bagi hasil pajak daerah	1,268,165,000.00	1,917,450,000.00	2,171,446,629.00	2,596,801,700.00	
4.2	Transfer bagi hasil penda patan lainnya	386,757,000.00	528,455,000.00	545,015,332.00	569,823,300.00	
	Transfer Bantuan Keuangan					
4.3	Transfer bantuan keuangan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4	Belanja bantuan kepada partai politik	760,548,336.00	760,548,335.00	721,586,075.00	741,705,762.00	
4.5	Transfer bantuan keuangan ke desa	185,028,594,196.00	218,198,031,000.00	237,609,907,200.00	285,573,708,000.00	
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1,238,276,427,719.45	1,276,223,279,128.80	1,451,790,060,201.70	1,542,630,736,787.48	7.7
	SURPLUS/DEFISIT	9,509,855,395.23	-16,750,403,219.99	5,262,336,936.79	-43,476,132,571.07	- 444.58

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

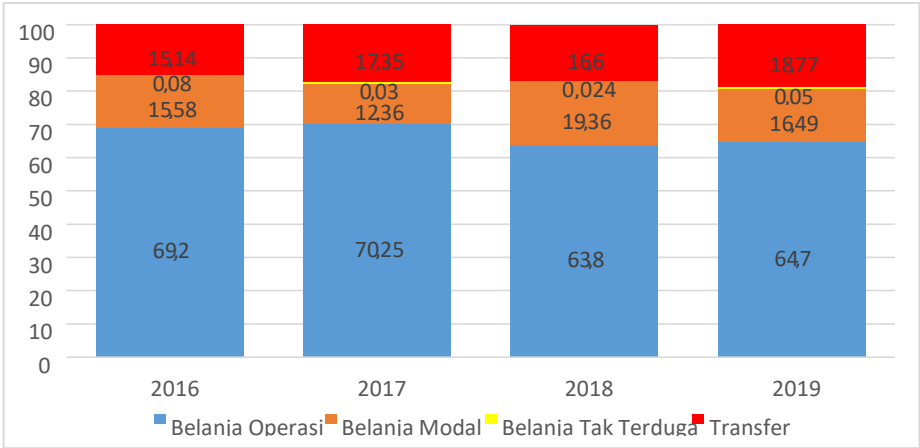
Pada Tabel 26 terlihat bahwa pengeluaran daerah paling besar adalah untuk belanja operasi, pada tahun 2017 proporsi belanja operasi bahkan mencapai 70.25 persen, meningkat dari tahun 2016 yang hanya 69.20 persen. Tahun 2018 belanja operasi mengalami penurunan menjadi 63.80 persen dan mengalami kenaikan 64.7 persen tahun 2019. Sedangkan belanja tak terduga, meskipun pertumbuhan realisasinya mencapai 180.3 persen, akan tetapi proporsinya dalam pengeluaran daerah sangatlah kecil.

Tabel 27. Proporsi Sumber Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2016 - 2019 Kabupaten Gorontalo

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	BELANJA OPERASI	69.20	70.25	63.80	64.7
1.1	Belanja pegawai	45.20	38.01	33.73	38.55
1.2	Belanja barang	23.42	28.69	27.55	23.27
1.3	Bunga	0	0	0	0
1.4	Subsidi	0	0	0	0
1.5	Hibah	0.58	2.33	1.38	1.56
1.6	Bantuan sosial	0	1.22	1.14	1.32
2	BELANJA MODAL	15.58	12.36	19.36	16.49
2.1	Belanja Tanah	0.09	0.06	0.26	0.003
2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.34	3.93	6.26	5.14
2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.12	1.65	2.95	3.71
2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.99	6.14	8.78	6.7

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.03	0.59	1.10	0.93
2.6	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0
3	BELANJA TAK TERDUGA	0.08	0.03	0.24	0.05
4	TRANSFER	15.14	17.35	16.60	18.77
	Transfer Bagi Hasil Pendapatan				
4.1	Transfer bagi hasil pajak daerah	0.10	0.15	0.15	0.17
4.2	Transfer bagi hasil pendapatan lainnya	0.03	0.04	0.04	0.04
	Transfer Bantuan Keuangan				
4.3	Transfer bantuan keuangan lainnya	0	0	0	0
4.4	Belanja bantuan kepada partai politik	0.06	0.06	0.05	0.05
4.5	Transfer bantuan keuangan ke desa	14.94	17.10	16.37	18.51
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	100.00	100.00	100.00	100.00
	SURPLUS/DEFISIT	0.77	-1.31	0.36	-2.82

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo (diolah)



Gambar 28. Persentase Pengeluaran Daerah Terhadap Jumlah Belanja Dan Transfer Kabupaten Gorontalo

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, diolah

Selama periode anggaran 2016-2019 realisasi belanja dan transfer daerah selalu di bawah dari target. Total anggaran untuk belanja dan transfer daerah adalah Rp. 5,999,044,819,886.90 dan realisasinya Rp. 5,508,920,503,837.43 atau hanya 91.83 % dari jumlah anggaran.

3.3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan 2016-2021

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk kebutuhan masyarakat.

[1] Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja

Tabel 28. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi/Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2018	559.882.330.754,00	1.218.722.104.965,70	45,94
2	Tahun anggaran 2019	693.674.654.132,28	1.263.448.698.025,48	54,90
3	Tahun anggaran 2020	624.804.844.924,00	1.110.777.120.023,15	56,25

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, diolah

[2] Analisis Pembiayaan

Dari Tabel 29 dapat dilihat bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Gorontalo jauh lebih besar dari Pengeluaran Pembiayaannya, sehingga Pembiayaan Netto bernilai positif. Rata-rata Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gorontalo mengalami penurunan 5.35 persen per tahun pada periode 2016 – 2019. Komponen yang memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Gorontalo pada periode tersebut adalah SILPA tahun anggaran sebelumnya.

Tabel 29. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gorontalo

NO	Uraian	2018 (n-3)	2019 (n-2)	2020 (n-1)**)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.457.550.168.076,89	1.499.154.604.216,41	1.408.585.910.961,88
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.451.838.178.860,70	1.542.630.736.787,48	1.392.213.157.030,82
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.980.000.000,00	10.300.000.000,00	1.000.000.000,00
	Defisit riil	2.268.010.783,81	53.776.132.571,07	15.372.753.931,06

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, diolah

Tabel 30. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Gorontalo

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (%)		
		2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	89.955.349.994,90	87.046.674.392,91	33.093.523.582,78
2	Pencairan Dana Cadangan			-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			-
6	Penerimaan Piutang Daerah			-

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, diolah

Tabel 31. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	(n-3)		(n-2)		(n-1)**)	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	87.687.339.211,09		33.270.541.821,8		48.466.277.513,84	
1	Pelampauan penerimaan PAD	-				-	
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-				-	
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-				-	
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	57.500.621.730,77	65,57		0,00	0	0,00
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	30.186.717.480,32	34,43	38.268.285.713,56	115,0	48.466.277.513,84	100
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, diolah

3.3.4 Kerangka Pendanaan
[1] Proyeksi Pendapatan dan Belanja

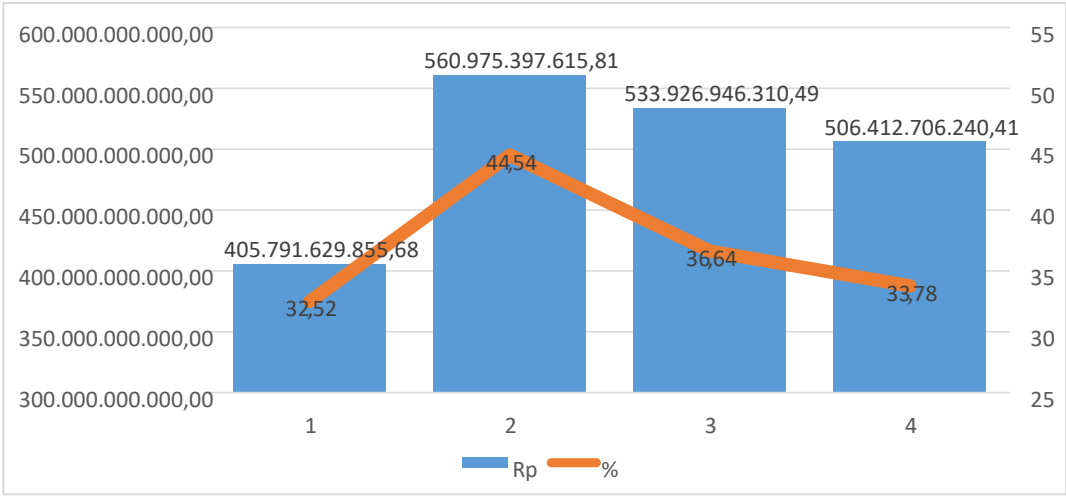
Perhitungan Ruang Fiskal menggunakan rumus yang dikeluarkan oleh Kemenkeu, yaitu keseluruhan Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah; pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (earmarked) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat; dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga dan selanjutnya dibagi dengan keseluruhan Pendapatan Daerah. Ruang fiskal menunjukkan seberapa tingkat keleluasaan pemerintah daerah menggunakan anggaran yang dimilikinya setelah memenuhi semua kewajibannya. Semakin besar ruang fiskal, maka akan semakin mudah bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan untuk program dan kegiatan termasuk program-program penanggulangan kemiskinan.

Tabel 32. Perkembangan Ruang Fiskal Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pendapatan	1,247,786,283,114.68	1,259,472,875,908.81	1,457,052,397,138.49	1,499,154,604,216.41
Pendapatan Hibah	13,297,329,700.00	6,500,277,500.00	54,823,200,000.00	60,507,592,721.00
Dana Penyesuaian	41,084,894,000.00	7,500,000,000.00	41,000,000,000.00	35,068,584,000.00

Uraian	2016	2017	2018	2019
Dana Darurat	0	0	0	0
DAK	129,111,543,825.00	97,761,567,164.00	214,223,605,331.00	175,795,714,415.00
DAK tambahan	0	7,502,000,000.00	0	2,743,100,000.00
DAK non fisik	98,784,154,000.00	94,096,550,079.00	123,433,454,485.00	123,982,770,247.00
Belanja pegawai	559,716,731,734.00	485,137,083,550.00	489,645,191,012.00	594,644,136,593.00
Belanja bunga	0	0	0	0
Ruang fiskal (Rp)	405,791,629,855.68	560,975,397,615.81	533,926,946,310.49	506,412,706,240.41
Ruang fiskal (%)	32.52	44.54	36.64	33.78

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, diolah



Gambar 29. Perkembangan Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gorontalo 2016-2019

Tabel 33. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo

No.	Uraian	Proyeksi Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	Pendapatan	1.595.338.557.614,95	1.755.159.330.545,78	1.933.270.154.557,71	2.131.861.781.880,63	2.353.426.704.000,92
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	- 10.006.646.844	- 24.672.679.168	- 45.731.897.439	- 75.522.514.568	- 117.193.088.637
	Total penerimaan	1.585.331.910.771	1.730.486.651.378	1.887.538.257.119	2.056.339.267.312	2.236.233.615.364
	Dikurangi					
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	464.467.929.498	569.919.514.043	613.237.574.692	660.331.509.851	711.530.799.443
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.120.863.981.273	1.160.567.137.336	1.274.300.682.427	1.396.007.757.461	1.524.702.815.921

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, diolah

Tabel 34. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 s/d 2026 Kabupaten Gorontalo

No.	Jenis Pendapatan Daerah	TARGET 2021	PROYEKSI PENDAPATAN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	PENDAPATAN	1.451.878.306.411,00	1.595.338.557.614,95	1.755.159.330.545,78	1.933.270.154.557,71	2.131.861.781.880,63	2.353.426.704.000,92
1.1	Pendapatan Asli Daerah	166.605.914.189,00	190.249.609.721,96	217.735.024.811,94	249.756.517.548,30	287.144.292.469,15	330.892.369.488,49
1.1.1	Pajak daerah	47.105.000.000,00	57.136.021.130,81	69.303.150.634,97	84.061.273.306,69	101.962.141.766,98	123.675.004.490,84
1.1.2	Retribusi daerah	7.127.170.877,00	8.837.378.274,38	10.957.960.193,79	13.587.388.463,03	16.847.763.815,55	20.890.485.788,13
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.080.489.623,00	3.085.062.395,21	3.089.641.955,39	3.094.228.313,60	3.098.821.479,94	3.103.421.464,52
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	109.293.253.689,00	121.191.147.921,55	134.384.272.027,78	149.013.627.464,99	165.235.565.406,67	183.223.457.745,01
1.2	Dana Perimbangan/TRANSFER	1.222.742.014.782,00	1.345.688.129.632,08	1.480.996.416.529,89	1.629.909.885.861,94	1.793.796.532.104,47	1.974.161.900.912,96
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	62.530.377.440,00	59.400.818.260,91	56.427.889.203,96	53.603.751.147,47	50.920.957.307,02	48.372.433.599,46

Sumber : Badan Keuangan, 2021

3.4 Daya Dukung Lingkungan Hidup

3.4.1 Daya Dukung Air di Kabupaten Gorontalo

Sumber air bersih bagi penduduk di Kabupaten Gorontalo yaitu Sungai Bolango, Sumur Dalam, Mata Air Barakati, Mata Air Dunggala, Sungai Biyonga, Sungai Diloniyohu dan Air terjun Tamaila. Prasarana air bersih terpasang di 17 kecamatan dari 19 kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Dua kecamatan yang belum tersambung dengan jaringan air bersih yaitu Kecamatan Asparaga dan Batudaa Pantai. Jumlah sambungan terpasang sebanyak 19685 unit dengan cakupan pelayanan sebanyak 271.264 jiwa atau 74,27% dari potensi jumlah penduduk yang dapat terlayani. Jumlah masyarakat yang terlayani pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 mencapai 126.194 jiwa atau 46,52% dari kapasitas terpasang (Bappeda Kabupaten Gorontalo, 2021).

Hasil analisis D3TLH Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa 34,7% wilayah Kabupaten Gorontalo berada pada daya dukung jasa ekosistem penyedia air rendah. Proporsi wilayah dengan daya dukung sedang sebesar 44,1% dan 21,3% wilayah dengan daya dukung penyedia air tinggi (lihat Gambar 16).

HASIL ANALISIS DAYA DUKUNG AIR

Analisis daya dukung air dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Perhitungan Ketersediaan (*Supply*) Air (S_A)

Perhitungan S_A diestimasi dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari Metode Rasional yaitu: (Permen LH No. 17 Tahun 2009)

$$S_A = 10 \ C \ R \ A \tag{1}$$

dimana:

$$C = \frac{\sum (C_i A_i)}{\sum A_i} \tag{2}$$

dan

$$R = \frac{\sum R_i}{m} \tag{3}$$

dengan:

- S_A = ketersediaan air (m^3 /tahun)
- C = koefisien limpasan tertimbang
- C_i = koefisien limpasan penggunaan lahan i
- A_i = luas penggunaan lahan i
- R = rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm /tahun)
- R_i = curah hujan tahunan pada stasiun i (mm /tahun)
- m = jumlah stasiun pengamatan curah hujan
- A = luas wilayah (ha)
- 10 = faktor konversi dari $mm.ha$ menjadi m^3 .

2. Perhitungan Kebutuhan (*Demam*) Air (D_A)
 Perhitungan DA diestimasi dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Permen LH No. 17 Tahun 2009):

$$D_A = N \times KHL_A \tag{4}$$

dengan:

D_A = total kebutuhan air (m³/tahun)
 N = jumlah penduduk (orang)
 KHL_A = kebutuhan air untuk hidup layak.

3. Penentuan Status Daya Dukung Air
 Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (S_A) dan kebutuhan air (D_A). Bila $S_A > D_A$ maka daya dukung air dinyatakan surplus. Sebaliknya jika $S_A < D_A$ maka daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui (Permen LH No. 17 Tahun 2009).

HASIL ANALISIS DAYA DUKUNG AIR

1. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang
 Data luas penggunaan lahan bersumber dari RTRW Kabupaten Gorontalo 2012-2032, sedangkan koefisien penggunaan lahan mengacu dari berbagai literatur (Lampiran 1). Hasil perhitungan koefisien penggunaan lahan tertimbang (C) berdasarkan persamaan (2) ditunjukkan pada Tabel 35.

Tabel 35. Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang

Penggunaan Lahan	Koefisien Limpasan (C_i)	Luas (Ha) (A_i)	$C_i \times A_i$
Alang-alang	0,07	4.002,43	280,17
Danau	0,05	2.325,14	116,26
Delta	0,2	10,62	2,12
Emplasemen	0,2	483,86	96,77
Hutan Belukar	0,07	13.792,52	965,48
Hutan Lebat	0,02	70.362,50	1.407,25
Hutan Sejenis	0,05	461,11	23,06
Kebun Campuran	0,1	8.576,12	857,61
Perkampungan	0,6	2.943,68	1.766,21
Perkebunan	0,4	13.663,10	5.465,24
Sawah 1x Padi/Tahun	0,15	4.473,29	670,99
Sawah 2x Padi/Tahun	0,15	21.079,84	3.161,98
Semak	0,3	48.261,55	14.478,47
Sungai	0,05	354,19	17,71
Tanah Terbuka Sementara	0,2	64,30	12,86
Tegalan/Ladang	0,7	24.330,16	17.031,11
Jumlah		215.184,43	46.353,28
Koefsien Limpasan Tertimbang (C)			0,22

Sumber : Hasil analisis, 2021

2. Perhitungan Rata-Rata Curah Hujan Wilayah

Nilai rata-rata curah hujan wilayah (*R*) dihitung dari 12 stasiun curah hujan di wilayah Kabupaten Gorontalo berdasarkan data BWS Sulawesi II lima tahun terakhir (2014-2018). Hasil perhitungan rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah Kabupaten Gorontalo berdasarkan persamaan (3) disajikan dalam Tabel 36.

Tabel 36. Perhitungan rata-rata curah tahunan wilayah di Kabupaten Gorontalo Tahun 2014-2018

No	Nama Stasiun	Curah Hujan (mm)					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	MRG DAS Bolango Bone Dulamayo Selatan	1.35,2	1616,6	2180,6	2096,1	2283,7	1.962,4
2	MRG DAS Limboto Datahu	1372,2	855,2	1648,1	1753,9	1550,9	1.436,1
3	MRG DAS Limboto Hepuhulawa	914,8	862,2	-	1314,8	1323,0	1.103,7
4	MRG DAS Limboto Biyonga	1521,5	1066,7	1985,0	2029,0	3137,7	1.948,0
5	MRG DAS Limboto Pilolalenga	991,8	661,1	1181,4	1403,3	1474,3	1.142,4
6	MRG DAS Limboto Tabongo Timur	1042,7	1072,7	1526,9	1391,5	1364,5	1.279,7
7	MRG DAS Limboto Bunggallo	1085,2	729,2	1266,6	1537,4	2241,3	1.371,9
8	MRG DAS Limboto Iloponu	1709,9	1363,6	2002,0	2631,2	1901,8	1.921,7
9	MRG DAS Limboto Dumati	1023,2	1159,7	1594,7	1734,8	1270,6	1.356,6
10	MRG DAS Langgula Lamu	796,0	919,8	1309,9	1569,0	778,6	1.074,7
11	MRG DAS Paguyaman Mohiolo	1625	1465,3	1812,7	2016,3	1925,7	1.769,0
12	MRG DAS Paguyaman Lakeya	2204,9	1466,0	1858,4	2681,6	1939,4	2.030,1
13	MRG DAS Bendung Paguyaman	1769,3	1454,7	1902,3	2401,7	2196,4	1.944,9
Rata-Rata		1360,9	1.130,2	1.689,1	1889,3	1799,1	1.564,7

Sumber: BWS Sulawesi II, 2014-2018

3. Penghitungan Ketersediaan (Supply) Air

Berdasarkan persamaan (1), ketersediaan (*supply*) air (*S_A*) di wilayah Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} S_A &= 10 \ C \ R \ A \\ &= 10 \times 0,22 \times 1.564,7 \times 212.547 \\ &= 731.659.040 \text{ m}^3/\text{tahun} \end{aligned}$$

4. Penghitungan Kebutuhan (Demand) Air

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gorontalo (2020), jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo tahun 2019 (*N*) sebesar 378.527 orang dan kebutuhan air untuk hidup layak (*KHL_A*) sesuai Permen LH No. 17 Tahun 2009 adalah sebesar 1.600 m³/kapita/tahun, sehingga kebutuhan (*demand*)

air (D_A) di wilayah Kabupaten Gorontalo dapat dihitung sesuai persamaan (4) sebagai berikut:

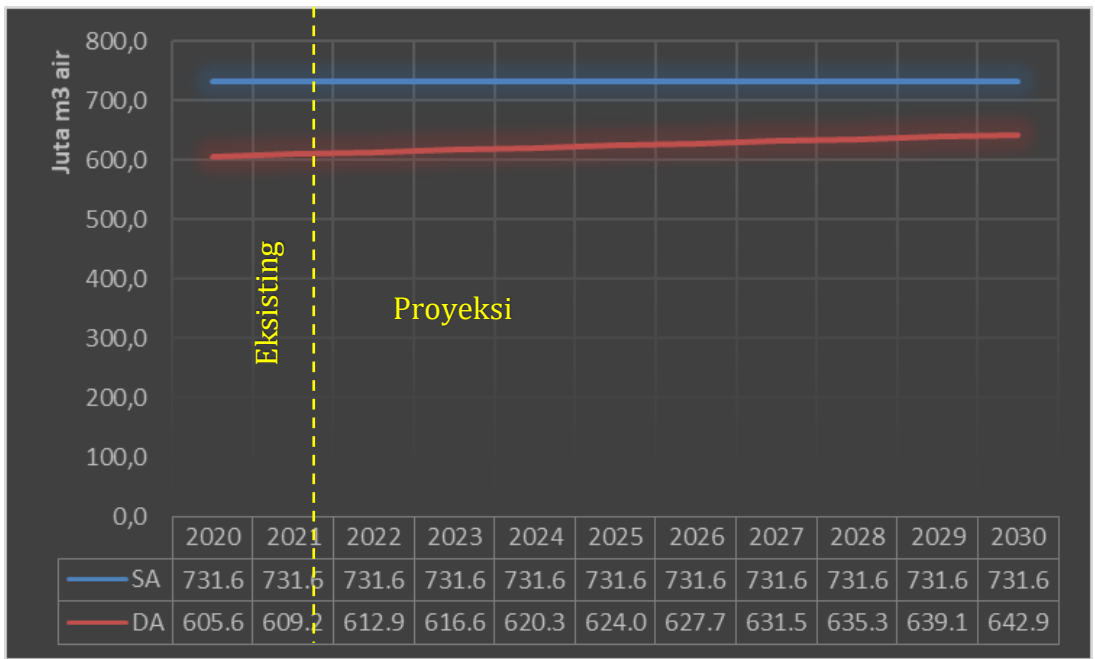
$$\begin{aligned} D_A &= N \times KHL_A \\ &= 378.527 \times 1.600 \\ &= 605.643.200 \text{ m}^3/\text{tahun} \end{aligned}$$

5. Penentuan Status Daya Dukung Air

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai S_A (731.659.040 m³/tahun) > D_A (605.643.200 m³/tahun), sehingga berdasarkan kriteria Permen LH No. 17 Tahun 2009, status daya dukung air di wilayah Kabupaten Gorontalo saat ini dinyatakan surplus.

6. Proyeksi Daya Dukung Air

Untuk menggambarkan ketersediaan dan kebutuhan air di Kabupaten Gorontalo, dapat diproyeksikan daya dukung air Kabupaten Gorontalo untuk 10 tahun ke depan (**Gambar 30**). Ketersediaan air (S_A) sebesar 731.659.040 m³ dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,006 (BPS Kabupaten Gorontalo Tahun 2020) diasumsikan konstan.



Gambar 30. Data Eksisting dan Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Gorontalo

3.4.2 Daya Dukung Lahan Kabupaten Gorontalo

Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfir, atmosfir, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur. Daya dukung lahan adalah kemampuan lahan untuk mendukung kebutuhan lahan untuk penyediaan bahan pangan di Kabupaten Gorontalo. Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan.

Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari setiap komoditas di suatu wilayah, dengan menjumlahkan produk dari semua komoditas yang ada di wilayah tersebut. Untuk penjumlahan ini digunakan harga sebagai faktor konversi karena setiap komoditas memiliki satuan yang beragam. Sementara itu, kebutuhan lahan dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak (Permen LH Nomor 17 Tahun 2009).

Penghitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penghitungan Ketersediaan (Supply) Lahan

Rumus:

$$S_L = \frac{\sum(P_i \times H_i)}{H_b} \times \frac{1}{P_{tvb}} \quad (5)$$

Dimana:

S_L = ketersediaan lahan

P_i = produktivitas setiap jenis komoditas (satuan tergantung kepada jenis komoditas). Komoditas yang diperhitungan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan

H_i = Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen

H_b = Harga satuan beras (Rp/kg) di tingkat produsen

P_{tvb} = Produktivitas beras (kg/ha)

Dalam penghitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga.

2. Penghitungan Kebutuhan (Demand) Lahan

Rumus:

$$D_L = N \times KHL_L \quad (6)$$

Keterangan:

D_L = Total kebutuhan lahan setara beras (ha)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHL_L = Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk:

- Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal.
- Kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras/kapita/ tahun.
- Daerah yang tidak memiliki data produktivitas beras lokal, dapat menggunakan data rata-rata produktivitas beras nasional sebesar 2400 kg/ha/tahun.

2. Penentuan Status Daya Dukung Lahan Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (S_L) dan kebutuhan lahan (D_L) . Bila $S_L > D_L$, daya dukung lahan dinyatakan surplus. Bila $S_L < D_L$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui.

Hasil analisis daya dukung lahan Kabupaten Gorontalo ditunjukkan pada Tabel 37.

Tabel 37. Hasil analisis nilai produksi total lahan di Kabupaten Gorontalo

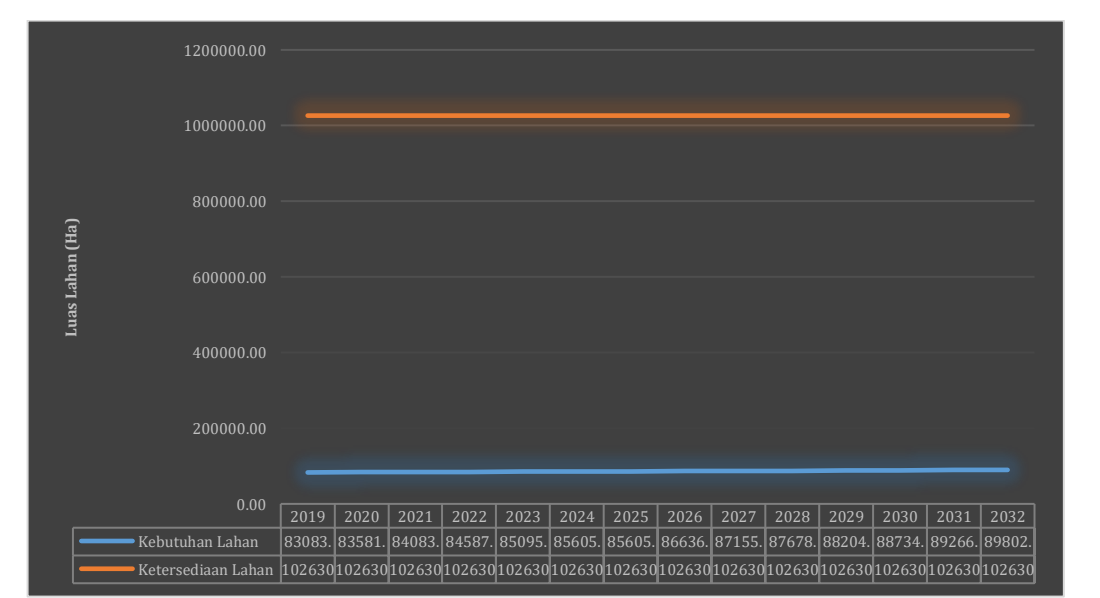
No	Komoditas	Produksi (Pi)	Harga Satuan (Hi)		Pi X Hi
		(KG)		(Rupiah/kg)	
1	Padi Sawah(kg)	110866000	Rp	12,000	1330392000000
3	Jagung (kg)	396360000	Rp	2,700	1070172000000
4	Kacang Hijau (Kg)	32000	Rp	20,000	640000000
5	Bawang Merah	7879000	Rp	35,000	275765000000
6	Terong	291000	Rp	14,500	4219500000
7	Kacang Panjang	807000	Rp	5,000	4035000000
8	Cabe besar	565000	Rp	30,000	16950000000
9	Cabe Rawit(kg)	66286000	Rp	30,000	1988580000000
10	Tomat (kg)	17544000	Rp	3,000	52632000000
11	Pitsae	182000	Rp	5,000	910000000
12	Ketimun	510000	Rp	3,000	1530000000
13	Labu siam	3000	Rp	5,000	15000000
14	Kangkung	173000	Rp	5,000	865000000
15	Bayam	18000	Rp	3,000	54000000
16	Jahe	96046	Rp	5,000	480230000
17	Kunyit	33790	Rp	5,000	168950000
19	Alpukat	39000	Rp	6,000	234000000
20	Belimbing	165000	Rp	5,000	825000000
21	Langsat	13684000	Rp	5,000	68420000000
22	Durian	9599000	Rp	30,000	287970000000
23	Jambu Biji	270000	Rp	5,000	1350000000
24	Jeruk Siam	140000	Rp	5,000	700000000
25	Jeruk besar	112000	Rp	8,000	896000000
26	Mangga	16038000	Rp	3,000	48114000000
27	Nangka	8382	Rp	12,500	104775000
28	Nenas	3424	Rp	3,000	10272000
29	Pepaya	2380000	Rp	5,000	11900000000
30	Pisang	80008	Rp	10,000	800080000
31	Rambutan	829000	Rp	5,000	4145000000
32	Sirsak	332	Rp	10,000	3320000
33	Kelapa	22908030	Rp	8,000	183264240000
34	Kopi	112050	Rp	21,300	2386665000
35	Kakao	415430	Rp	23,639	9820349770
36	Tebu	4000000	Rp	605	2420000000
37	Kapuk	26000		75000	1950000000
38	Cengkeh	261210		60000	15672600000
39	Jambu Mente	167916000		30000	5037480000000
40	Aren	9120		5000	45600000

No	Komoditas	Produksi (Pi)	Harga Satuan (Hi)	Pi X Hi
		(KG)	(Rupiah/kg)	
41	Ayam Kampung (ekor)	524325	40000	20973000000
42	Ayam pedaging (ekor)	3298800	50000	164940000000
43	Itik (ekor)	18555	800000	148440000000
44	Sapi Potong (ekor)	98110	1200000	1177320000000
45	Kambing (ekor)	48360	1750000	84630000000
46	Kuda (ekor)	673	500000	1202223581770
47	Ayam petelur	190028	30000	22714055163540
	Jumlah			46758502327080

Sumber : hasil analisis, 2020

Hasil analisi diperoleh ketersediaan lahan (S_l) sebesar 1.026.306 Ha.

Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 sebesar 378.527 jiwa. Luas lahan yang dibutuhkan untuk hidup layak adalah 0,2194. Kebutuhan lahan Kabupaten Gorontalo diperoleh 83083,19 Ha. Dengan demikian ketersediaan lahan > kebutuhan lahan. Jika diasumsikan bahwa ketersediaan lahan tetap dan kebutuhan lahan meningkat seiring dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, maka proyeksi daya dukung lahan hingga Tahun 2032 ditunjukkan pada Gambar 31.



Gambar 31. Proyeksi Daya Dukung Lahan Pertanian di Kabupaten Gorontalo

3.5 Jasa Ekosistem

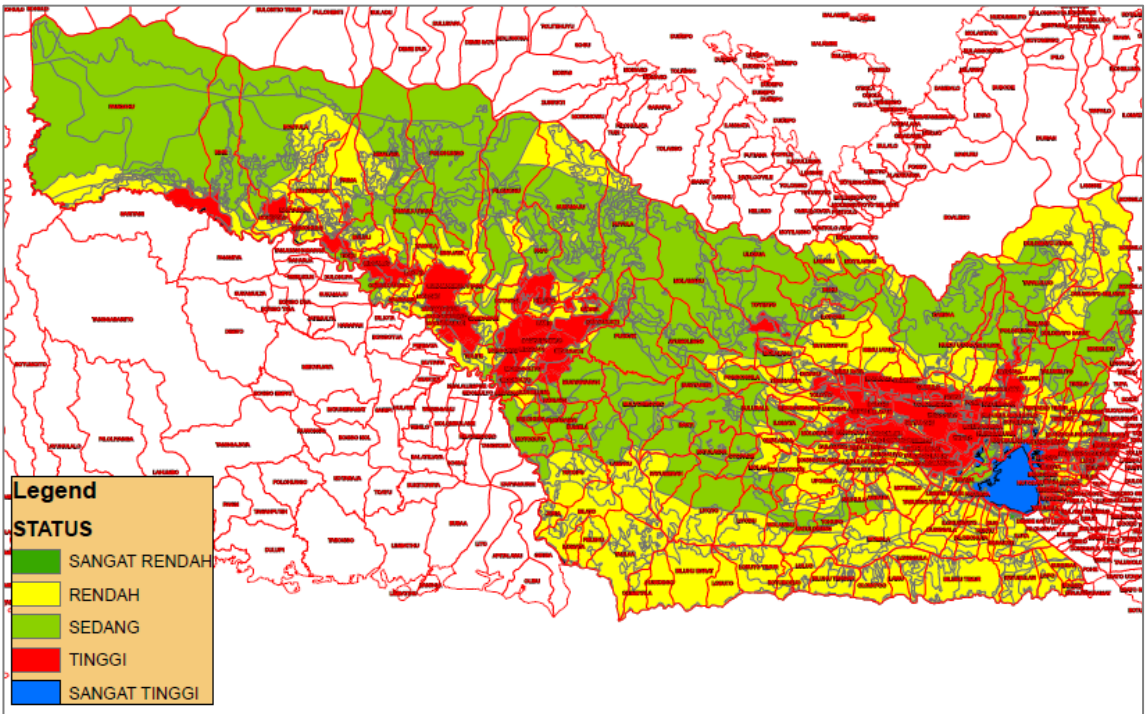
Berdasarkan Laporan Penelitian Analisis D3TLH Kabupaten Gorontalo (2020), perhitungan daya dukung dan daya tampung LH didasarkan pada overlay beberapa data spasial. Asumsi status DDLH hanya didasarkan pada potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut tanpa memperhatikan adanya aliran materi dan ekspor import. Nilai kebutuhan dihitung berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) populasi untuk bahan pangan; dan kebutuhan air domestik dan kebutuhan lahan untuk air. Ketersediaan dihitung berbasis jasa

lingkungan, yaitu dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Bahan Pangan (IJLPBP) untuk bahan pangan; dan Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Air (IJLPA) untuk air bersih .

3.5.1 Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Jasa ekosistem penyediaan pangan dalam kajian ini dibagi menjadi lima kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Wilayah dengan jasa ekosistem penyedia pangan tinggi menunjukkan bahwa ekosistem pada wilayah tersebut memiliki daya dukung atau kemampuan menyediakan pangan yang tinggi. Peta daya dukung lingkungan Kabupaten Gorontalo dalam jasa lingkungan penyediaan pangan ditunjukkan pada **Gambar 30**. Luasan daya dukung lingkungan dalam jasa penyediaan pangan menurut kecamatan di Kabupaten Gorontalo ditunjukkan pada **Tabel 38** dan **Gambar 32**.



Gambar 32. Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Gorontalo
(Sumber : BALITBANG Kabupaten Gorontalo, 2020)

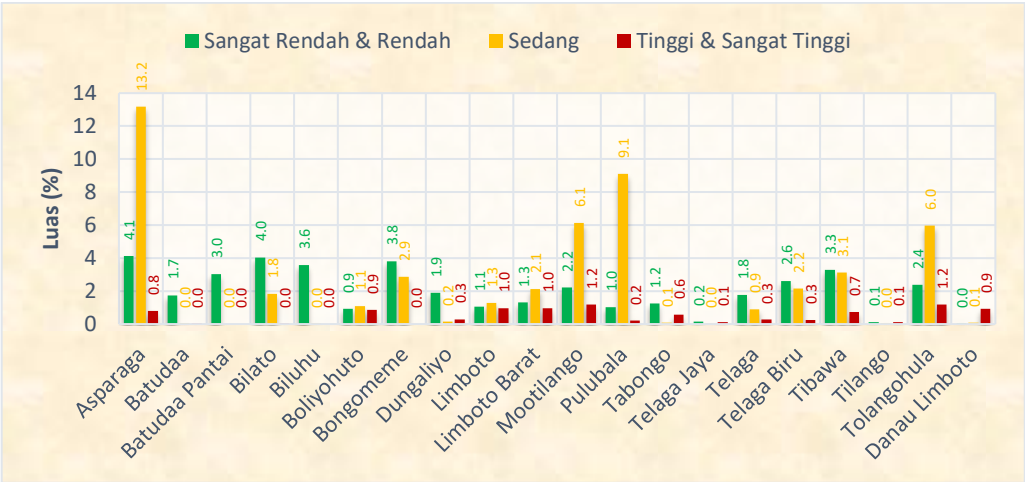
Berdasarkan **Gambar 32** terlihat bahwa sebaran wilayah yang mampu menyediakan jasa lingkungan penyediaan pangan sangat tinggi dan tinggi berada di bagian timur (Danau Limboto dan sekitarnya), serta beberapa tempat

di dataran bagian baratdaya Kabupaten Gorontalo. Wilayah Kabupaten Gorontalo yang masuk kategori sangat tinggi dan tinggi dalam menyediakan jasa lingkungan penyediaan pangan tersebut adalah wilayah ekoregion vegetasi terna tepian danau dengan bentang lahan berupa danau, dataran lakustrin bermaterial aluvium dan sebagian bentang lahan dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik.

Tabel 38. Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Gorontalo

No.	Kecamatan	Sangat Rendah & Rendah		Sedang		Tinggi & Sangat Tinggi		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Asparaga	8.987,3	4,1	28.776,9	13,2	1.741,4	0,8	39.505,6	18,1
2	Batudaa	3.794,8	1,7	85,2	0,0	35,7	0,0	3.915,6	1,8
3	Batudaa Pantai	6.633,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.633,8	3,0
4	Bilato	8.823,3	4,0	4.001,2	1,8	53,0	0,0	12.877,4	5,9
5	Biluhu	7.771,3	3,6	3,0	0,0	0,0	0,0	7.774,3	3,6
6	Boliyohuto	1.991,4	0,9	2.370,6	1,1	1.886,8	0,9	6.248,8	2,9
7	Bongomeme	8.308,8	3,8	6.227,1	2,9	0,0	0,0	14.535,9	6,7
8	Dungaliyo	4.127,7	1,9	335,7	0,2	642,0	0,3	5.105,5	2,3
9	Limboto	2.306,7	1,1	2.819,7	1,3	2.118,9	1,0	7.245,4	3,3
10	Limboto Barat	2.865,6	1,3	4.633,1	2,1	2.116,3	1,0	9.615,0	4,4
11	Mootilango	4.843,1	2,2	13.357,4	6,1	2.583,2	1,2	20.783,7	9,5
12	Pulubala	2.255,1	1,0	19.855,1	9,1	454,1	0,2	22.564,3	10,3
13	Tabongo	2.711,1	1,2	172,5	0,1	1.242,7	0,6	4.126,2	1,9
14	Telaga Jaya	333,7	0,2	74,0	0,0	230,8	0,1	638,6	0,3
15	Telaga	3.853,0	1,8	1.957,1	0,9	598,7	0,3	6.408,8	2,9
16	Telaga Biru	5.676,5	2,6	4.695,5	2,2	545,9	0,3	10.917,9	5,0
17	Tibawa	7.187,7	3,3	6.830,9	3,1	1.561,4	0,7	15.579,9	7,1
18	Tilango	284,0	0,1	47,6	0,0	272,1	0,1	603,6	0,3
19	Tolangohula	5.203,9	2,4	13.027,6	6,0	2.592,1	1,2	20.823,6	9,5
	Danau Limboto	0,3	0,0	179,1	0,1	2.024,7	0,9	2.204,0	1,0
	Jumlah	87.958,9	40,3	109.449,2	50,2	20.699,7	9,5	218.107,8	100,0

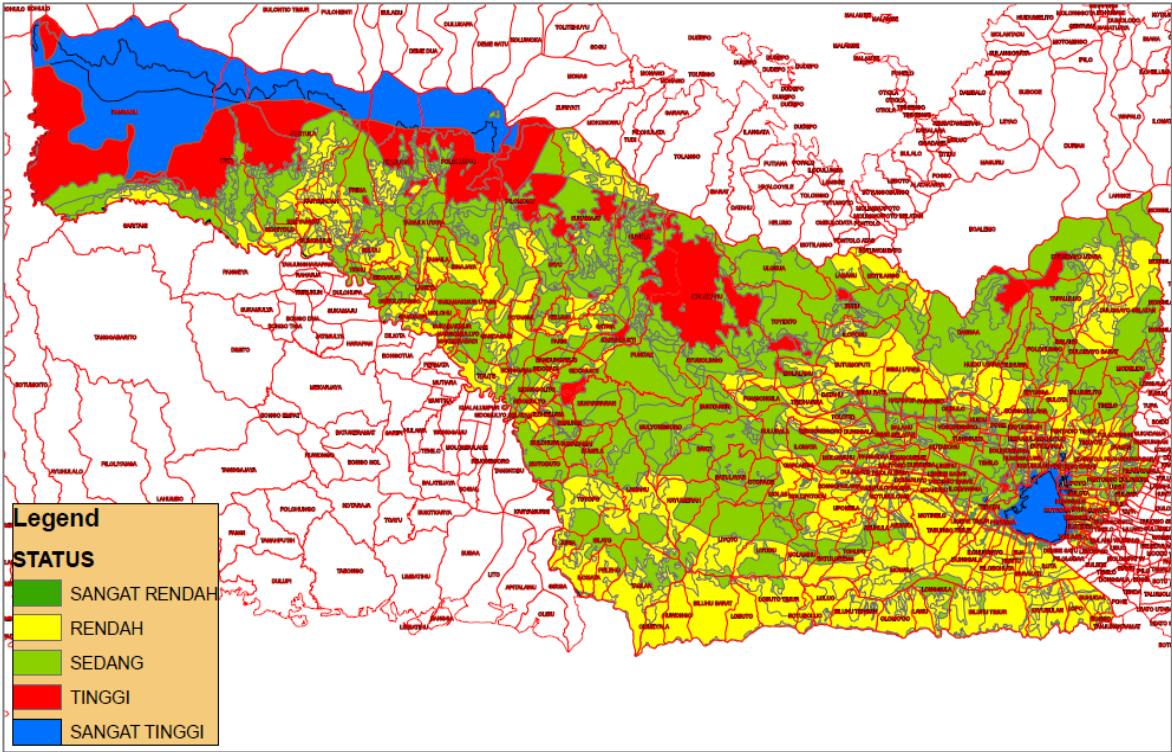
Tabel 38 menunjukkan bahwa terdapat 20.699,7 hektar atau 9,5% lahan dalam wilayah Kabupaten Gorontalo memberikan daya dukung tinggi dan sangat tinggi dalam jasa penyediaan pangan. Wilayah seluas 87.958,9 hektar atau 40,3% lahan Kabupaten Gorontalo yang memberikan jasa penyediaan pangan rendah dan sangat rendah. Sebaran per kecamatan pada **Gambar 15** menunjukkan wilayah dengan kategori sangat tinggi dan tinggi dalam jasa penyediaan pangan berada di Danau Limboto dan beberapa wilayah terutama di Kecamatan Asparaga, Boliyohuto, Mootilango, dan Tolangohula. Jasa penyediaan pangan rendah dan sangat rendah tersebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo, namun yang dominan pada setiap kecamatan adalah Batudaa, Batudaa Pantai, Bilato, Biluhu, Bongomeme, Dungaliyo, Tabongo, Telaga Jaya, Telaga, Telaga Biru, Tibawa, dan Tilango.



Gambar 33. Persentase Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Gorontalo(Pemda Kabupaten Gorontalo, 2020)

3.5.2 Jasa Lingkungan Penyediaan Air

Penyediaan air bersih adalah penyediaan air dari air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya) dan penyediaan air dari sumber air permukaan. Jasa lingkungan penyediaan air bersih di Kabupaten Gorontalo juga ditentukan oleh ekoregion dan tutupan lahannya. Peta daya dukung lingkungan Kabupaten Gorontalo dalam jasa lingkungan penyediaan air ditunjukkan pada **Gambar 34**.



Gambar 34. Peta Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan **Gambar 34** terlihat bahwa daya dukung lingkungan jasa penyediaan airKabupaten Gorontalo pada kategori tinggi dan sangat tinggi tersebar di Danau Limboto dan wilayah Kabupaten Gorontalo bagian Barat Laut. Wilayah Kabupaten Gorontalo yang masuk kategori tinggi dan sangat tinggi dalam jasa lingkungan penyediaan air tersebut adalah tutupan lahan

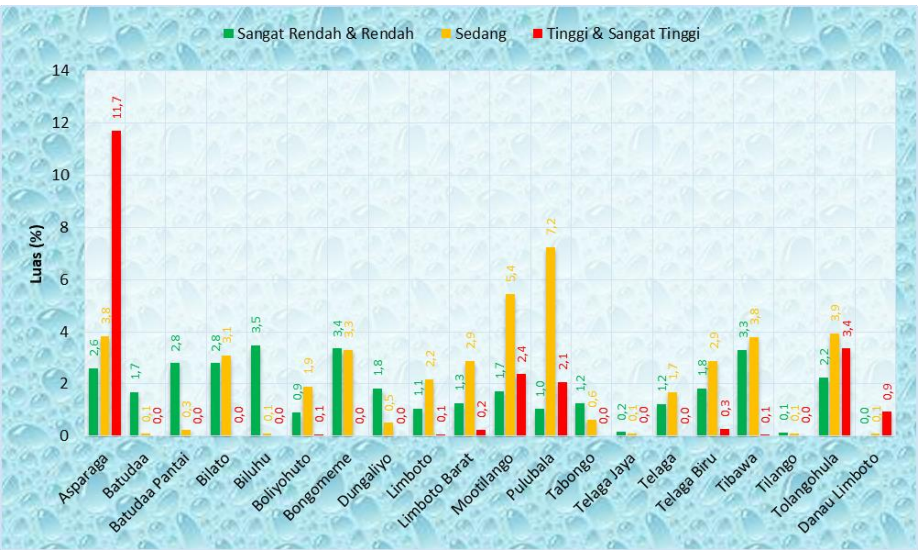
berupaDanau Limboto, hutan tanaman, dan hutan lahan kering primer. Secara ekoregion daerah ini berada pada ekoregion vegetasi terna tepian danau dan vegetasi hutan pegunungan bawah. Sedangkan luasan daya dukung lingkungan dalam jasa penyediaan air menurut kecamatan di Kabupaten Gorontalo ditunjukkan pada **Tabel 39** dan **Gambar 35**.

Tabel 39. Distribusi Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air

No.	Kecamatan	Sangat Rendah & Rendah		Sedang		Tinggi & Sangat Tinggi		Jumlah	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Asparaga	5.654,2	2,6	8.350,7	3,8	25.500,6	11,7	39.505,6	18,1
2	Batudaa	3.688,8	1,7	191,2	0,1	35,7	0,0	3.915,6	1,8
3	Batudaa Pantai	6.088,3	2,8	545,5	0,3	0,0	0,0	6.633,8	3,0
4	Bilato	6.097,9	2,8	6.726,5	3,1	53,0	0,0	12.877,4	5,9
5	Biluhu	7.559,9	3,5	214,4	0,1	0,0	0,0	7.774,3	3,6
6	Boliyohuto	1.991,4	0,9	4.118,2	1,9	139,1	0,1	6.248,8	2,9
7	Bongomeme	7.321,4	3,4	7.214,5	3,3	0,0	0,0	14.535,9	6,7
8	Dungaliyo	4.005,5	1,8	1.099,9	0,5	0,0	0,0	5.105,5	2,3
9	Limboto	2.306,7	1,1	4.767,4	2,2	171,3	0,1	7.245,4	3,3
10	Limboto Barat	2.783,6	1,3	6.310,3	2,9	521,1	0,2	9.615,0	4,4
11	Mootilango	3.762,0	1,7	11.854,2	5,4	5.167,5	2,4	20.783,7	9,5
12	Pulubala	2.255,1	1,0	15.808,5	7,2	4.500,7	2,1	22.564,3	10,3
13	Tabongo	2.709,6	1,2	1.384,5	0,6	32,1	0,0	4.126,2	1,9
14	Telaga Jaya	333,7	0,2	231,3	0,1	73,5	0,0	638,6	0,3
15	Telaga	2.693,7	1,2	3.693,1	1,7	21,9	0,0	6.408,8	2,9
16	Telaga Biru	4.003,2	1,8	6.288,1	2,9	626,6	0,3	10.917,9	5,0
17	Tibawa	7.187,7	3,3	8.278,6	3,8	113,7	0,1	15.579,9	7,1
18	Tilango	284,0	0,1	251,3	0,1	68,3	0,0	603,6	0,3
19	Tolangohula	4.903,3	2,2	8.608,9	3,9	7.311,4	3,4	20.823,6	9,5
	Danau Limboto	0,3	0,0	179,1	0,1	2.024,7	0,9	2.204,0	1,0
Jumlah		75.630,5	34,7	96.116,2	44,1	46.361,1	21,3	218.107,8	100,0

Sumber : BALITBANG Kabupaten Gorontalo, (2020)

Tabel 39 menunjukkan bahwa terdapat 46.361,1 hektar atau 21,3% lahan dalam wilayah Kabupaten Gorontalo memberikan daya dukung tinggi dan sangat tinggi dalam jasa penyediaan air. Kategori sedang seluas 96.116,2 hektar atau 44,1%, serta kategori rendah dan sangat rendah seluas 75.630,5 hektar atau 34,7%.



Gambar 35. Persentase Luas Daya Dukung Lingkungan dalam Jasa Penyediaan Air *Sumber : BALITBANG Kabupaten Gorontalo, (2020)*

Jika dilihat distribusinya per kecamatan (**Gambar 35**), kategori sangat tinggi dan tinggi dalam jasa penyediaan air terdapat di Danau Limboto, sebagian besar Kecamatan Asparaga, serta beberapa area di Kecamatan Limboto Barat, Mootilango, Pulubala, Telaga Biru, dan Tolangohula. jasa penyediaan air kategori rendah dan sangat rendah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo namun yang dominan yaitu Kecamatan Batudaa, Batudaa Pantai, Biluhu, Bongomeme, Dungaliyo, dan Tabongo.

3.5.3 Status Daya Dukung Pangan

Analisis daya dukung pangan Kabupaten Gorontalo dilakukan dengan menghitung selisih antara ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan. Data ketersediaan pangan digunakan yang digunakan dalam kajian ini adalah data produksi padi, ubi dan jagung tahun 2019 yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan. Dipilihnya tiga komoditi ini karena kedua komoditi ini merupakan bahan makanan pokok dan sumber karbohidrat masyarakat Gorontalo. Jumlah produksi padi, jagung dan ubi merupakan dasar perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Gorontalo Tahun 2019. Jenis bahan pangan yang yang beradal dari data produksi padi dan jagung yang memiliki satuan berat (gram) dikonversi menjadi satuan energi (kkal) untuk mendapatkan nilai energi bahan pangan. Analisis kebutuhan pangan dilakukan dengan menghitung kebutuhan penduduk pada setiap kecamatan. Kebutuhan penduduk pada setiap kecamatan dihitung berdasarkan distribusi jumlah penduduk

Hasi perhitungan status daya dukung pangan Kabupaten Gorontalo bertujuan untuk mengetahui apakah daya dukung pangan terlampaui atau belum terlampaui. Hasil perhitungan status daya dukung pangan juga bermanfaat untuk mengetahui jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan pangannya secara alamiah oleh karakteristik setiap kecamatan. Status daya dukung pangan indikatif setiap kecamatan ditunjukkan Pada Tabel 40.

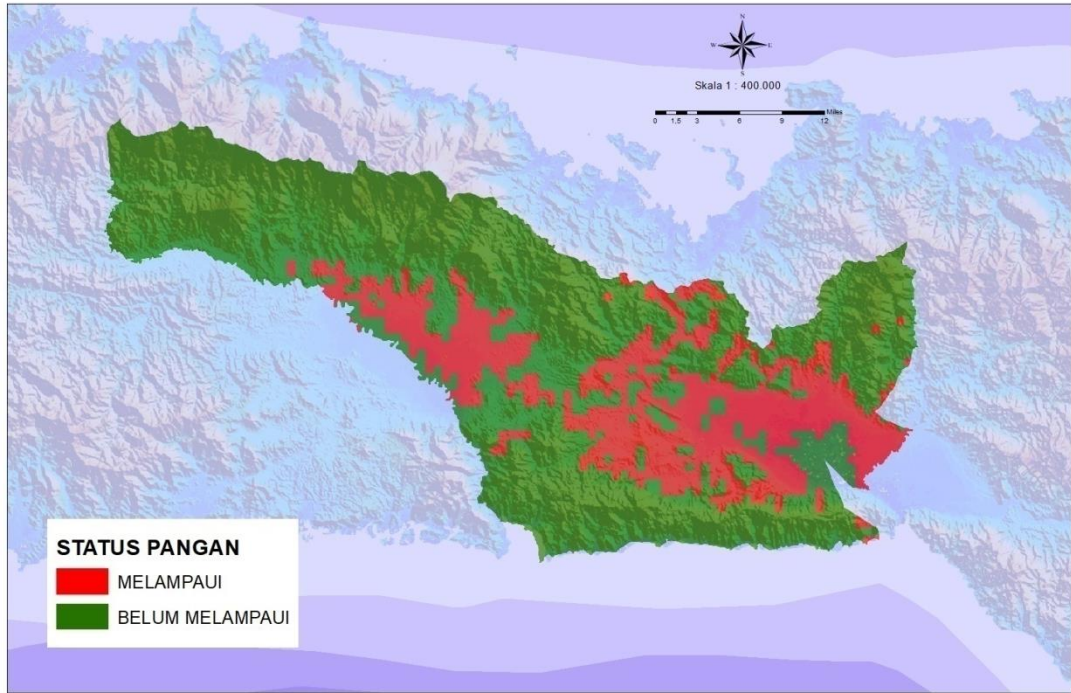
Tabel 40. Status Daya Dukung Pangan Indikatif Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal/tahun)	Kebutuhan pangan (kkal/tahun)	Selisih (kkal/tahun)	Jumlah Penduduk Saat ini	Keterangan
1	Batudaa Pantai	12,852,101,102	1,615,210,396	11,236,890,706	11.955	Belum Terlampaui
2	Biluhu	4,110,990,125	1,710,930,472	2,400,059,653	8.642	Belum Terlampaui
3	Batudaa	1,201,655,453	811,318,453	390,337,000	14.689	Belum Terlampaui
4	Bongomeme	77,543,772,526	25,534,787,781	52,008,984,745	42.041	Belum Terlampaui
5	Dungaliyo	13,135,247,003	5,491,561,138	7,643,685,865	12.062	Belum Terlampaui
6	Tibawa	44,453,216,653	45,716,216,439	(1,262,999,786)	30.412	Terlampaui
7	Pulubala	88,789,725,333	32,882,457,127	55,907,268,206	19.620	Belum Terlampaui
8	Boliyohuto	57,547,852,572	45,894,514,826	11,653,337,746	23.104	Belum Terlampaui
9	Mootilango	65,562,225,432	22,872,445,231	42,689,780,201	19.610	Belum Terlampaui
10	Tolangohula	55,600,221,162	36,235,937,841	19,364,283,321	25.244	Belum Terlampaui
11	Asparaga	103,122,765,145	29,987,431,891	73,135,333,254	25.406	Belum Terlampaui
12	Bilato	9,425,431,221	4,890,781,442	4,534,649,779	15.494	Belum Terlampaui
13	Limboto	5,487,296,561	6,871,390,671	(1,384,094,110)	18.801	Terlampaui
14	Limboto Barat	4,026,285,342	5,109,871,552	(1,083,586,210)	8621	Terlampaui
15	Telaga	3,888,435,628	4,112,734,135	(224,298,507)	13.425	Terlampaui
16	Telaga Biru	6,128,734,533	5,981,445,441	147,289,092	12.525	Belum Terlampaui
17	Tilango	994,508,652	887,811,269	106,697,383	9873	Belum Terlampaui
18	Telaga Jaya	886,508,652	711,867,941	174,640,711	17.463	Belum Terlampaui
JUMLAH		554.756.973.095	277.318.714.046	277.438.259.049	328.987	

Sumber : BALITBANG Kabupaten Gorontalo, (2020)

Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Gorontalo “Belum Melampaui” dengan total potensi ketersediaan energi pangan (alami) sebesar 554.756.973.095 Kkal, mampu mendukung kebutuhan energi pangan sebesar 706.508 jiwa (ambang batas) populasi penduduk, sementara jumlah penduduk eksisting Kabupaten Gorontalo hanya sebesar 328.987 jiwa, sehingga masih mampu memenuhi kebutuhan penduduk sebesar 377.521 jiwa. Berdasarkan Tabel 40, terdapat 4 kecamatan yang telah melampaui kapasitas daya dukung untuk penyedia pangan yaitu Kecamatan Tibawa, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Limboto dan Kecamatan Telaga.

Wilayah yang melampaui daya dukung seluas 60.131 Ha atau 26,06% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Gorontalo, dan memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi yaitu + 61,50% dari jumlah keseluruhan penduduk eksisting. Kepadatan penduduk yang tinggi mempengaruhi kegiatan pertanian sebagai penyedia pangan, dimana kegiatan pertanian membutuhkan lahan yang cukup luas. tidak memungkinkan adanya kegiatan pertanian di daerah kecuali dengan menggunakan teknologi.



Gambar 36. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan di Kabupaten Gorontalo

Sumber : BALITBANG Kabupaten Gorontalo, (2020)

3.6 Sumber Daya Alam

Meningkatnya penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dalam jangka panjang penurunan kualitas lingkungan ini akan berdampak pada inefisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan dengan adanya memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di Kabupaten Gorontalo dalam mendukung kegiatan pembangunan. Potensi pertambangan di Kabupaten Gorontalo antara lain:

- Mineral logam: emas dan tembaga
- Mineral non logam: batu gamping, lempung, batu apung,
- Batuan: tras, sirtu dan granit.

Adapun sumber daya alam lokal yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan antara lain:

- Batu gamping terdapat di Kecamatan Batudaa dan Kecamatan Tibawa
- Granit terdapat di Kecamatan Batudaa
- Lempung terdapat di Kecamatan Tibawa dan Limboto
- Sirtu terdapat di Kecamatan Telaga, Batudaa, Limboto

3.7 Perubahan Iklim

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh terjadinya pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Terminologi gas rumah kaca diartikan sebagai gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun dari kegiatan manusia (antropogenik), yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Sebagian radiasi matahari dalam bentuk gelombang pendek yang diterima permukaan bumi dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang (radiasi infra merah). Radiasi gelombang panjang yang dipancarkan ini oleh GRK yang ada pada lapisan atmosfer bawah, dekat dengan permukaan bumi, akan diserap dan menimbulkan efek panas, yang dikenal sebagai Efek Rumah Kaca (KLH, 2012).

GRK merupakan salah satu parameter dalam memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan menyebabkan terjadinya emisi GRK melalui aktivitas penggunaan bahan bakar fosil, aktivitas proses produksi industri, aktivitas pertanian, peternakan, kehutanan, dan perubahan lahan, serta produksi limbah padat dan cair.

3.8 Keanekaragaman Hayati

Seiring semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan sumber daya alam hayati yang berakibat pada menurunnya sumber daya alam hayati tersebut apabila tidak dikelola secara lestari atau dikenal dengan degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu tuntutan terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati secara berkelanjutan menjadi prioritas. Mengingat kebutuhan akan sumber daya alam hayati sangat tergantung pada kondisi suatu wilayah maka dalam pelaksanaan pengelolaannya diperlukan pemahaman terhadap nilai keanekaragaman hayati sebagai sumberdaya alam hayati sesuai dengan wilayahnya. Nilai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan potensi sumberdaya alam yang wajib untuk dijaga kelestariannya agar tidak mengalami kerusakan. Kerusakan keanekaragaman hayati akan berakibat hilang atau timpangnya sebuah ekosistem lingkungan sehingga dapat menurunkan keanekaragaman hayati, menurunkan jenis dan jumlah flora dan fauna yang ada.

Di Kabupaten Gorontalo terdapat Cagar Alam Tangale dan sebagian wilayah Suaka Margasatwa Nantu. SM Nantu merupakan zona transisi dan campuran antara fauna Asia dan Australia. Di Nantu ini hidup secara baik satwa

endemic seperti Anoa (*Bubalus Depressicornis*), Babi rusa (*Babyrousa celebensis*), Kera Hitam Sulawesi (*Macaca nigrescen*, *Macaca nigra*), Tarsius (*Tarsius pumilus*). (IKPLH Provinsi Gorontalo, 2018).

Pembangunan dan pengembangan jalan yang melintas di sekitar Cagar Alam Tangale akan membuka akses terhadap lokasi tersebut. Hal ini akan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap biodiversitasnya.

Di sekitar perairan Danau Limboto terdapat burung migran yaitu burung Gagang Bayam Timur, Tikusan Alis Putih, Kedidil Golgol (*Curlew Sandpiper*). Gagang-bayam timur yang lalu lalang di perairan dangkal itu berdasarkan situs Kutilang, persebaran dan ras-nya mulai dari Eropa sampai Afrika sub-Sahara dan Madagaskar ke timur sampai Asia Tengah, India, Tiongkok, Indochina dan Taiwan. Di Indonesia secara lokal berbiak di Sumatera bagian utara, burung dewasa tercatat bergerak sampai Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat. Untuk tempat hidup dan kebiasaan, burung ini menunjungi lahan basah yang dangkal terutama yang berair tawar seperti rawa, danau tepian sungai, sawah dan tambak, juga delta dan muara sungai. Burung karnivor dengan makanan yang bervariasi terutama inverteberata perairan kecil dan biji-bijian. Jenis pakan mengikuti ketersediaan musiman dan perpindahan jenis habitat. Sementara tikusan alis-putih, masih menurut website yang sama, memiliki ukuran agak kecil sekitar 20 cm, berparuh pendek. Tubuh coklat keabu-abuan. Terdapat pola strip putih pada bagian atas kepala yang terlihat jelas dan dibawah garis mata yang hitam. Mahkota, punggung, dan dada abu-abu; sayap dan ekor coklat keabu-abuan.

Penyebaran dan ras burung ini adalah semenanjung Malaysia, Filipina, dan Sunda besar, sampai Papua, dan Australia. Burung ini tergolong pemalu, menghuni daerah padang rumput yang tergenang, paya-paya, dan sawah. Hidup berpasangan. Burung ini tersebar luas di daerah dataran rendah di Sumatra (sampai ketinggian 1.200 meter), Kalimantan, dan Jawa. Burung migran ini berada di Danau Limboto mulai Agustus hingga Oktober. Puncaknya di akhir Agustus hingga September. (Paino, 2016)



BAB IV ANALISIS PENCAPAIAN TPB

BAB IV. CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1 Indikator yang Telah Mencapai Target

Pilar Sosial

Hasil evaluasi pencapaian TPB di Kabupaten Gorontalo diperoleh 65 indikator (29,55%) indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Hasil evaluasi capaian TPB untuk target sosial menunjukkan bahwa 27 indikator (28%) telah dilaksanakan dan mencapai target nasional.

Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 41.

Tabel 41. Indikator pilar sosial yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	Tahun 2016: 33,26% Tahun 2017: 58,23% Tahun 2018: 64,14% Tahun 2019: 73,01% Tahun 2020: 97,08% Target 2026:100% Target Nasional 2030: 17,12%	Tahun 2021 alokasi anggaran untuk pencapaian target 100% Rp. 8.292.231.514.	- Pemberian bantuan jaminan social kepada penyandang disabilitas yang miskin - Program rehabilitasi penyandang disfungsi sosial	BAZDA: Memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang miskin
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: 85,95% Tahun 2020: - Target 2026:100% Target Nasional 2019: 70%		Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas.	Rumah sakit/klinik bersalin swasta: Menyediakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan
		1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: 62% Tahun 2019: 76% Tahun 2020: - Target 2026:100% Target Nasional 2019: 63%		Menggalakkan Pos Yandu	Rumah sakit/klinik bersalin swasta: Menyediakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan
		1.4.1 (c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: 70% Tahun 2020: - Target 2026:100% Target Nasional 2019:	Tahun 2021 alokasi anggaran untuk pencapaian target Rp. 10.093.671.577	- Program pengendalian penduduk - Program pembinaan KB -	Rumah sakit/klinik bersalin swasta: Menyediakan fasilitas kesehatan untuk melahirkan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
					65%			
		1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Tahun 2016: - Tahun 2017: 96,14 Tahun 2018: 97,14 Tahun 2019: 97,19 Tahun 2020: - Target 2026:100% Target Nasional 2019: 94,78%			Swasta
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPDB	Tahun 2016: - Tahun 2017: Tahun 2018: Tahun 2019: Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam Perpres		Program penanggulangan bencana	Swasta BMKG Polres Gorontalo
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: Tahun 2018: 2,06 Tahun 2019: 14,68 Tahun 2020: 8,55 Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun 28%			Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan
		2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 20,7% Tahun 2017: 49% Tahun 2018: 54% Tahun 2019: 71% Tahun 2020: Target 2026: 100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
					Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 50%			
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Pertanian, Badan Keuangan	Tahun 2016: 1625 Tahun 2017: 1616 Tahun 2018: 1501 Tahun 2019: 1570 Tahun 2020: 1761 Target 2026: Target Nasional 2030: Meningkatkan			Swasta
3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 257,2 Tahun 2017: 130,2 Tahun 2018: 98,4 Tahun 2019: 81,3 Tahun 2020: 267,5 Target 2026: Target Nasional 2030: Menurun menjadi 306		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan
		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 84,01% Tahun 2017: 89,67% Tahun 2018: 91,49% Tahun 2019: 100%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
			ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		Tahun 2020: 100% Target 2026: 100% Target Nasional 2019: Menurun menjadi 95%		Upaya Kesehatan Masyarakat	
		3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 99,37% Tahun 2017: 99,59% Tahun 2018: 99,78% Tahun 2019: 99,95% Tahun 2020: 99,85% Target 2026: 100% Target Nasional 2019: Menurun menjadi 85%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 99,37% Tahun 2017: 99,59% Tahun 2018: 99,78% Tahun 2019: 99,95% Tahun 2020: 99,85% Target 2026: 100% Target Nasional 2019: Menurun menjadi 85%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 0,02% Tahun 2017: 0,56% Tahun 2018: 0% Tahun 2019: 0% Tahun 2020: 0,02% Target 2026: 0% Target Nasional 2019: Lebih kecil dari 0,5%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 0,02% Tahun 2017: 0,56% Tahun 2018: 0% Tahun 2019: 0% Tahun 2020: 0,02% Target 2026: 0% Target Nasional 2019: Lebih kecil dari 0,5%		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Puskesmas Klinik kesehatan
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	"Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Tahun 2016: Tahun 2017: Tahun 2018: Tahun 2019: 100 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: -			
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: -100% Tahun 2020: - Target 2026: - Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 66%			
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: 100 Tahun 2020: - Target 2026: - Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 23,5%			
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Tahun 2016: 2,36% Tahun 2017: 2,31%			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
					Tahun 2018: 2,31% Tahun 2019: 2,25% Tahun 2020: 2,22% Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun menjadi 2,28%			
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Kesehatan, BNK	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: 30,36% Tahun 2019: 22,45% Tahun 2020: - Target 2026: - Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; di (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; 4) Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan	Tahun 2016: Tahun 2017: 95,98% : 76,64% Tahun 2018: 96,68% : 81,32% Tahun 2019: 97,04% : 82,08% Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan			
4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	Tahun 2016: - Tahun 2017: 96,86% Tahun 2018: 99,93% Tahun 2019: 96,67% Tahun 2020: Target 2026:			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	kemampuan literasi dan numerasi.				Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 96,1%			
		4.6.1(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan	Tahun 2016: - Tahun 2017: 99,86% Tahun 2018: 99,85% Tahun 2019: 99,87% Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan			
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tahun 2016: 75% Tahun 2017: 75% Tahun 2018: 41% Tahun 2019: 100% Tahun 2020: 79% Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 70%			POLRES Gorontalo Menjamin keamanan dan kenyamanan terhadap kekerasan perempuan dan anak
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Badan Kepegawaian dan DIKLAT	Tahun 2016: 20% Tahun 2017: 20% Tahun 2018: 7% Tahun 2019: 17,14% Tahun 2020: 21% Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan			
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Badan Kepegawaian dan DIKLAT	Tahun 2016: 17% Tahun 2017: 15% Tahun 2018: 17% Tahun 2019: 14% Tahun 2020: 16% Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan			
5.6	Menjamin akses universal terhadap	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Tahun 2016: 7,2% Tahun 2017: 7,56%			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.		Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		Tahun 2018: 7,42% Tahun 2019: 7,28% Tahun 2020: 9,16% Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun menjadi 9,9%			

Sumber: hasil evaluasi TPB, 2021

Pilar Ekonomi

Indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional pada pilar ekonomi sejumlah 17 indikator (34%). Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 42.

Tabel 42. Indikator pada pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas KUKM, Dinas Perindustri dan Perdagangan	Tahun 2016: 5,93% Tahun 2017: 6,21% Tahun 2018: 5,63% Tahun 2019: 5,82% Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahun 2016: 61,36% Tahun 2017: 54,93% Tahun 2018: 85,42% Tahun 2019: 68,66% Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: 51%			
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: 6% Tahun 2019: 7% Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Tdak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.		Tahun 2016: Rp. 1.875.000 Tahun 2017: Rp. 2.038.000 Tahun 2018: Rp. 2.206.813 Tahun 2019: Rp. 2.384.000 Tahun 2020: Rp. 2.788.826 Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		Tahun 2016: 3,62% Tahun 2017: 3,54% Tahun 2018: 3,27% Tahun 2019: 3,21% Tahun 2020:			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
					Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tahun 2016: 115.528 Tahun 2017: 244.336 Tahun 2018: 350.784 Tahun 2019: 471.208 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2030: Meningkat	Rp. 3.466.212.984	- Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata: Pentadio Resort, Pendaratan Soekarno - Program pemasaran pariwisata	Swasta
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri		Tahun 2016: Rp. 1.875.000 Tahun 2017: Rp. 2.038.000 Tahun 2018: Rp. 2.206.813 Tahun 2019: Rp. 2.384.000 Tahun 2020: Rp. 2.788.826 Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
9.5	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.		Tahun 2016: 3,62% Tahun 2017: 3,54% Tahun 2018: 3,27% Tahun 2019: 3,21% Tahun 2020: Target 2026:			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.				Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.		Tahun 2016: - Tahun 2017: 4,58% Tahun 2018: 5,48% Tahun 2019: 5,58% Tahun 2020: 5,68% Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			PT. Telkom
		9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam		Tahun 2016: - Tahun 2017: 18,18% Tahun 2018: 19,09% Tahun 2019: 20% Tahun 2020: 21% Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
		9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet		Tahun 2016: - Tahun 2017: 0,35% Tahun 2018: 0,38% Tahun 2019: 0,41% Tahun 2020: 0,42% Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.		Tahun 2016: - Tahun 2017: 4,58% Tahun 2018: 5,48% Tahun 2019: 5,58% Tahun 2020: 5,68% Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
		10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.		Tahun 2016: - Tahun 2017: 18,18% Tahun 2018: 19,09% Tahun 2019: 20% Tahun 2020: 21% Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan	10.3.1(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		Tahun 2016: - Tahun 2017: 0,35% Tahun 2018: 0,38% Tahun 2019: 0,41% Tahun 2020: 0,42% Target 2026:			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.				Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		Tahun 2016: 77,19% Tahun 2017: 63,4% Tahun 2018: 79,87% Tahun 2019: 90,07% Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi TK Formal 62,4 Juta dan TK Informal 3,5 Juta			
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Tahun 2016: Ada Tahun 2017: Ada Tahun 2018: Ada Tahun 2019: Ada Tahun 2020: Ada Target 2026: Target Nasional 2019:			
		17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.		Tahun 2016: 5302 Tahun 2017: 8287 Tahun 2018: 7779 Tahun 2019: 11268 Tahun 2020: 11222 Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada lampiran dalam Perpres 59/2017			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

Pilar Lingkungan Hidup

Indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup berjumlah 9 indikator (21,4%). Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 43.

Tabel 43. Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: Ada Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 438 Kabupaten			
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas LH dan SDA	Tahun 2016: - Tahun 2017: Ada Tahun 2018: Ada Tahun 2019: Ada Tahun 2020: Ada Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkat menjadi 409 Kabupaten /Kota			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2 (a)	Kualitas air danau.		Tahun 2016: - Tahun 2017: Baik Tahun 2018: Baik Tahun 2019: Semar Sedang Tahun 2020: Baik Target 2026: Target Nasional 2019: Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.			
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Tahun 2016: Tahun 2017: Tahun 2018: Tahun 2019: Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada lampiran Perpres 59/2017			
		11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	Tahun 2016: 146,4 Tahun 2017: 146,4 Tahun 2018: 114,92 Tahun 2019: 114,92 Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun menjadi 30%			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Tahun 2016: - Tahun 2017: Ada Tahun 2018: Ada Tahun 2019: Ada Tahun 2020: Ada Target 2026: Target Nasional 2019: Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.			Badan Meteorologi dan Klimatologi
		11.5.2(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Tahun 2016: - Tahun 2017: 0,006359745 Tahun 2018: 0,002954503 Tahun 2019: 0.004227283 Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Tahun 2016: Tahun 2017: Tahun 2018: Tahun 2019: Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam Perpres 59/2017			
15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas LH dan SDA	Tahun 2016: 26% Tahun 2017: 26% Tahun 2018: 26% Tahun 2019: 27% Tahun 2020: -			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.				Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator yang telah mencapai target pada pilar hokum berjumlah 11 indikator (52,4%). Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola ditunjukkan pada Tabel 44.

Tabel 44. Indikator yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		Tahun 2016: 3 Tahun 2017: 4 Tahun 2018: 4 Tahun 2019: 2 Tahun 2020: 1 Target 2026: Target Nasional 2019:			Polres Gorontalo

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
		16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		Tahun 2016: 0 Tahun 2017: 0 Tahun 2018: 0 Tahun 2019: 0 Tahun 2020: 0 Target 2026: Target Nasional 2019:			Polres Gorontalo
		16.1.3(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		Tahun 2016: 0.014 Tahun 2017: 0.009 Tahun 2018: 0.01 Tahun 2019: 0.006 Tahun 2020: 0.012 Target 2026: Target Nasional 2019:			Polres Gorontalo
16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		Tahun 2016: 0 Tahun 2017: 0 Tahun 2018: 0 Tahun 2019: 0 Tahun 2020: 0 Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam Perpres			
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Keuangan	Tahun 2016: 100 Tahun 2017: 100 Tahun 2018: 100 Tahun 2019: 100 Tahun 2020: 100 Target 2026: Target Nasional 2019: Kabupaten 60%			
		16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas	BAPPEDA	Tahun 2016: - Tahun 2017: 60,78 Tahun 2018: 78,78			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
			Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Tahun 2019: 88,46 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Kabupaten 50%			
		16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		Tahun 2016: - Tahun 2017: 48,89 Tahun 2018: 58,58 Tahun 2019: 61,05 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Kabupaten 45%			
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian dan DIKLAT	Tahun 2016: 17,65% Tahun 2017: 15,79 Tahun 2018: 17,14 Tahun 2019: 14,29 Tahun 2020: 16,67 Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan			
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Capil	Tahun 2016: 0,3 Tahun 2017: 0,32 Tahun 2018: 0,36 Tahun 2019: 0,36 Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Capil	Tahun 2016: 45.2% Tahun 2017: 50.8% Tahun 2018: 55.8% Tahun 2019: 59.1% Tahun 2020: 94.68% Target 2026:			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
					Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 85%			
16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		Tahun 2016: Tidak ada Tahun 2017: Tidak ada Tahun 2018: Tidak ada Tahun 2019: Tidak ada Tahun 2020: Tidak ada Target 2026: Target Nasional 2019:			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

4.2 Indikator yang Belum Mencapai Target

Pilar Sosial

Indikator yang belum mencapai target pada Pilar social berjumlah 30 indikator (31%). Indikator-indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 45.

Tabel 45. Indikator-indikator pilar social yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	9.56%	Dinas Sosial	Tahun 2016: 21.03% Tahun 2017: 20.55% Tahun 2018: 19.84% Tahun 2019: 18.06% Tahun 2020: 17.56% Target 2026:			Bazda Perbankan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.					Target Nasional 2019: Menurun menjadi 7-8%			
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	12.2%	Dinas Sosial	Tahun 2016: - Tahun 2017: 96% Tahun 2018: 99% Tahun 2019: 95.2% Tahun 2020: 82.8% Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 95%			
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain,	1.4.1(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	22.33%	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tahun 2016: 82.7% Tahun 2017: 84.09% Tahun 2018: 85.04% Tahun 2019: 77.67% Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 100%			
		1.4.1 (h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	17.48	Dinas Pendidikan	Tahun 2016: - Tahun 2017: 66,66% Tahun 2018: 63,31% Tahun 2019: 64,72%			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 82,2%			
		1.4.1 (j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahundengan kepemilikan akta kelahiran.	5.32	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tahun 2016: 45.2% Tahun 2017: 50.8% Tahun 2018: 55.8% Tahun 2019: 59.1% Tahun 2020: 94.68% Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 100%			
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1 (a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	159 Desa	BPBD	Tahun 2016: 3 Tahun 2017: 4 Tahun 2018: 39 Tahun 2019: 32 Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 39			
		1.5.3*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.	Meningkat	BPBD	Tahun 2016: - Tahun 2017: 0.006359745 Tahun 2018: 0.002954503 Tahun 2019: 0.004227283 Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
						dalam lampiran Perpres 59/2017			
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Menurun	Badan Keuangan Dinas Sosial	Tahun 2016: - Tahun 2017: 11,19 Tahun 2018: 11,19 Tahun 2019: 0,19 Tahun 2020: 0,19 Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 2,6% Tahun 2017: 1,30% Tahun 2018: 2,8% Tahun 2019: 3,7% Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 2% Tahun 2017: 1,6% Tahun 2018: 2% Tahun 2019: 3,1% Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 14.5% Tahun 2017: 8% Tahun 2018: 4.6% Tahun 2019: 6.9% Tahun 2020: 8% Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: 4,4 Tahun 2018: 5,4 Tahun 2019: 4,6 Tahun 2020: 5,6 Target 2026: Target Nasional: Menurun			
		3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	18.97%	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: 62.24% Tahun 2019: 76.03% Tahun 2020: -			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
						Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 95%			
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 144.39 Tahun 2017: 2.79 Tahun 2018: 343.90 Tahun 2019: 374.83 Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun 245			
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Meningkat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: 0.01% Tahun 2019: 0.037% Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
		3.3.4(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	17 Kecamatan	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: 2 Tahun 2019: 2 Tahun 2020: 2 Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	-29.06	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: 39.47% Tahun 2019: 34.46% Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun menjadi 5.4%			
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	10%	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 24.77% Tahun 2017: 24.28% Tahun 2018: 23.79% Tahun 2019: 23.38% Tahun 2020: 34.1% Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun menjadi 24.3%			
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Meningat	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 0.0031 Tahun 2017: 0.0086 Tahun 2018: 0.002 Tahun 2019: 0.0055 Tahun 2020: 0.0082 Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun menjadi 0.02%			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 58.63 Tahun 2017: 58.63 Tahun 2018: 55.13 Tahun 2019: 49.89 Tahun 2020: 40.3 Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun menjadi 38			
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Meningkat	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Tahun 2016: 7.2 Tahun 2017: 7.56 Tahun 2018: 7.42 Tahun 2019: 7.28 Tahun 2020: 9.16 Target 2026: Target Nasional 2019:			
		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Menurun	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 96 Tahun 2017: 99 Tahun 2018: 95.2 Tahun 2019: 31.2 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi minimal 95%			BPJS
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Menurun	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 96% Tahun 2017: 99% Tahun 2018: 95,2% Tahun 2019: 31,2%			BPJS

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
						Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: 95%			
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Rendah	Dinas Kesehatan	Tahun 2016: 7.2 Tahun 2017: 7.56 Tahun 2018: 7.42 Tahun 2019: 7.28 Tahun 2020: 9.16 Target 2026: Target Nasional 2019:			
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	40,95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016: 96 Tahun 2017: 99 Tahun 2018: 95.2 Tahun 2019: 31.2 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi minimal 95%			
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	1.19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016: 105,86 Tahun 2017: 109,7 Tahun 2018:108,45 Tahun 2019: 112,9 Tahun 2020: Target 2026:			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
						Target Nasional 2019: 114,09%			
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	30.16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016: 81.14% Tahun 2017: 82.15% Tahun 2018: 81.1% Tahun 2019: 76.78% Tahun 2020: - Target 2026: - Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 106,94%			
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016: - Tahun 2017: 6.81% Tahun 2018: 6.83% Tahun 2019: - Tahun 2020: - Target 2026: - Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 8,8 tahun			
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	14.20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun 2016: - Tahun 2017: 62% Tahun 2018: 70% Tahun 2019: 63% Tahun 2020: - Target 2026: - Target Nasional 2019: Meningkatkan menjadi 77,2%			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	menempuh pendidikan dasar.								
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Belum ada	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Tahun 2016: 0 Tahun 2017: 0 Tahun 2018: 0 Tahun 2019: 0 Tahun 2020: 0 Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada lampiran dalam Perpres 59/2017			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

Pilar Ekonomi

Indikator pada pilar ekonomi yang belum mencapai target berjumlah 10 indikator (20%). Indikator TPB pada pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 46

Tabel 46. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1(a)	PDB per kapita	Belum mencapai lebih dari 50 juta	Badan Keuangan	Tahun 2016: Tahun 2017: 29,03 Tahun 2018: 31,39 Tahun 2019: 34,04 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan lebih dari 50 juta			Swasta
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Menurun	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata	Tahun 2016: 283 Tahun 2017: 482 Tahun 2018: 714 Tahun 2019: 870 Tahun 2020: 98 Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan			
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Menurun	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi	Tahun 2016: Tahun 2017: Tahun 2018: Tahun 2019: 17,09 Tahun 2020: 14,53 Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	-10.06	Dinas Sosial	Tahun 2016:21,03 Tahun 2017: 20,55 Tahun 2018: 19,84 Tahun 2019: 18,06 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Menurun menjadi 7 – 8%			
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Menurun	Badan Keuangan	Tahun 2016: 1.25% Tahun 2017: 1.74% Tahun 2018: 1.25% Tahun 2019: 1.21% Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			
		17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Dibawah 12%	Badan Keuangan	Tahun 2016: 0.17% Tahun 2017: 0.2% Tahun 2018: 0.23% Tahun 2019: 0.24% Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Di atas 12%			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
		17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Menurun	Badan Keuangan	Tahun 2016: 11.92% Tahun 2017: 18.05% Tahun 2018: 12.22% Tahun 2019: 12.4% Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019:			
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PTD), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Tetap	Dinas Komunikasi dan informatika	Tahun 2016: - Tahun 2017: 4.88% Tahun 2018: 5.48% Tahun 2019: 5.48% Tahun 2020: 5.68% Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.			PT Telkom
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Tetap	Dinas Telekomunikasi dan Informatika	Tahun 2016: - Tahun 2017: 35% Tahun 2018: 38% Tahun 2019: 42%			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.					Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkat			
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	10%	Badan Pusat Statistik	Tahun 2016: - Tahun 2017: 97,22 Tahun 2018: 100 Tahun 2019: 90 Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: tidak ada dalam perpres			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

Pilar Lingkungan

Indikator pada pilar lingkungan yang belum mencapai target nasional berjumlah 11 indikator (26,2%). Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 47.

Tabel 47. Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional pada pilar lingkungan hidup

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	17,3%	PDAM Dinas PUPR	Tahun 2016: 82,79% Tahun 2017: NA Tahun 2018: NA Tahun 2019: NA Tahun 2020: NA Target 2026: Target Nasional 2019: meningkat 100%			
		6.1.1(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	118,3 m ³ /detik	PDAM Dinas PUPR	Tahun 2016: 290,5 liter/detik Tahun 2017: 290,5 liter/detik Tahun 2018: 290,5 liter/detik Tahun 2019: 290,5 liter/detik Tahun 2020: 290,5 liter/detik Target 2026: Target Nasional 2019: 118,6 m ³ /detik			
		6.1.1(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan	62,8 %	PDAM Dinas PUPR	Tahun 2016: 60,79			

			sumber air minum aman dan berkelanjutan.			Tahun 2017: 44,7 Tahun 2018: 46,52 Tahun 2019: 39,24 Tahun 2020: 37,32 Target 2026: Target Nasional 2019: 70%			
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	35%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2016: 38,7 Tahun 2017: 42 Tahun 2018: 46 Tahun 2019: 48 Tahun 2020: 65 Target 2026: Target Nasional 2019: -			
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	18.58%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2016: 68,37 Tahun 2017: 73,27 Tahun 2018: 76,35 Tahun 2019: 78,27 Tahun 2020: 81,42 Target 2026: Target Nasional 2019: 100%			
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	45 desa	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2016: 128 Tahun 2017: 130 Tahun 2018: 145 Tahun 2019: 158			

						Tahun 2020: 160 Target 2026: Target Nasional 2019:			
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	182 desa	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2016: 2 Tahun 2017: 22 Tahun 2018: 22 Tahun 2019: 28 Tahun 2020: 23 Target 2026: Target Nasional 2019:			
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Cemar ringan	Dinas LH dan SDA	Tahun 2016: baik Tahun 2017: cemar ringan Tahun 2018: cemar ringan Tahun 2019: cemar ringan Tahun 2020: cemar ringan Target 2026: Target Nasional 2019: Baik			
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1 (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	66,6%	Dinas LH dan SDA	Tahun 2016: - Tahun 2017: Tahun 2018: Tahun 2019: 13,53 Tahun 2020: 13,4 Target 2026: Target Nasional 2019: 46			

12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	66,6 %/tahun	Dinas LH dan SDA	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: 875,8 Tahun 2020: 437,79 Target 2026: - Target Nasional 2019: 20 ton/hari			
15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	<1%	Dinas LH dan SDA	Tahun 2016: 0,17 ha Tahun 2017: 0,2 ha Tahun 2018: 0,1 ha Tahun 2019: 0,1 ha Tahun 2020: 0,4 Ha Target 2026: - Target Nasional 2019: 5,5 juta ha			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2020

Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator yang belum mencapai target pada pilar hokum dan tata kelola pemerintahan berjumlah 5 indikator (23,8%). Indikator yang sudah dilaknsanakan tapi belum mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola ditunjukkan pada Tabel 48.

Tabel 48. Indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1(c)	Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.	Menurun					
		16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Menurun	Badan Keuangan	Tahun 2016: 93,38 Tahun 2017: 87,87 Tahun 2018: 93,77 Tahun 2019: 93,22 Tahun 2020: 92,03 Target 2026: Target: Meningkat			
		16.6.2 (a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Menurun		Tahun 2016: 22,94 Tahun 2017: 73,17 Tahun 2018: 69,52 Tahun 2019: 69,52 Tahun 2020: - Target 2026: Target: Meningkat			
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif,	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan	Tetap		Tahun 2016: 23%			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	GAP	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.		Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).			Tahun 2017: 23% Tahun 2018: 23% Tahun 2019: 23% Tahun 2020: 17% Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan			
16.10	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Tetap	Badan Kepegawaian, DIKLAT	Tahun 2016: - Tahun 2017: 63 Tahun 2018: 63 Tahun 2019: 63 Tahun 2020: 63 Target 2026: Target Nasional 2019: Meningkatkan			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

4.3 Indikator yang Belum Dilaksanakan

Pilar Sosial

Indikator pilar social yang belum dilaksanakan berjumlah 1 indikator (1%). Indikator TPB pada pilar sosial yang belum dilaksanakan ditunjukkan pada Tabel 49.

Tabel 49. Indikator TPB pada pilar sosial yang belum dilaksanakan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	Belum ada		Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas.	

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

Pilar Ekonomi

Jumlah indicator yang belum dilaksanakan pada pilar ekonomi adalah 7 indikator (14%). Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum dilaksanakan ditunjukkan pada Tabel 50.

Tabel 50. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum dilaksanakan

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	-	-	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	-	-	-	-	-
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	-	-	-	-	-
		9.1.1(c)	Panjang jalur kereta api.	-	-	-	-	-
		9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	-	-	-	-	-
		9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	-	-	-	-	-

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-

Pilar Lingkungan Hidup

Indikator yang belum dilaksanakan pada pilar lingkungan adalah 7 indikator (16,7%). Indikator yang belum dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Tabel 51.

Tabel 51. Indikator yang belum dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah	6.3.1(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2016: - Tahun 2017: - Tahun 2018: - Tahun 2019: Belum beroperasi Tahun 2020: - Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tahun 2016: Tahun 2017: Tahun 2018: Tahun 2019: Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: 12 kawasan perkotaan metropolitan (Skala Nasional)			
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).		Tahun 2016: Tahun 2017: Tahun 2018: Tahun 2019: Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019: 5 metropolitan (Skala Nasional)			
		11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		Tahun 2016: Tahun 2017: Tahun 2018: Tahun 2019: Tahun 2020: Target 2026: Target Nasional 2019:			
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan		Tahun 2016: 0 Tahun 2017: 0			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	budaya dunia dan warisan alam dunia.		perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.		Tahun 2018: 0 Tahun 2019: 0 Tahun 2020: 0 Target 2026: Target Nasional 2019: Ada			
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Tahun 2016: Belum ada Tahun 2017: Belum ada Tahun 2018: Belum ada Tahun 2019: Belum ada Tahun 2020: Belum ada Target 2026: Target Nasional 2019: Tidak ada lampiran Perpres 59/2017			
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		Tahun 2016: 0 Tahun 2017: 0 Tahun 2018: 0 Tahun 2019: 0 Tahun 2020: 0 Target 2026:			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.				Target Nasional 2019: Meningkatkan			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

4.4 Indikator yang belum memiliki data

Indikator yang belum memiliki data pada pilar social adalah 36 indikator (38%). Indikator TPB pada pilar sosial yang belum memiliki data ditunjukkan pada Tabel 52.

Tabel 52. Indikator TPB pada pilar sosial yang belum memiliki data

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak ada data			
		1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	Tidak ada data			
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan,	1.4.1 (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		sanitasi layak dan berkelanjutan.					
		1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data			PT PLN (Persero) UP3 Gorontalo
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1 (b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD	Tidak ada data			Perguruan Tinggi
		1.5.1 (c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	BPBD	Tidak ada data			Perguruan Tinggi
		1.5.1(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	BPBD	Tidak ada data			
		1.5.1 (e)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	BPBD	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
		1.5.2.(a)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	Tidak ada data			
1.a	"Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi"	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Badan Keuangan	Tidak ada data			
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi,	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak ada data			
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	dan cukup sepanjang tahun.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak ada data			
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			
		2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			
		2.2.2(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan	Tidak ada data			
3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			
3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			
		3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			
		3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			
		3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			Polres Gorontalo

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
3.9	"Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara,	3.9.3(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			
3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan	Tidak ada data			
4.4	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Komunikasi dan informatika	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
4.a	"Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua."	4.a.1*	"Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))."	Dinas Komunikasi dan informatika	Tidak ada data			PT Telkom
4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	Tidak ada data			Univ Negeri Gorontalo
5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Tidak ada data			Polres Gorontalo

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Tidak ada data			Polres Gorontalo
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Tidak ada data			Polres Gorontalo
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Tidak ada data			Polres Gorontalo
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Tidak ada data			Polres Gorontalo
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	dini dan paksa, serta sunat perempuan.		sebelum umur 18 tahun.					
		5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA	Tidak ada data			
		5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan	Tidak ada data			
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	"Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam	Dinas Komunikasi dan informatika	Tidak ada data			Swasta PT Telkom

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

Pilar Ekonomi

Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum memiliki data ditunjukkan pada Tabel 53.

Tabel 53. Indikator TPB pada pilar ekonomi yang belum memiliki data

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
8.2	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi,	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB	Badan Keuangan	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.		riil per orang bekerja per tahun.					
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak ada data			Swasta
		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Perindustrian dan perdagangan	Tidak ada data			Perbankan
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak ada data			
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Tidak ada data			
		8.9.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Perindustrian dan perdagangan	Tidak ada data			
		8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Tidak ada data			
8.10	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	-	Tidak ada data			Perbankan
		8.10.1(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	-	Tidak ada data			Perbankan
		8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi dan UKM	Tidak ada data			Perbankan
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Badan Keuangan	Tidak ada data			Swasta
		9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Badan Keuangan	Tidak ada data			Swasta

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Koperasi dan UKM	Tidak ada data			Perbankan
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	Dinas Sosial	Tidak ada data			
		10.1.1(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Badan Keuangan	Tidak ada data			
		10.1.1(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	Dinas Sosial	Tidak ada data			
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Dinas Sosial	Tidak ada data			
10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.		Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PTD), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Dinas Komunikasi dan informatika	Tidak ada data			PT Telkom
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan,	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Dinas Komunikasi dan informatika	Tidak ada data			PT Telkom

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tidak ada data			Swasta
		17.17.1(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Tidak ada data			
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender,	17.18.1(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Badan Pusat Statistik	Tidak ada data			
		17.18.1(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Badan Pusat Statistik	Tidak ada data			
		17.18.1(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang	Badan Pusat Statistik				

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).					
		17.18.1(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Pusat Statistik	Tidak ada data			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

Pilar Lingkungan

Indikator yang belum memiliki data pada pilar lingkungan hidup adalah 15 indikator (35,71%). Indikator yang belum memiliki data pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Tabel 54.

Tabel 54. Indikator yang belum memiliki data dilaksanakan pada pilar lingkungan hidup

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus	6.2.1(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas LH dan SDA	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1(b)	Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.	Dinas PUPR	Tidak ada data			
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas LH dan SDA	Tidak ada data			BPDAS Bone Bolango
		6.5.1(c)	Jumlah jaringan informasi sumber	Dinas PUPR	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
			daya air yang dibentuk.					
		6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas PUPR	Tidak ada data			
		6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas PUPR	Tidak ada data			
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tidak ada data			
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas LH dan SDA	Tidak ada data			Swasta

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
11.7	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas PUPR	Tidak ada data			
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas LH dan SDA	Tidak ada data			Swasta: PT. Tri Jaya Tangguh PT. Pabrik Gula Gorontalo PT Harvest PT Harim PT Gorontalo Pangan Lestari PT Dynasti PT Heksa PT Segar Pangan PT Berkat Cahaya Energi TS MM Dunda Limboto RS Ainoen Habibie

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.6	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas LH dan SDA	Tidak ada data			
12.7	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dinas LH dan SDA	Tidak ada data			
12.8	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Tidak ada data			
15.6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	Badan keuangan	Tidak ada data			

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan yang belum memiliki data berjumlah 5 indikator (23,8%). Indikator yang belum memiliki data pada pilar hukum dan tata kelola ditunjukkan pada Tabel 55.

Tabel 55. Indikator yang belum memiliki data pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan

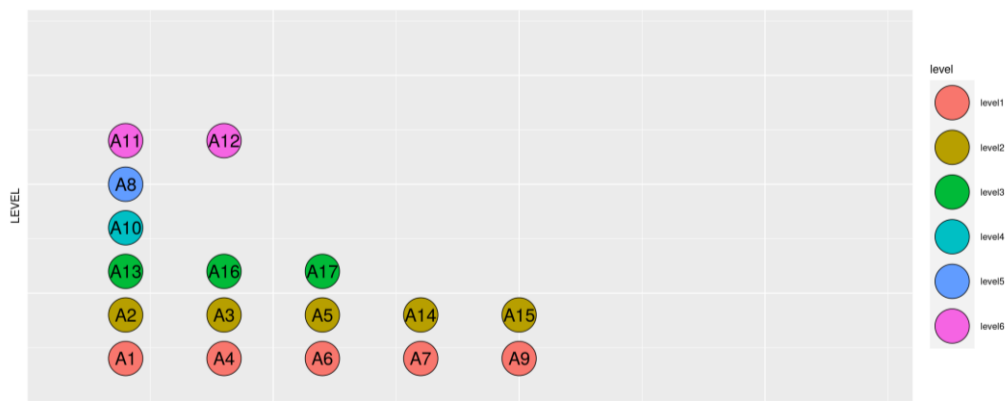
No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Tidak ada data			Polres Gorontalo
16.2	Menghentikan melakukan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.	16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Tidak ada data			Polres Gorontalo
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Tidak ada data			Polres Gorontalo
16.5	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).		Tidak ada data			
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk	16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Capil	Tidak ada data			

No Target	Target	No Indikator	Indikator	OPD yang bertanggung Jawab	Analisis Target Capaian	Analisis Keuangan Anggaran	Kegiatan yang akan dilakukan	Peran Para Pihak
	pencatatan kelahiran.							

Sumber : hasil evaluasi TPB, 2021

4.5 Analisis TPB Prioritas di Kabupaten Gorontalo

Analisis terhadap tingkat kepentingan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo, dilakukan survei terhadap 8 orang ekspert. Analisis dilakukan melalui metode *Interpretative Structural Modelling* (ISM) dengan aplikasi ISM Profesional Versi 5. Hasil analisis ditunjukkan pada Gambar 37.



Gambar 37. Hirarki tingkat kepentingan 17 Goals SDG’s di Kabupaten Gorontalo



Gambar 38. Arah TPB Kabupaten Gorontalo 2016-2021
(Sumber : Hasil analisis, 2021)

Hasil analisis TPB berdasarkan wawancara dan FGD dengan hasil evaluasi capaian TPB menunjukkan ada kesesuaian kondisi pencapaian TPB dan kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat. Hasil FGD menunjukkan bahwa kondisi TPB yang harus menjadi focus perhatian utama oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo adalah TPB (1); (4); (6); (7); (9).

4.6 Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB

Pembagian peran para pihak di Kabupaten Gorontalo ditunjukkan pada Tabel 56.

Tabel 56. Pembagian peran para pihak dalam pencapaian TPB

No	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
	PERBANKAN		
1.	Bank Indonesia	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
2.	Bank SULUTGO	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
3.	Bank BNI	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
4.	Bank Mandiri	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
5.	Bank BRI	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
6.	Bank Mandiri Syariah	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
7.	Bank Muamalat	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
8.	Maybank	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
9.	Bank Tabungan Negara	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
10.	Bank BTPN	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
11.	Bank BCA	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
12.	Bank Danamon	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
13.	Bank Mega	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
14.	Bank Sinar Mas	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
	PERGURUAN TINGGI		
1.	Universitas Negeri Gorontalo	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
2.	Universitas Gorontalo	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
3.	Universitas Muhamadiyah Gorontalo	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
4.	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
	LEMBAGA/ASOSIASI/FORUM/ORMAS/ LSM		
1.	Ikatan Dokter Indonesia	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
2.	PGRI	Pelayanan pendidikan	Pendidikan
3.	Ikatan Bidan Indonesia	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
4.	Dekranasda	Pemberdayaan UMKM	Ekonomi
5.	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Pemberdayaan nelayan	Ekonomi
6.	KADIN Gorontalo		Ekonomi
7.	HIPMI Gorontalo		Ekonomi
8.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Pemberdayaan masyarakat	
9.	Tim Penggerak PKK	Pemberdayaan masyarakat	
10.	RRI Gorontalo	Sosialisasi Program	Infokom
11.	TVRI Gorontalo	Sosialisasi Program	Infokom
12.	MIMOZA TV	Sosialisasi Program	Infokom
13.	Gorontalo TV	Sosialisasi Program	Infokom
14.	PT. PLN (Persero) UP3 Gorontalo		Kelistrikan
15.	Baznas	Filan tropi	
	RUMAH SAKIT		
1.	Rumah Sakit MM Dunda Limboto	Pelayanan kesehatan	Kesehatan

No	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
2.	Rumah sakit Ainoen Habibie Gorontalo	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
	SWASTA		
1.	PT. Pabrik Gula Gorontalo	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
2.	PT Harvest Gorontalo	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
3.	PT. Tri Jaya Tangguh	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
4	PT. Harim	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
5	PT. Gorontalo Pangan Lestari	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
6	PT Dynasti	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
7	PT Heksa	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
8	PT Segar Pangan	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
9	PT Berkat Cahaya Energi	Penyedia jasa CSR	Ekonomi

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2021



BAB V ANALISIS CAPAIAN TPB

BAB V. ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator pembangunan berkelanjutan. Program yang akan dikembangkan terhadap pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan.

Pengkajian dilakukan dengan melakukan overlay daya dukung, analisis risiko/dampak lingkungan, jasa ekosistem, perubahan iklim, biodiversity dengan lokasi kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

5.1 Analisis Daya Dukung Lingkungan Hidup

Hasil analisis daya dukung air di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa daya dukung air hingga Tahun 2030 masih surplus (lihat Gambar 30). Kondisi ketersediaan air di Kabupaten Gorontalo S_A (731.659.040 m³/tahun) > D_A (605.643.200 m³/tahun), sehingga berdasarkan kriteria Permen LH No. 17 Tahun 2009, status daya dukung air di wilayah Kabupaten Gorontalo saat ini dinyatakan surplus.

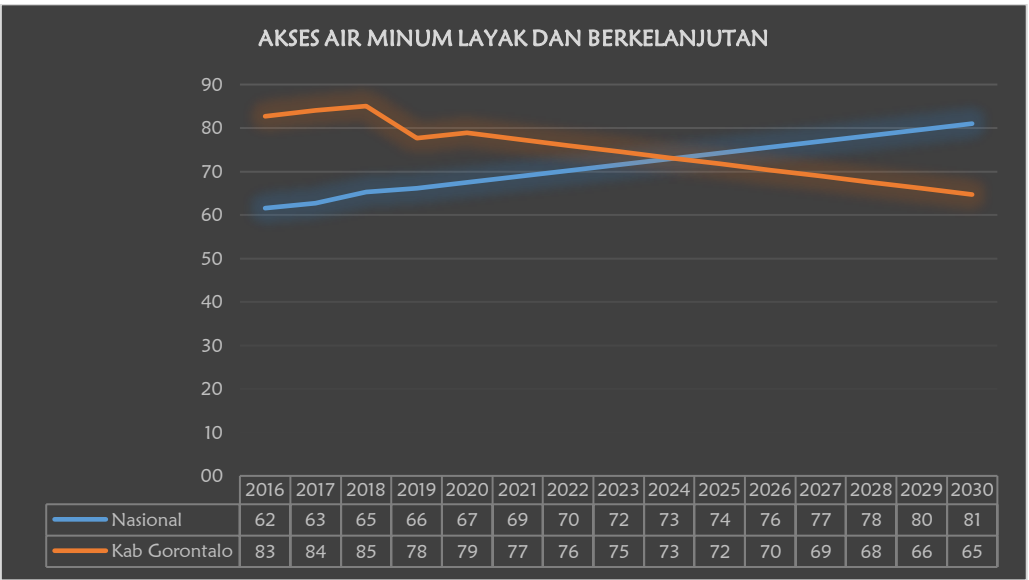
Demikian pula dengan daya dukung lahan (Gambar 31). Ketersediaan lahan (S_l) sebesar 1.026.306 Ha. Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 sebesar 378.527 jiwa. Luas lahan yang dibutuhkan untuk hidup layak adalah 0,2194. Kebutuhan lahan Kabupaten Gorontalo diperoleh 83083,19 Ha. Dengan demikian ketersediaan lahan > kebutuhan lahan.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikaji terhadap daya dukung air dan daya dukung lahan adalah :

- Tujuan 2 : tanpa kelaparan
- Tujuan 3 : kehidupan sehat sejahtera
- Tujuan 6 : air bersih dan sanitasi layak
- Tujuan 11: Kota dan pemukiman berkelanjutan
- Tujuan 12 : Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- Tujuan 13 : penanganan perubahan iklim
- Tujuan 15 : ekosistem daratan

Hasil analisis D3TLH Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa 44,1% wilayah Kabupaten Gorontalo dalam kondisi daya dukung jasa ekosistem penyedia air sedang dan 34,7% berada dalam daya dukung jasa ekosistem penyedia air rendah.

Hasil evaluasi capaian indikator 1.4.1(d) persentase rumah tangga yang memiliki akses layanan terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan ditunjukkan pada Gambar 36.



Gambar 39. Hasil evaluasi capaian dan prediksi indikator akses rumah tangga terhadap layanan air bersih layak dan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo

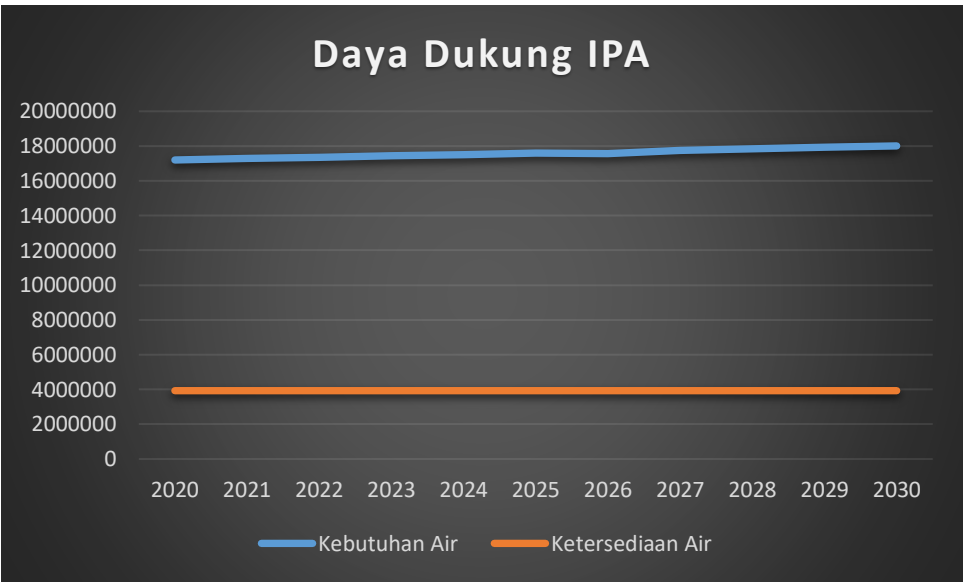
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terjadi trend penurunan rumah tangga yang mendapatkan layanan terhadap akses air bersih layak dan berkelanjutan. Target nasional, di Tahun 2030 seluruh rumah tangga akan memperoleh layanan akses air bersih layak dan berkelanjutan. Akan tetapi kondisi di Kabupaten Gorontalo, terjadi tren penurunan hingga Tahun 2030.

Berdasarkan data dari PDAM Limboto, menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Gorontalo berasal dari 15 Instalasi Pengelolaan Air (IPA) yaitu:

- IPA Biyonga I : 37,75 liter/detik
- IPA Biyonga II : 18 liter/detik
- IPA Bulota : 25,70 liter/detik
- IPA Pilohayanga : 10,57 liter/detik
- IPA Tibawa : 6,72 liter/detik
- SB Dunggala : 0,50 liter/detik
- SB Isimu Selatan : 0,88 liter/detik
- SB Tolotio : 3,96 liter/detik
- IPA Barakati : 3,70 liter/detik
- SPAM Dunggala : 0,00 liter/detik
- IPA Tabongo : 4,44 m³/detik
- IPA Biluhu : 0,00 m³/detik
- IPA Diloniyohu : 6,48 liter/detik

- SB Paris : 1,21 liter/detik
- IPA Tamaila : 4,74 liter/detik

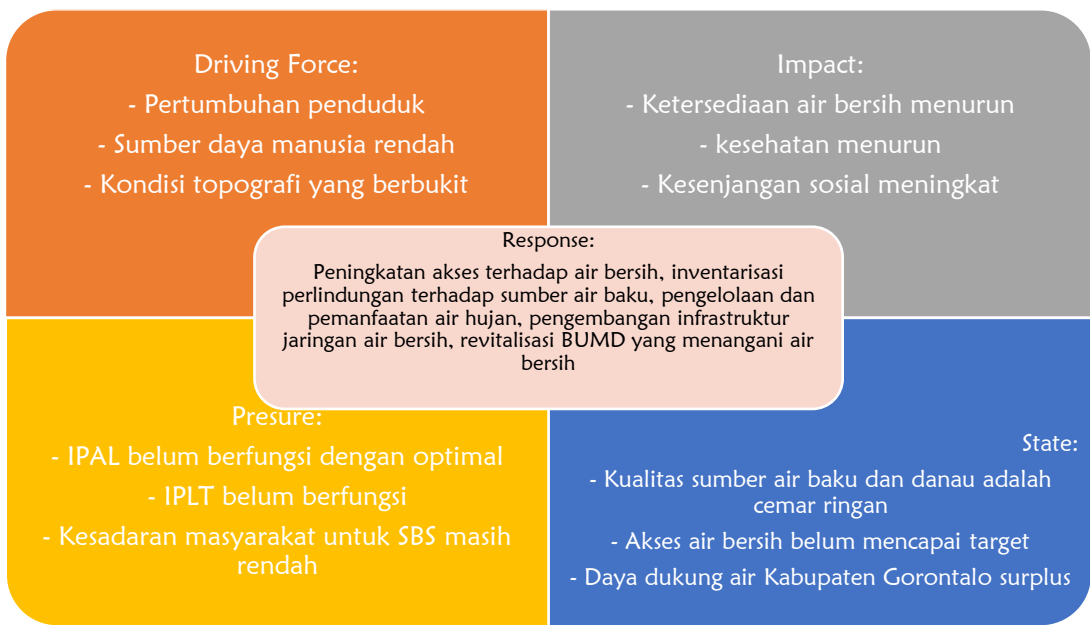
Hasil analisis daya dukung air, menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo surplus ketersediaan air (lihat gambar 37). Jika pemerintah daerah bergantung pada IPA dalam penyediaan air bersih, maka kondisi pencapaian ditunjukkan pada Gambar 38.



Gambar 40. Daya Dukung air berdasarkan Kapasitas Intalasi Pengelolaan Air (IPA) Kabupaten Gorontalo tanpa perlakuan hingga Tahun 2030



Gambar 41. Daya Dukung air dengan memanfaatkan potensi maksimal ketersediaan air permukaan di Kabupaten Gorontalo (Sumber : hasil analisis tim KLHS)

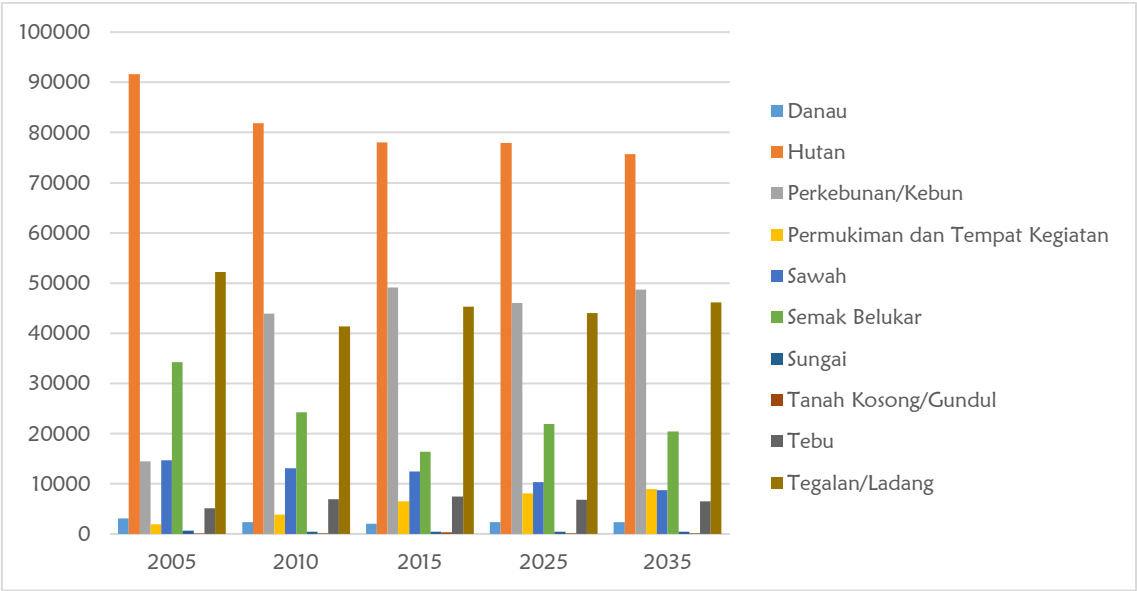


Gambar 42. D-P-S-I-R Isu Ketersediaan Air Bersih

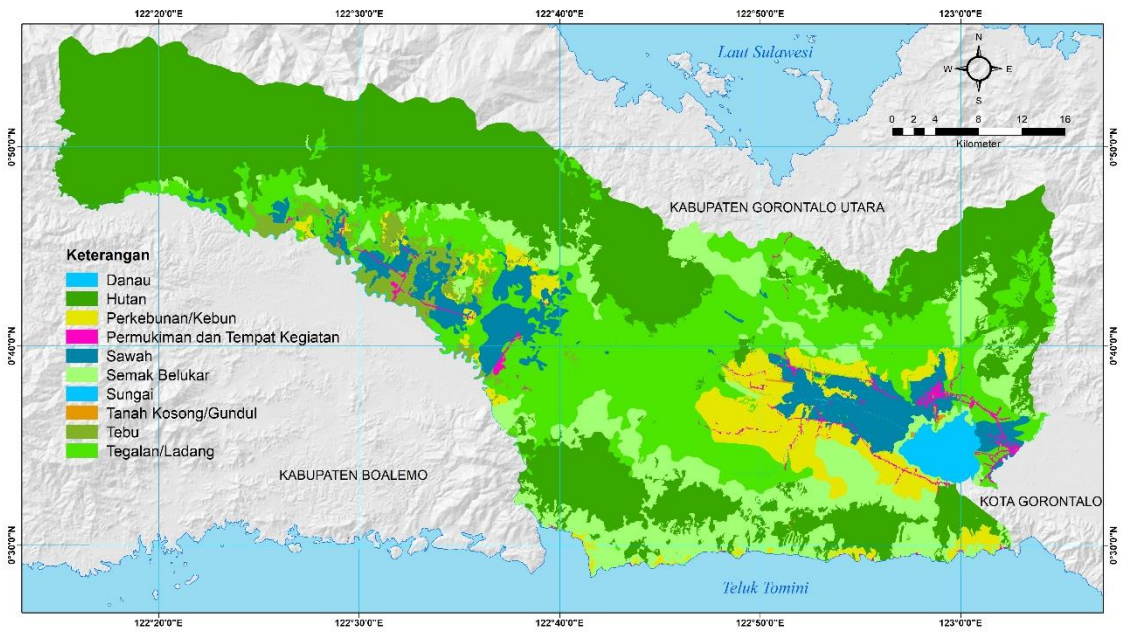
Kecendrungan Perubahan Tutupan Lahan

Hasil penelitian Subandi *et al*, (2019) menunjukkan terjadi perubahan luas lahan padi di Kabupaten Gorontalo. Prediksi perubahan sawah skenario 1 tahun 2015 memiliki luas 11.826 ha. Memasuki tahun 2020 luas areal persawahan menurun menjadi 11.038 ha. Pada tahun 2025 luas areal persawahan kembali dikurangi menjadi menjadi 10.342 ha, dan pada tahun 2030 terjadi kondisi yang sama dimana areal persawahan berkurang menjadi 9.623 ha. Pada puncak prediksi yaitu pada tahun 2035 luas areal persawahan kembali menyusut menjadi 8.882 ha.

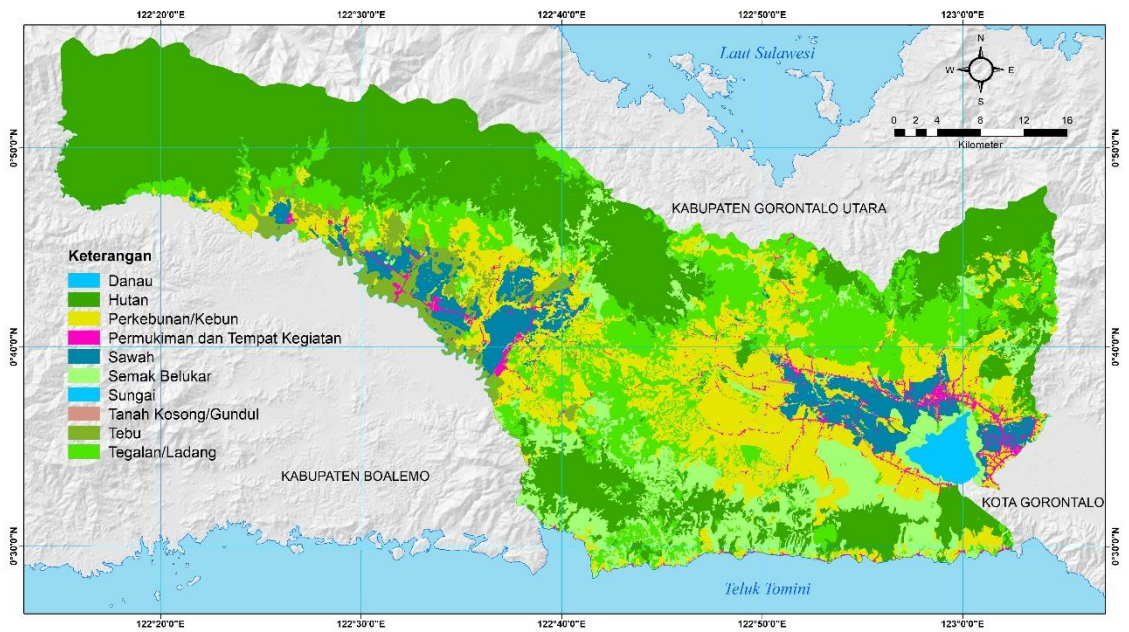
Dari 2015 hingga 2020, lahan sawah dikonversi seluas 1.054 ha. Sawah pada periode itu berubah fungsi menjadi perkebunan seluas 648 ha, pemukiman seluas 229 ha, dan tebu 178 ha. Dari tahun 2020 hingga 2025, sawah kembali mengalami konversi seluas 920 ha. Sawah yang beralih fungsi menjadi perkebunan seluas 566 ha, pemukiman menjadi 173 ha, dan sawah yang berubah fungsi menjadi tebu seluas 181 ha. Jika kondisi ini tidak ditindaki, maka ketersediaan lahan di Kabupaten Gorontalo semakin terancam. Grafik kecendrungan tutupan lahan di Kabupaten Gorontalo ditunjukkan pada Gambar 51.



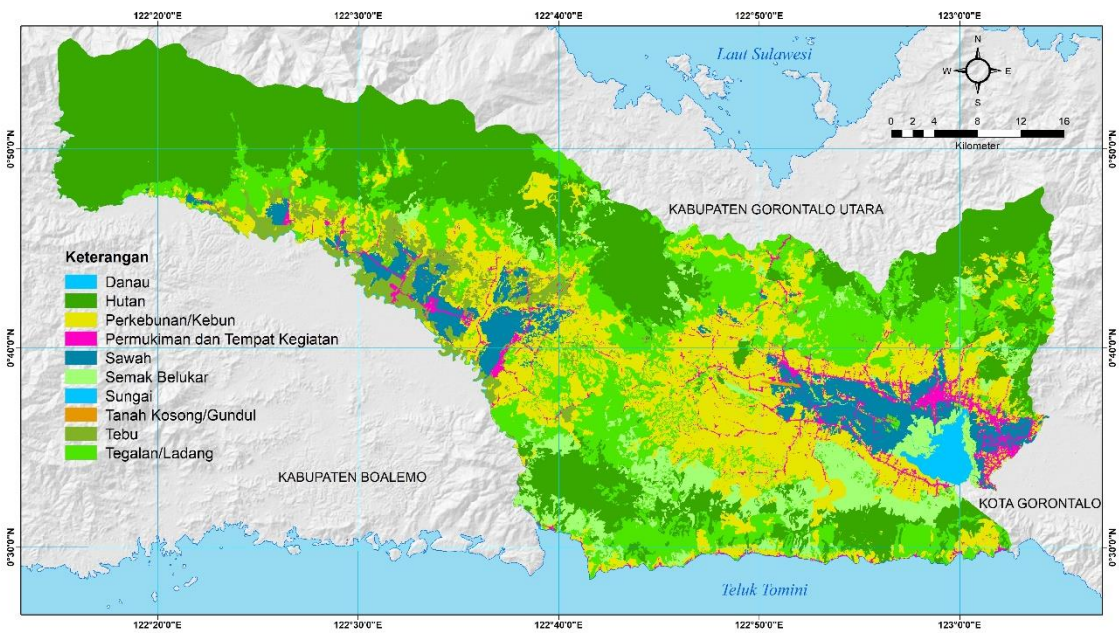
Gambar 43. Grafik kecendrungan perubahan tutupan lahan di Kabupaten Gorontalo 2005 – 2035
(Sumber : Subandi *et al.*, 2019)



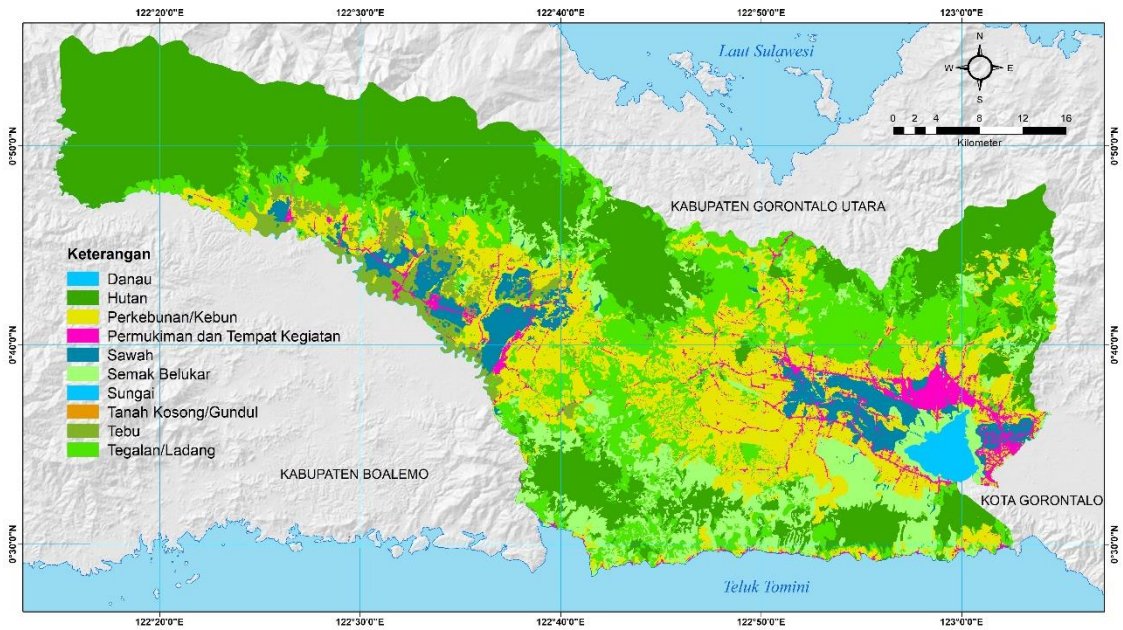
Gambar 44. Tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2005
(Sumber : Subandi *et al.*, 2019)



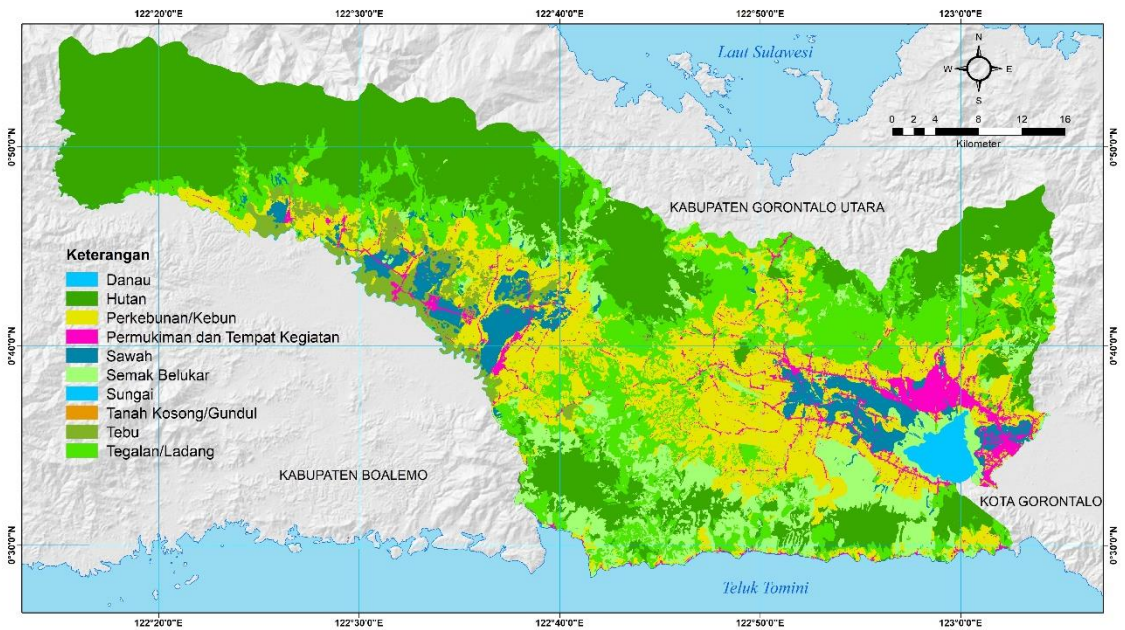
Gambar 45. Tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2010
(Sumber : Subandi *et al*, 2019)



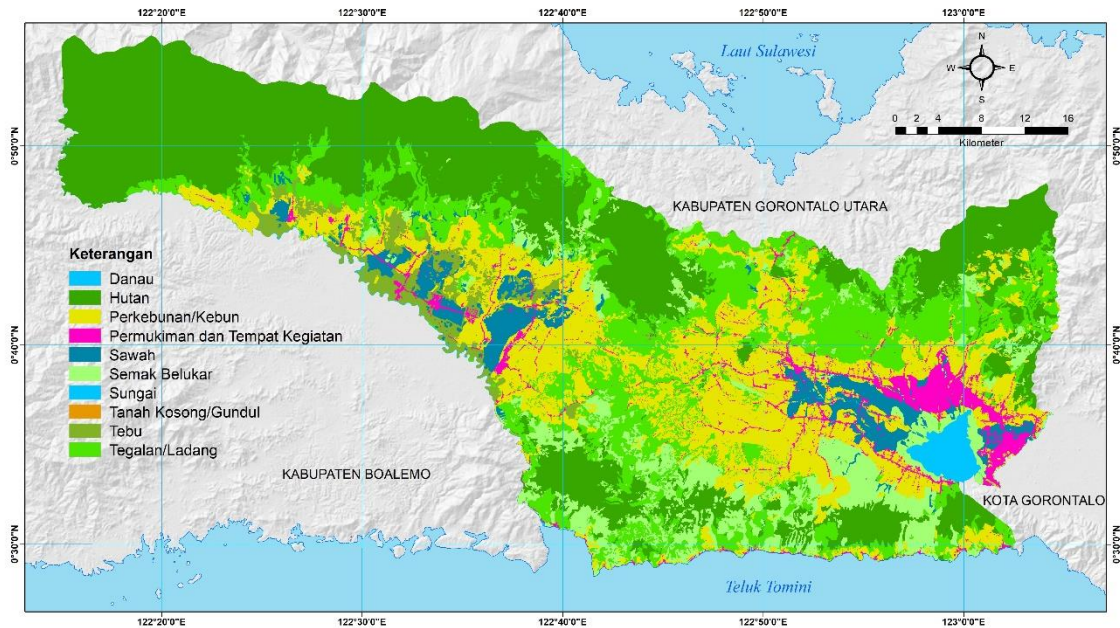
Gambar 46. Tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2015
(Sumber : Subandi *et al*, 2019)



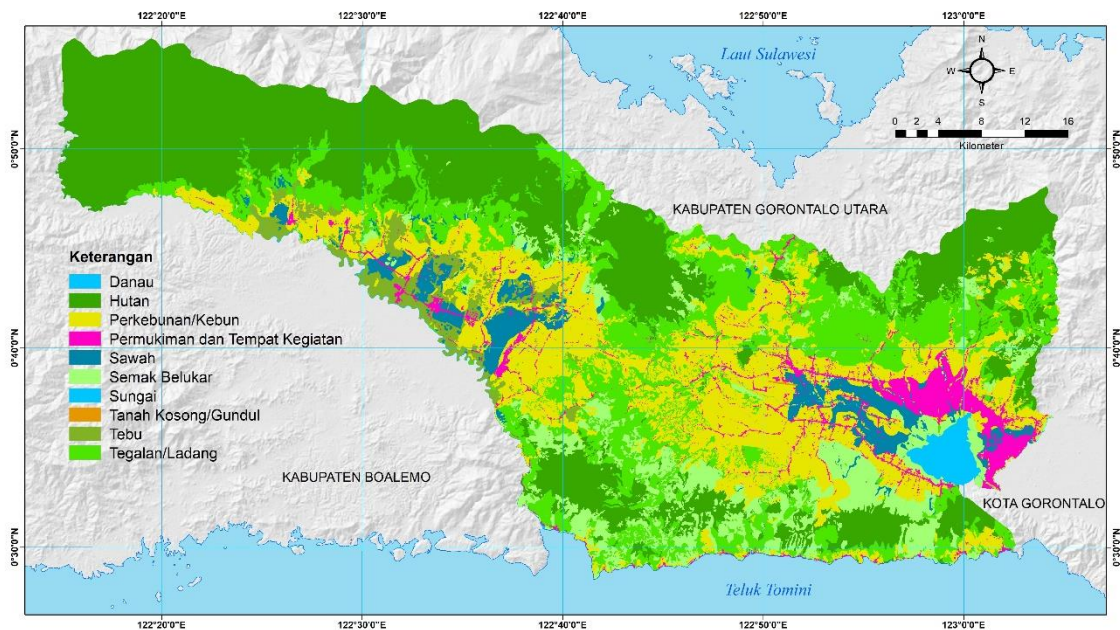
Gambar 47. Peta Tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2020
(Sumber : Subandi *et al*, 2019)



Gambar 48. Peta Prediksi perubahan tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2025
(Sumber : Subandi *et al*, 2019)



Gambar 49. Prediksi perubahan tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2030
(Sumber : Subandi *et al*, 2019)



Gambar 50. Peta Prediksi perubahan tutupan lahan Kabupaten Gorontalo Tahun 2035
(Sumber : Subandi *et al*, 2019)

Skenario Daya Dukung Pangan

Isu Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan masalah ketahanan pangan adalah TPB ke-2, yaitu “Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan” dengan outcome berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo. Untuk memperoleh outcome tersebut, diperlukan peranan dari berbagai pihak (lihat Tabel 42). Dinas Kesehatan merupakan OPD yang memiliki peran utama dalam meraih outcome meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat. Adapun outcome terkait terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo akan memerlukan peranan dari para pihak, antara lain dinas yang mengurus pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat; ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan; sosial; serta koperasi, UMKM, perdagangan, dan perindustrian.

5.2 Analisis Risiko/dampak Lingkungan Hidup

Dampak lingkungan hidup merupakan pengaruh perubahan lingkungan hidup akibat KRP, sedangkan risiko lingkungan hidup merupakan kemungkinan atau tingkat kejadian, bahaya, konsekuensi yang ditimbulkan kondisi lingkungan yang jadi ancaman ekosistem, kesehatan dan keselamatan manusia.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup adalah:

- ✚ Tujuan 8 : Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Target 8.9 : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
Indikator 8.9.1 (a) : jumlah wisatawan mancanegara
Indikator 8.9.1 (b): jumlah kunjungan wisatawan nusantara
- ✚ Tujuan 9 yaitu industry, inovasi dan pembangunan infrastruktur.
Target 9.1 yaitu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Indikator pada target ini adalah:

Indikator 9.1.1(b) : panjang pembangunan jalan tol
Indikator 9.1.1(c) : panjang jalur kereta api
Indikator 9.1.2(b) : panjang dermaga penyebrangan
Indikator 9.1.2 (c) : jumlah pelabuhan strategis
Di wilayah Kabupaten Gorontalo, indikator-indikator tersebut belum dilaksanakan pada periode 2021 – 2026.

Analisis risiko dari pencapaian tujuan tersebut antara lain:

- Pengembangan jaringan jalan akan meningkatkan jangkauan aksesibilitas masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan akan memicu tumbuhnya aktivitas baru di sekitar jalan yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan di sepanjang jalan. Alih fungsi lahan dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga menyebabkan terjadinya runoff dan banjir yang berdampak negatif bagi masyarakat di sekitar jalan. Pembangunan jalan akan meningkatkan jumlah kendaraan yang melintas di daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan emisi gas polutan. Kegiatan pembangunan jalan menimbulkan dampak negatif

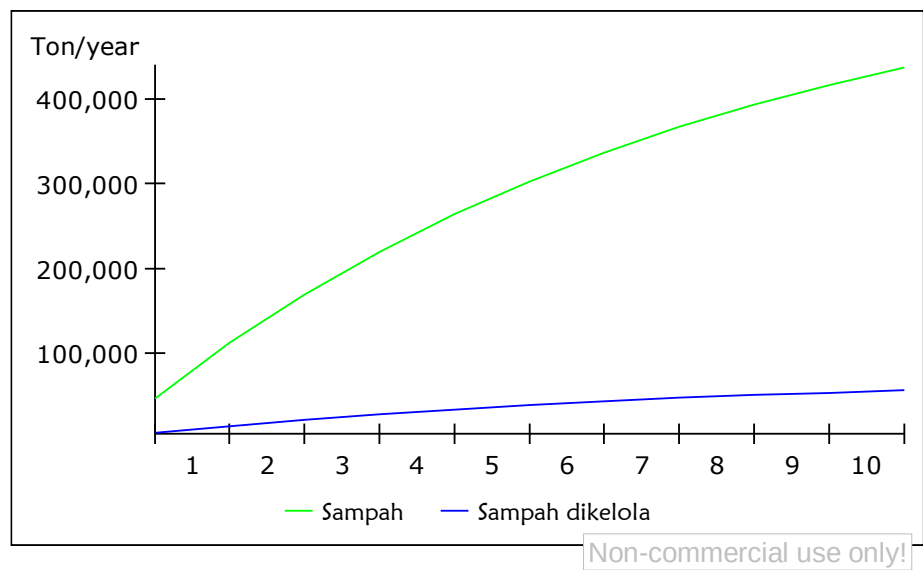
misalnya kebisingan dan polusi udara bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek.

- Pengembangan sarana perhubungan berupa terminal, pelabuhan dan bandar udara dapat membuka lapangan kerja formal sebagai pegawai pada terminal, pelabuhan dan Bandar udara, serta informal antara lain sebagai pemilik warung, toko dan lainnya. Pembangunan sarana perhubungan memicu tumbuhnya aktivitas baru di sekitarnya yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan di sekitar terminal, pelabuhan dan Bandar udara. Alih fungsi lahan dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga menyebabkan terjadinya runoff dan banjir yang berdampak negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Aktivitas di terminal, pelabuhan dan Bandar udara dapat meningkatkan timbulan sampah dan air limbah. Pembangunan terminal, pelabuhan dan Bandar udara akan meningkatkan jumlah kendaraan yang melintas di daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan emisi gas polutan. Pembangunan pelabuhan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, pencemaran air laut bagi penduduk yang berdian di sekitar pelabuhan, serta mengancam keberlangsungan penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Kegiatan pembangunan terminal, pelabuhan dan bandar udara dapat menimbulkan dampak negatif misalnya kebisingan dan polusi udara bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek.
- Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata akan memicu tumbuhnya aktivitas baru di sekitar kawasan pariwisata yang menyebabkan adanya alih fungsi lahan di daerah sekitarnya. Alih fungsi lahan dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga menyebabkan terjadinya runoff dan banjir yang berdampak negatif bagi masyarakat di sekitar kawasan pariwisata. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata akan meningkatkan jumlah kendaraan yang melintas di daerah tersebut sehingga terjadi peningkatan emisi gas polutan. Selain itu meningkatnya jumlah wisatawan dapat meningkatkan jumlah timbulan limbah padat dan air limbah yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.
- Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dapat memberikan dampak berupa perubahan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Selain itu, alih fungsi lahan dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga menyebabkan terjadinya runoff dan banjir. Banyaknya manusia yang beraktivitas di kawasan permukiman akan meningkatkan jumlah timbulan limbah padat dan air limbah. Kegiatan pembangunan kawasan permukiman menimbulkan dampak negatif misalnya kebisingan dan polusi udara bagi masyarakat terutama yang tinggal di sekitar proyek.

Kegiatan permukiman, pariwisata menghasilkan limbah domestic baik limbah cair maupun limbah padat.

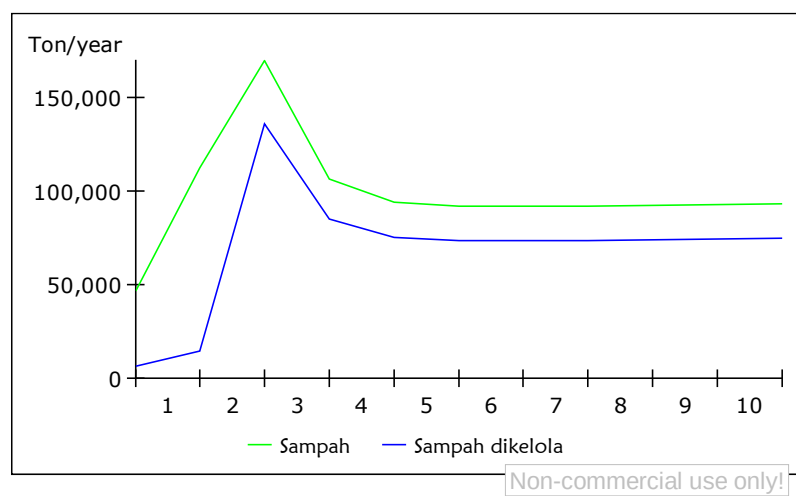
Sampah merupakan salah satu permasalahan yang ada di lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa 86,97% sampah belum dikelola. Sampah yang terkelola melalui pembuatan kompos 0,22%, sampah yang dibuang ke TPA 11,1%, sampah yang didaur ulang 1,64%.

Target nasional pengelolaan sampah adalah 80% sampah terkelola di Tahun 2019. Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo ditunjukkan pada Gambar 50

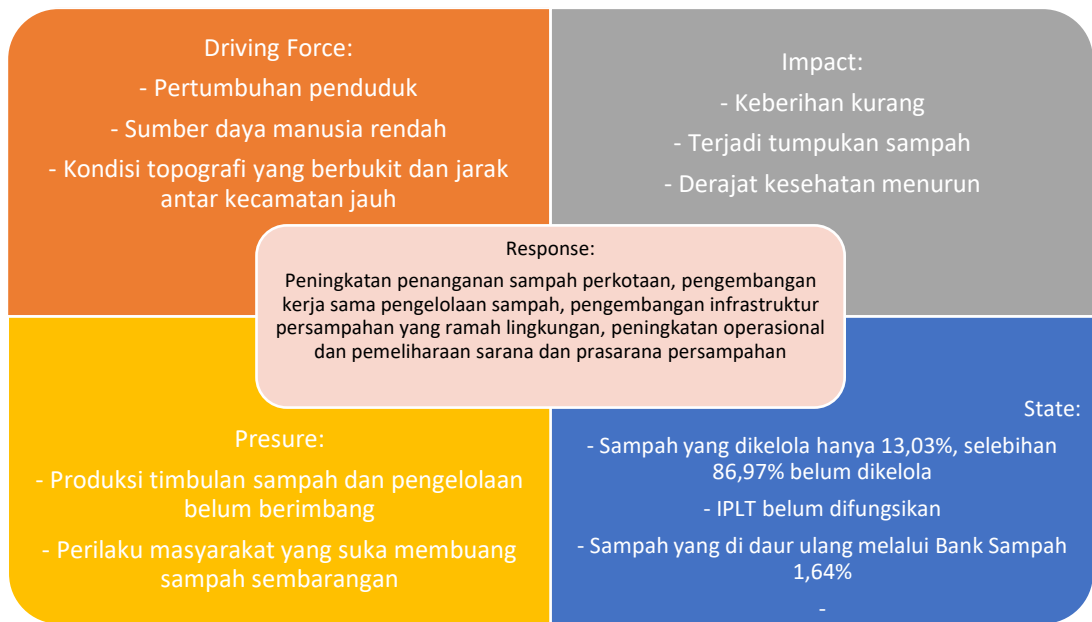


Gambar 51. Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2021)

Skenario Tahun 2022 dengan proporsi peningkatan pengelolaan sampah hingga 80% (sesuai target nasional) sebagai berikut pembuatan kompos 10%, pemanfaatan kembali 15% dan pembatasan sampah 15%. Skenario Tahun 2023 menaikkan bank sampah 35% dan pengangkutan ke TPA 25%, maka kondisi pengelolaan sampah ditunjukkan pada gambar 51



Gambar 52. Skenario pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2021)



Gambar 53. D-P-S-I-R Isu Sampah

5.3 Analisis Jasa Ekosistem

Hasil analisis daya dukung jasa ekosistem penyedia pangan menunjukkan bahwa Kecamatan Tibawa, Kecamatan Limboto, Kecamatan Limboto Barat, dan Kecamatan Telaga berada di wilayah daya dukung jasa ekosistem yang terlampaui.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang bersesuaian dengan jasa ekosistem penyedia pangan adalah:

🌱 Tujuan 2 : tanpa kelaparan

Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

Indikator 2.1.1* : Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).

Indikator 2.1.1(a) : Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.

Indikator 2.1.2* : Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

Indikator 2.1.2(a) : Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.

Indikator 2.2.1(a) : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.

Indikator 2.2.2* : Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.

Dengan mempertimbangkan kondisi beberapa kecamatan yang memiliki wilayah dengan jasa ekosistem penyedia pangan terlampaui, maka program pengembangan

produksi pertanian diarahkan pada kecamatan-kecamatan yang daya dukungnya terlampaui.

5.4 Analisis Sumber Daya Alam

Meningkatnya penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dalam jangka panjang penurunan kualitas lingkungan ini akan berdampak pada inefisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan dengan adanya memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di Kabupaten Gorontalo dalam mendukung kegiatan pembangunan.

Adapun sumber daya alam lokal yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan antara lain:

- Batu gamping terdapat di Kecamatan Batudaa dan Kecamatan Tibawa
- Granit terdapat di Kecamatan Batudaa
- Lempung terdapat di Kecamatan Tibawa dan Limboto
- Sirtu terdapat di Kecamatan Telaga, Batudaa, Limboto

5.5 Analisis Perubahan Iklim

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Perubahan iklim dapat disebabkan oleh terjadinya pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK). Terminologi gas rumah kaca diartikan sebagai gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun dari kegiatan manusia (antropogenik), yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Sebagian radiasi matahari dalam bentuk gelombang pendek yang diterima permukaan bumi dipancarkan kembali ke atmosfer dalam bentuk radiasi gelombang panjang (radiasi infra merah). Radiasi gelombang panjang yang dipancarkan ini oleh GRK yang ada pada lapisan atmosfer bawah, dekat dengan permukaan bumi, akan diserap dan menimbulkan efek panas, yang dikenal sebagai Efek Rumah Kaca (KLH, 2012).

GRK merupakan salah satu parameter dalam memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan menyebabkan terjadinya emisi GRK melalui aktivitas penggunaan bahan bakar fosil, aktivitas proses produksi industri, aktivitas pertanian, peternakan, kehutanan, dan perubahan lahan, serta produksi limbah padat dan cair.

Dampak langsung/awal dari adanya pembangunan infrastruktur adalah adanya pembukaan lahan yang memiliki nilai kinerja atau jasa ekosistem pengaturan iklim

tinggi untuk digunakan dalam pembangunan rencana struktur ruang. Hal ini menyebabkan penurunan komposisi dan struktur vegetasi akibat land clearing secara luas menyebabkan peningkatan emisi karbon akibatnya terjadi perubahan suhu.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yang berhubungan perubahan iklim adalah:

✚ Tujuan 13 : penanganan perubahan iklim

Target 13.1 : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Indikator 13.1.1*: Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

Indikator 13.2.1*: Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.

✚ Tujuan 15: ekosistem daratan

Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Indikator 15.1.1(a): Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Target 15.3: Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

Indikator 15.3.1(a): Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

5.6 Analisis Keanekaragaman hayati

Seiring semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka meningkat pula kebutuhan sumber daya alam hayati yang berakibat pada menurunnya sumber daya alam hayati tersebut apabila tidak dikelola secara lestari atau dikenal dengan degradasi sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu tuntutan terhadap pengelolaan sumberdaya alam hayati secara berkelanjutan menjadi prioritas. Mengingat kebutuhan akan sumber daya alam hayati sangat tergantung pada kondisi suatu wilayah maka dalam pelaksanaan pengelolaannya diperlukan pemahaman terhadap nilai keanekaragaman hayati sebagai sumberdaya alam hayati sesuai dengan wilayahnya. Nilai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan potensi sumberdaya alam yang wajib untuk dijaga kelestariannya agar tidak mengalami kerusakan. Kerusakan keanekaragaman hayati akan berakibat hilang atau timpangnya sebuah ekosistem lingkungan sehingga dapat menurunkan keanekaragaman hayati, menurunkan jenis dan jumlah flora dan fauna yang ada.

Di Kabupaten Gorontalo terdapat Cagar Alam Tangale dan sebagian wilayah Suaka Margasatwa Nantu. SM Nantu merupakan zona transisi dan campuran antara fauna Asia dan Australia. Di Nantu ini hidup secara baik satwa endemic seperti Anoa (*Bubalus Depressicornis*), Babi rusa (*Babyrousa celebensis*), Kera Hitam Sulawesi (*Macaca nigrescen*, *Macaca nigra*), Tarsius (*Tarsius pumilus*). (IKPLH Provinsi Gorontalo, 2018).

Pembangunan dan pengembangan jalan yang melintas di sekitar Cagar Alam Tangale akan membuka akses terhadap lokasi tersebut. Hal ini akan berpotensi menimbulkan gangguan terhadap biodiversitasnya.

Di sekitar perairan Danau Limboto terdapat burung migran yaitu burung Gagang Bayam Timur, Tikusan Alis Putih, Kedidil Golgol (*Curlew Sandpiper*).

Gagang-bayam timur yang lalu lalang di perairan dangkal itu berdasarkan situs Kutilang, persebaran dan ras-nya mulai dari Eropa sampai Afrika sub-Sahara dan Madagaskar ke timur sampai Asia Tengah, India, Tiongkok, Indochina dan Taiwan. Di Indonesia secara lokal berbiak di Sumatera bagian utara, burung dewasa tercatat bergerak sampai Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.

Untuk tempat hidup dan kebiasaan, burung ini menunjang lahan basah yang dangkal terutama yang berair tawar seperti rawa, danau tepian sungai, sawah dan tambak, juga delta dan muara sungai. Burung karnivor dengan makanan yang bervariasi terutama inverteberata perairan kecil dan biji-bijian. Jenis pakan mengikuti ketersediaan musiman dan perpindahan jenis habitat.

Sementara tikusan alis-putih, masih menurut website yang sama, memiliki ukuran agak kecil sekitar 20 cm, berparuh pendek. Tubuh coklat keabu-abuan. Terdapat pola strip putih pada bagian atas kepala yang terlihat jelas dan dibawah garis mata yang hitam. Mahkota, punggung, dan dada abu-abu; sayap dan ekor coklat keabu-abuan. Penyebaran dan ras burung ini adalah semenanjung Malaysia, Filipina, dan Sunda besar, sampai Papua, dan Australia. Burung ini tergolong pemalu, menghuni daerah padang rumput yang tergenang, paya-paya, dan sawah. Hidup berpasangan. Burung ini tersebar luas di daerah dataran rendah di Sumatra (sampai ketinggian 1.200 meter), Kalimantan, dan Jawa. Burung migran ini berada di Danau Limboto mulai Agustus hingga Oktober. Puncaknya di akhir Agustus hingga September. (Paino, 2016).

Pengembangan infrastuktur pariwisata di sekitar Danau Limboto dapat memberikan dampak terganggunya keanekaragaman hayati di sekitar wilayah tersebut.

Tabel 57. Hasil pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap enam muatan KLHS

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
1	Tanpa Kemiskinan					
1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus	Dampak: - Alih fungsi lahan - Berkurangnya daerah resapan - runoff dan banjir Risiko: - Wilayah rawan banjir tinggi : Kecamatan Batudaa (137,96 Ha); Kecamatan Limboto (1277 Ha); Limboto Barat (747,26 Ha); Tabongo (1039,23 Ha); Telaga Biru (300,97 Ha); Telaga	Tidak tersedia data jasa ekosistem pengaturan iklim	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
			Jaya (263,23 Ha); Tilango (353,28 Ha)			
1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
2	Tanpa Kelaparan					
2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus	-	Jasa ekosistem penyediaan pangan yang terlampaui di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Telaga	-	-
2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus	-	Jasa ekosistem penyediaan pangan yang terlampaui di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Telaga	-	-
2.3	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	Daya dukung air surplus Daya dukung lahan surplus	Peningkatan produktivitas pertanian berdampak: - Alih fungsi lahan - Berkurangnya daerah resapan - runoff dan banjir - Pencemaran air permukaan menurun akibat limbah pertanian Risiko: Wilayah rawan banjir tinggi : Kecamatan Batudaa (137,96 Ha); Kecamatan Limboto (1277 Ha); Limboto Barat (747,26 Ha); Tabongo (1039,23	Jasa ekosistem penyediaan pangan yang terlampaui di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Telaga	Alih fungsi lahan dapat berakibat pengurangan sarapan karbon sehingga suhu bumi semakin panas	-

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
			Ha); Telaga Biru (300,97 Ha); Telaga Jaya (263,23 Ha); Tilango (353,28 Ha)			
3	Kehidupan Sehat Sejahtera	Target tidak terkait D3TLH	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan berdampak: - Pencemaran air permukaan menurun akibat limbah fasilitas kesehatan - Pencemaran udara akibat pembakaran limbah medis Risiko: Limbah cair yang berasal dari RS Dunda akan bermuara ke Danau Limboto dan berakibat terganggunya biodiversity perairan danau. Limbah cair dan limbah medis puskesmas yang tidak dikelol akan berdampak terhadap lingkungan	Target tidak terkait jasa ekosistem	Pembakaran limbah padat dari fasilitas kesehatan berakibat peningkatan polutan di udara	Limbah cair yang berasal dari RS Dunda akan bermuara ke Danau Limboto dan berakibat terganggunya biodiversity perairan danau
4	Pendidikan berkualitas	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
5	Kesetaraan gender	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak					
6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Daya dukung air surplus	Dampak: - Pembangunan jaringan perpipaan berdampak terhadap gangguan lalu lintas - Pembangunan IPA akan berdampak pada gangguan biota perairan sungai	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem penjernihan air	-	-

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Daya dukung air surplus	Dampak: - Pembangunan jaringan perpipaan berdampak terhadap gangguan lalu lintas - Pembangunan IPA akan berdampak pada gangguan biota perairan sungai	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem penjernihan air	-	-
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Daya dukung air surplus	Pembangunan dan pengembangan IPLT akan berdampak: - Alih fungsi lahan - Terpeliharanya kualitas air	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem penjernihan air	-	-
6.4	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Daya dukung air surplus	Dampak: - Pembangunan jaringan perpipaan berdampak terhadap gangguan lalu lintas Pembangunan IPA akan berdampak pada gangguan biota perairan sungai	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem penjernihan air	-	-
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Target tidak terkait D3TLH	- Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
7	Energi Bersih dan Terjangkau					
7.2	Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan
7.3	Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
9	Industri, inovasi dan infrastruktur					

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Pembangunan jalan tol, rel kereta, pelabuhan strategis belum dilaksanakan	-	-	-	-
10	Berkurangnya kesenjangan	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan					
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Daya dukung lahan untuk pemukiman surplus. Ketersediaan lahan untuk pemukiman 16612,13 ha sedangkan kebutuhan lahan untuk pemukiman adalah 7328,16 ha	Dampak: - Alih fungsi lahan - Berkurangnya daerah resapan - runoff dan banjir - Meningkatnya bangkitan lalu lintas - Kemacetan - emisi gas polutan - Peningkatan timbunan limbah cair domestik dan sampah - Peningkatan kebutuhan air bersih Risiko: - Rawan longsor rendah 8441 ha, sedang 1620,24 ha dan tinggi 7,73 ha. - Rawan Banjir rendah 10061,24 ha dan tinggi 7,73 .ha	Adanya pemanfaatan sumber daya alam lokal sebagai bahan baku pembangunan kawasan peruntukan permukiman	Luas lahan pemukiman perkotaan yang berada pada wilayah dengan jasa ekosistem pangan rendah 2716,54 Ha (16,35%), sedang 4437,59 Ha (26,71%) dan tinggi 197413,2 Ha (17,55%).	JE Pengaturan iklim rendah 5029,69 ha, sedang 5031,55 ha dan tinggi 7,73 ha → menurunnya fungsi layanan ekosistem sebagai pengatur iklim → cuaca semakin panas
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Daya dukung air surplus		Jasa ekosistem pengaturan untuk penjernihan udara		
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab					
12.4	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus	Daya dukung air surplus	Dampak: - Terpeliharanya kualitas air dan udara	Jasa ekosistem penyedia air Jasa ekosistem pengaturan penjernihan air		

No	Tujuan dan Target	D3TLH	Dampak risiko LH	Jasa ekosistem	Tingkat Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Biodiversity
	hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.			Jasa ekosistem pengaturan penjernihan udara		
13	Penanganan perubahan iklim					
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Belum menyusun dokumen strategis pengurangan risiko bencana				
15	Ekosistem daratan	Daya dukung lahan surplus Daya dukung air surplus	Dampak: - Terpeliharanya jasa ekosistem penyedia air - Mencegah terjadinya bencana	Meliputi seluruh jasa ekosistem : jasa penyedia, jasa pengaturan, jasa budaya dan jasa pendukung	Meningkatkan adaptasi perubahan iklim	Biodiversity terjaga
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Target tidak terkait D3TLH	Target tidak terkait risiko LH	Target tidak terkait jasa ekosistem	Target tidak terkait perubahan iklim	Target tidak terkait biodiversity

Sumber : hasil analisis tim poja KLHS

BAB VI. REKOMENDASI KLHS
UNTUK RPJMD KABUPATEN
GORONTALO

BAB VI. RUMUSAN ALTERNATIF DAN REKOMENDASI KLHS UNTUK RPJMD KABUPATEN GORONTALO 2021-2026

6.1 Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Gorontalo periode 2021-2026 diperlukan upaya-upaya tambahan agar target yang ditetapkan bisa tercapai. Upaya tambahan diperlukan untuk pencapaian target kemiskinan, pendidikan dasar 9 tahun, penyediaan air bersih dan persampahan. Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan muatan daya dukung pangan dan penyediaan air, serta masalah persampahan ditunjukkan pada Tabel 58.

Tabel 58. Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan muatan daya dukung pangan dan penyediaan air, serta masalah persampahan di Kabupaten Gorontalo

Muatan	Daya dukung		Target TPB				Rekomendasi
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019	Target Nasional 2030	
Pangan	Melampaui untuk Kec. Tibawa, Limboto Barat, Telaga dan Telaga Biru	Melampaui untuk Kec. Tibawa, Limboto Barat, Telaga dan Telaga Biru	2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	NA	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%)	Menurun menjadi 0%	- Perlu pendataan pada indikator yang belum memiliki data - Terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Gorontalo melalui: ✓ Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan akses pangan masyarakat ✓ Pemantauan stabilitas harga bahan pokok ✓ Diversifikasi pangan ✓ Perlindungan lahan pertanian pangan melalui penetapan lahan LP2B ✓ Pengembangan kawasan agribisnis unggulan. ✓ Peningkatan SDM bidang pertanian dengan pengetahuan penambahan nilai atas produk pertanian dan jasa keuangan
			2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Kondisi Kabupaten Gorontalo mencapai 2,6%. Telah mencapai target nasional yaitu pada tahun 2019 menjadi 17%.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %)	Menurun menjadi 3,80%	
			2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	NA	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%)	Menurun menjadi 2,20%	

Muatan	Daya dukung		Target TPB				Rekomendasi
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019	Target Nasional 2030	
			2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	NA	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	NA	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gorontalo melalui: ✓ Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui distribusi sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gorontalo ✓ Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil serta penyuluhan kesehatan seksual dan reproduksi dan penyakit lainnya ✓ Program pemberian makanan tambahan bagi bayi dan anak balita ✓ Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
			2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	3,70	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun menjadi 0%	
			2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	14,68	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Menurun menjadi 0%	
			2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	3,1%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	
			2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.		Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Menurun menjadi 28%	
			2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	71%	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Meningkat menjadi 50%	
			2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	NA	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	

Muatan	Daya dukung		Target TPB				Rekomendasi
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019	Target Nasional 2030	
Air	BELUM MELAMP AUI Terdapat 46.361,1 hektar atau 21,3% lahan dalam wilayah Kabupaten Gorontalo memberikan daya dukung tinggi dan sangat tinggi dalam jasa penyediaan air. Kategori sedang seluas 96.116,2 hektar atau 44,1%, serta kategori rendah dan sangat rendah seluas 75.630,5 hektar atau 34,7%.	BELUM MELAMP AUI			kg/kapita/tahun).		
			2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rp. 1570/tenaga kerja	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	
			6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	82,79%	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat hingga 100%	Kebutuhan masyarakat akan air bersih terlayani melalui: ✓ Optimalisasi pemanfaatan air hujan sebagai sumber air baku ✓ Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, merata dan terjangkau ✓ Perlindungan semua kawasan ekosistem hutan dan DAS di Kabupaten Gorontalo ✓ Inventarisasi dan perlindungan ketersediaan sumber air baku ✓ Revitalisasi BUMD yang mengelola air minum ✓ Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan air bagi industri dan pertanian
			6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	290,5 liter/detik	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Meningkat menjadi 73 jumlah	
			6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	39,24%	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%)	Meningkat menjadi 100%	
			6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	NA	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Meningkat menjadi 100%	
			6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Belum operasional	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 100%	
			6.4.1.(b) Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	NA	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).	Meningkat menjadi 100%	

Muatan	Daya dukung		Target TPB				Rekomendasi
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019	Target Nasional 2030	
			6.5.1. (a)Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	DAS Limboto Bone Bolango (LBB)	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Ada	
			6.5.1.(f) Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau	NA	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	10 WS (skala nasional)	
Sampah	Timbulan sampah 46523 Ton/tahun	Perdiksi Tahun 2030 adalah 436.203 ton/tahun	11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	13,53% dari total sampah atau 6.972,24 ton/tahun	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%)	Meningkat menjadi 80%	Pengelolaan sampah terpadu: - . Pengembangan Rencana Penanganan Sampah Perkotaan dari tingkat sumber hingga tingkat kota - Pengembangan kerjasama pengelolaan sampah - Pengembangan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan dan aman terhadap risiko bencana - Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan - Pengembangan Bank Sampah di tingkat lingkungan/dusun /RT/RW - Pendidikan dini pengelolaan Sampah pada skala rumah tangga dan lingkungan di sekolah dan pesantren - Koordinasi antar instansi terkait dalam penyusunan peraturan, kebijakan, program dan penganggaran kegiatan pengelolaan limbah
			12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	NA	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Meningkat menjadi 20 ton per hari (skala nasional)	
			12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	875,58 ton/hari	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019.	20 ton per hari (skala nasional)	
			12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister	NA	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik	Meningkat	
			12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	NA	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menigkat/ada	

Muatan	Daya dukung		Target TPB				Rekomendasi
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2019	Target Nasional 2019	Target Nasional 2030	
			6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	65%	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat menjadi 100%	- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
			6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	81,42%	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	Terciptanya pemukiman yang aman, layak dan bersih: - Sosialisasi Kebersihan, Sanitasi dan Penataan Lingkungan Sehat, Aman dan Bersih
			6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Tota	160 Desa	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	- Sosialisasi Kebersihan dan Sanitasi serta pemberdayaan masyarakat di kawasan kumuh perkotaan
			6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	23 Desa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	- Pengadaan kawasan perumahan yang layak huni dan aman

6.2 Arah Kebijakan Kabupaten Gorontalo

6.2.1 Proses Penyusunan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang memuat target-target pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki serta menangani permasalahan yang ada, sehingga diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 - 2026, dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang melibatkan para pakar dan tenaga ahli yang sesuai dengan substansi yang dibutuhkan dalam RPJMD. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam forum konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk mendapatkan aspirasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mewujudkan rasa memiliki dokumen perencanaan pembangunan ini. Pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan proses pembahasan dilakukan bersama dengan DPRD; Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dilaksanakan melalui inventarisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang harus diimplementasikan oleh daerah dan diselaraskan dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo serta inventarisasi masukan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang harus diakomodir dalam RPJMD

Penyusunan RPJMD dilakukan berbasis pada penerapan e-planning melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 disusun secara berkesinambungan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:

1) Persiapan Penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program OPD dan lintas OPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3) Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

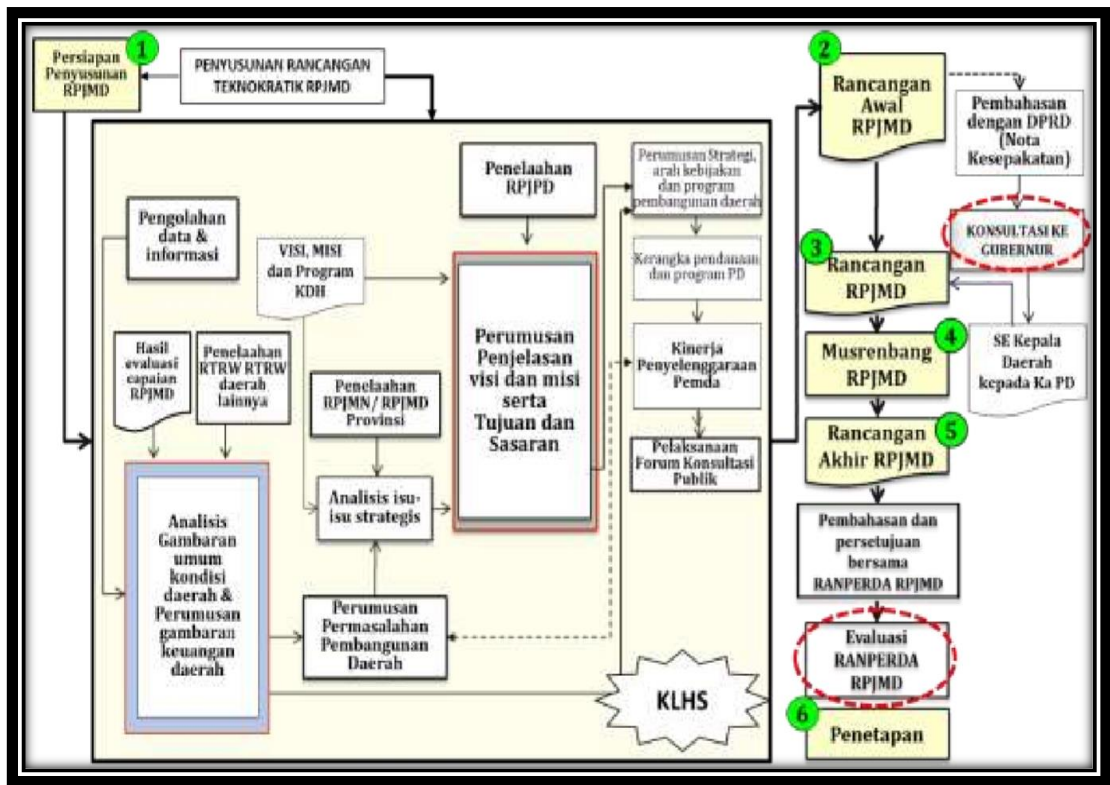
Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kabupaten Gorontalo. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Gorontalo menjadi rancangan akhir RPJMD Kabupaten Gorontalo.

5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala PD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Gorontalo diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Gorontalo.

6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Tahapan ini meliputi proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah.



Gambar 54. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo

6.2.2 Arahan Rekomendasi Visi, Misi untuk RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026

Visi RPJPD Kabupaten Gorontalo 2011-2026

Perumusan RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026 mengacu pada RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 – 2025. Visi jangka panjang Kabupaten Gorontalo yang ingin diwujudkan kedepan adalah **“Kabupaten Gorontalo Sejahtera dan Mandiri”** Untuk dapat memahami maksud yang ingin dicapai oleh visi tersebut maka sebelumnya perlu dipahami makna dari setiap kata yang ingin diwujudkan sebagai berikut :

- **Sejahtera** berarti keadaan masyarakat yang baik, sehat, berkecukupan, aman dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- **Mandiri** adalah masyarakat yang mampu menata sendiri kehidupannya dengan tidak bergantung pada pihak lain, tetapi tetap memelihara hubungan yang dilandasi prinsip Kesetaraan (*equality*), Kesetiakawanan Sosial (*solidarity*), Keadilan (*justice*), dan Keterbukaan (*transparency*).

Visi daerah ini walaupun terlihat abstrak, bukan berarti tidak dapat dibuktikan perwujudannya. Periode pencapaian visi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan diperlukan penetapan sasaran sebagai fokus utama pada setiap tahapan pencapaiannya. Terdapat beberapa gambaran umum atas kondisi daerah yang dapat dijadikan indikator terwujudnya visi :

- Kemampuan mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi daerah. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Kemandirian suatu daerah tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; semakin berkurangnya ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.
- Kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terjangkau dan merata dalam semua aspek kehidupan. Pemenuhan kebutuhan tersebut meliputi keterjangkauan kebutuhan pokok yakni ketahanan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar serta sarana prasarana umum yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan. Gambaran kesejahteraan juga terlihat dari angka perekonomian yang terus bertumbuh, angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin menurun, semakin meningkatnya produktivitas daerah serta kehidupan yang aman dan damai.

Misi RPJPD Kabupaten Gorontalo 2011-2026

Untuk merealisasikan visi, perlu ditetapkan misi sebagai amanat yang diemban demi suksesnya visi yang telah ditetapkan. Adapun misi untuk mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

Misi :

- Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
- Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan fungsi dan daya dukung lingkungan

Misi yang diemban untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah melalui peningkatan produktivitas daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial, sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk kesetaraan gender serta dengan menjaga keseimbangan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Sedangkan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing adalah dengan mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; dan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan yang semakin prima. Agenda untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, serta kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan.

Berdasarkan hasil analisis tim KLHS, hasil FGD dan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan diperoleh arah tujuan pembangunan berkelanjutan yang berada di level 6 di Kabupaten Gorontalo adalah kemiskinan, pendidikan, air bersih dan sanitasi layak, energy bersih dan industry, inovasi dan infrastruktur (lihat Gambar 26). Kesenjangan terbesar pencapaian TPB berada pada pilar sosial dan lingkungan hidup.

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Gorontalo dan hasil analisis KLHS, maka visi dan misi Kabupaten Gorontalo akan berfokus pada :

1. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada tahap ini ditandai dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan, terpenuhinya jaminan social ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Terwujudnya kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain ditandai oleh struktur perekonomian yang semakin maju dan kokoh. UMKM diharapkan sudah dapat menguasai jaringan bisnis yang luas, yakni ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis.

2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia di Kabupaten Gorontalo

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan adanya peningkatan APM dan APK SD/MI, SMP/MTs, peningkatan kualitas, distribusi merata sarana dan prasarana pendidikan, penurunan angka penyalahgunaan narkoba serta merokok pada anak dan inetgrasi budaya lokal dalam muatan pendidikan.

3. Mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan

Upaya untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan ditandai dengan terjaganya kualitas air baku, peningkatan kapasitas sumber air baku, menurunnya lahan-lahan kritis dan bencana di Kabupaten Gorontalo. Tersedianya system pengelolaan limbah secara terpusat, instalasai pengolahan limbah tinja, serta terciptanya sanitasi lingkungan yang baik.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif

Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Meningkatnya pelayanan public, system informasi bagi public serta meningkatnya inovasi daerah

Selain memperhatikan RPJPD, RPJMD juga disusun dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan sektoral wilayah, program pengembangan wilayah, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

6.3 Rumusan Alternatif dan Rekomendasi Berdasarkan Sasaran Visi dan Misi RPJMD

Rumusan alternatif dan rekomendasi untuk RPJMD Kabupaten Gorontalo diuraikan pada Tabel 59.

Tabel 59. Rumusan alternatif rekomendasi KRP Kabupaten Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo yang meliputi: TPB 1: tanpa kemiskinan TPB 2: tanpa kelaparan TPB 3: kehidupan sehat sejahtera TPB 8: pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi TPB 9: Inovasi, industry dan infrasturktur TPB 10 : berkurangnya kesenjangan	- Penurunan tingkat kemiskinan - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Terpenuhinya jaminan social ketenagakerjaan - Pertumbuhan ekonomi yang meningkat - Terwujudnya kegiatan usaha yang berdaya saing antara lain ditandai oleh struktur perekonomian yang semakin maju dan kokoh. UMKM diharapkan sudah dapat menguasai jaringan bisnis yang luas, yakni ditunjukkan dengan adanya integrasi vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis	- Persentase penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional 17,56% - Proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan 82,8% - Insiden penyakit meningkat - Kunjungan wisatawan menurun - Total pendapatan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 33,7% - Belum terjaminnya masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro - Masih kurangnya pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	- Meningkatkan akses UMKM pada jasa keuangan, teknologi informasi dan perdagangan - Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan jaminan kesehatan untuk seluruh kalangan, khususnya masyarakat miskin - Peningkatan kesempatan kerja secara terbuka tanpa diskrimnasi - Peningkatan promosi pariwisata daerah - Peningkatan manajemen distribusi pengelolaan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) - Meningkatkan ketahanan masyarakat rentan dengan infrastruktur penunjang - Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan - upaya peningkatan kemandirian fiscal dapat dicapai dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah - perlu dilakukan penataan dan peningkatan fasilitas layanan umum untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah - perlu dilakukan pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk lebih mengoptimalkan capaian pajak daerah	- Peningkatan manajemen distribusi pengelolaan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) - Meningkatkan ketahanan masyarakat rentan dengan infrastruktur penunjang - Peningkatan kemandirian fiscal dapat dicapai dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah - perlu dilakukan penataan dan peningkatan fasilitas layanan umum untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah - perlu dilakukan pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk lebih mengoptimalkan capaian pajak daerah - efisiensi belanja operasi agar dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah - pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial mengingat anggaran untuk fungsi ini terkait dengan masyarakat penyandang masalah social yang sangat rentan dengan kemiskinan - mengingat keterbatasan APBD, maka pemerintah daerah harus mampu memobilisasi dana – dana non APBD untuk turut mengintervensi pelaksanaan pembangunan daerah, misalnya dari filantropi

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
			- efisiensi belanja operasi agar dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah - pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial mengingat anggaran untuk fungsi ini terkait dengan masyarakat penyandang masalah social yang sangat rentan dengan kemiskinan - mengingat keterbatasan APBD, maka pemerintah daerah harus mampu memobilisasi dana – dana non APBD untuk turut mengintervensi pelaksanaan pembangunan daerah.	
Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia di Kabupaten Gorontalo yang meliputi: TPB 4 : pendidikan yang berkualitas	- Peningkatan APM dan APK SD/MI, SMP/MTs, - Peningkatan kualitas, distribusi merata sarana dan prasarana pendidikan - Menurunnya angka penggunaan narkoba dan merokok pada anak - Pelestarian budaya lokal melalui integrasi budaya lokal dalam muatan kurikulum pendidikan	- APK SMP/MTs belum mencapai target nasional - Terjadi peningkatan prevalensi penyalahgunaan penggunaan narkoba - Meningkatnya angka merokok pada anak dibawah 18 tahun - Masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi	- Mengembangkan sistem pendidikan yang mengarah pada pembentukan kepribadian berakhlak mulia - Mempermudah akses terhadap fasilitas pendidikan character building bagi semua kalangan - Optimalisasi penanaman pendidikan karakter sejak dini di lingkungan keluarga - Pengembangan lingkungan masyarakat dengan budaya yang kondusif bagi pembangunan karakter berbasis akhlak mulia - Peningkatan kualitas Program Wajib belajar pendidikan	- Meningkatkan kualitas pengajar dan mutu pendidikan, perbaikan dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pendidikan yang inklusif dan merata, pelaksanaan program wajib pendidikan dasar Sembilan tahun, serta tersosialisasinya arahan mengenai pentingnya pendidikan. - Meningkatkan kuantitas maupun kualitas lembaga kependidikan keagamaan; meningkatkan kesadaran dan peran serta orang tua, tenaga pengajar dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan keagamaan sejak dini. Serta mengembangkan penerapan

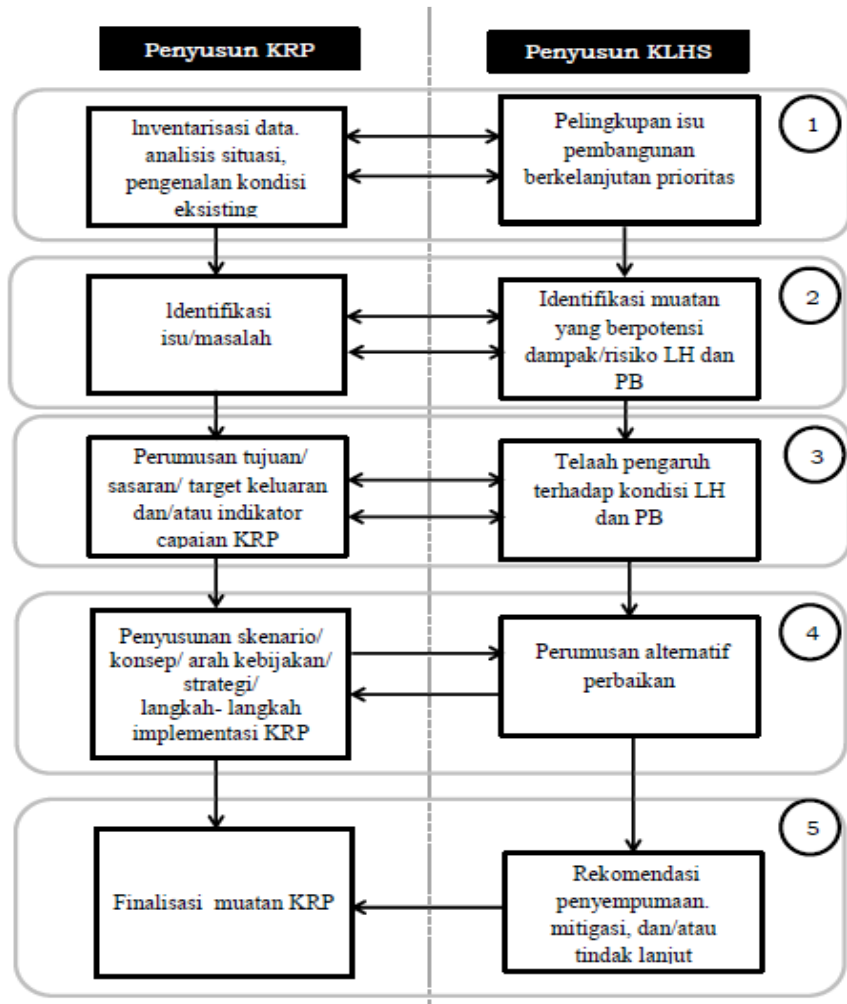
Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
			dasar (dikdas) sembilan tahun - Perbaikan bangunan sekolah dan penyediaan bantuan operasional sekolah dan/ atau madrasah - Peningkatan mutu pendidik dan tendaga kependidikan - Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan dasar untuk semua kalangan - Peningkatan kualitas pendidikan sesuai standar nasional - Pengembangan nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan	pengamalan akhlak mulia dalam ruang public - Melestarikan dan mengembangkan nilai kebudayaan lokal dalam sistem pendidikan dan berbagai kegiatan masyarakat, mempromosikan budaya dan produk lokal baik di dalam maupun di luar Kabupaten Gorontalo
Mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, yang meliputi: TPB 6: air bersih dan sanitasi layak TPB 7: Energi bersih dan terjangkau TPB 11: kota dan pemukiman berkelanjutan TPB 12: konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab TPB 13: penanganan perubahan iklim TPB 15: ekosistem daratan	- Terjaganya kualitas air baku, peningkatan kapasitas sumber air baku, - Menurunnya lahan-lahan kritis dan bencana di Kabupaten Gorontalo. - Tersedianya system pengelolaan limbah secara terpusat, instalasai pengolahan limbah tinja - Terciptanya sanitasi lingkungan yang baik	- Kualitas air baku sumber air bersih cemar ringan - Frekuensi kejadian banjir dan longsor semakin meningkat - IPLT belum berfungsi secara optimal - IPAL komunal belum berfungsi secara optimal - Masih terdapat 182 desa dari total 191 desa di Kabupaten Gorontalo yang belum melaksanakan program Stop Buang Air Besar - Masih terdapat 45 desa yang belum melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB) - Masih terdapat 18,58% rumah tangga di Kabupaten Gorontalo yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak	- Pemeliharaan sumber2 air baku (sungai, mata air), penanaman pohon di sepanjang hulu dan bantaran sungai (naturalisasi sungai) - Penyusunan kajian pengurangan risiko bencana dan kajian kerentanan iklim terhadap bahaya terkait iklim, cuaca, dan bencana alam yang inklusif bagi masyarakat terutama anak-anak, perempuan dan kelompok difabel - Pembangunan Septic tank dan ipal komunal di kawasan padat hunian - Penyusunan kebijakan manajemen dan kerjasama pengelolaan sampah antar daerah	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga kualitas air, udara serta tingkat tutupan lahan. - Meningkatkan konservasi air untuk menjaga dan memelihara ketersediaan air, meningkatkan pemanfaatan air permukaan dan sumber air non tanah untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air. - Mengadakan dan meningkatkan akses air minum bersih secara merata yang disertai dengan pengelolaan air limbah dan efisiensi penggunaan air secara terpadu di semua sector - Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap air minum bersih,

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
		- Masih terdapat 35% populasi yang belum memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air - Proporsi penduduk yang memiliki akses air minum aman dan berkelanjutan masih rendah (37,32%) - Belum adanya Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Gorontalo	- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, termasuk di dalamnya pembangunan TPA ramah lingkungan dan aman terhadap risiko bencana - Melakukan kajian risiko bencana di Kabupaten Gorontalo	sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi semua kalangan - Melakukan kajian risiko bencana di Kabupaten Gorontalo - Menyediakan fasilitas layan untuk korban bencana social
Mewujudkan pemerintahan yang baik (good goverance) dan inovatif, yang meliputi: TPB 16: perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh TPB 17: kemitraan untuk mencapai tujuan	- Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. - Meningkatnya pelayanan public dan system informasi bagi public - Meningkatnya inovasi daerah	- Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah di setiap tingkatan - Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo - Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas - Belum optimalnya akses terhadap informasi publik. - Belum optimalnya ketersediaan data mengenai penggunaan dan keterjangkauan layanan akses telekomunikasi dan internet - Belum optimalnya perangkat daerah yang memanfaatkan informasi dan teknologi untuk membangun pemerintahan berbasis elektronik	- Peningkatan kualitas laporan kinerja - Peningkatan Pelaksanaan reformasi birokrasi - Peningkatan sinergitas dan koordinasi pemerintah daerah di setiap tingkatan - Peningkatan partisipasi publik dalam berbagai kegiatan pembangunan, dari perencanaan hingga pengawasan - Pengukuran tingkat kualitas pelayanan publik dan pengukuran kepuasan masyarakat - Penyediaan platform dan penyampaian informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat - Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa untuk publik - Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi oleh Perangkat Daerah dengan baik	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk terwujudnya birokrasi bersih, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi. - Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memenuhi strandar pelayanan sesuai dengan Undangundang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, akses publik terhadap informasi bagi semua

6.4 Integrasi Rekomendasi KLHS ke Dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021 – 2026

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memastikan termuatnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021 – 2026, sekaligus sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Proses integrasi sebagai diamanahkan oleh Permen LHK NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 ditunjukkan pada Gambar 64.



Gambar 55. Proses integrasi hasil KLHS ke dalam muatan KRP

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, penyusunan RPJMD harus dilengkapi dengan proses penyusunan KLHS. Oleh karena itu, isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Tim Penyusun melalui proses pelaksanaan KLHS akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD. Pada penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026, KLHS dilakukan terhadap dokumen utama Rencana Teknokratik Kabupaten Gorontalo dengan dilengkapi analisis atas Visi, Misi dan Program Bupati Terpilih 2021-2026 yang telah dijabarkan menjadi

rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan. Rekomendasi KLHS menjadi bahan pertimbangan bagi bupati dan seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program. Rekomendasi yang disetujui akan diinstruksikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk diintegrasikan sebagai perbaikan terhadap rancangan dokumen perencanaan yang sudah ada. Secara khusus tindak lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi yang sudah dirumuskan pada Bab 6 ini adalah sebagai berikut:

- Gambaran kondisi umum terutama daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dituangkan dalam BAB II RPJMD tentang Gambaran Kondisi Daerah
- Revisi dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam RPJMD berdasarkan rekomendasi KLHS yang dirumuskan pada subbab 6.2 dan 6.3 oleh Perangkat Daerah terkait. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan arahan kebijakan, sasaran pokok dan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran RPJMD memuat rekomendasi KLHS
- Penjabaran RPJMD ke dalam KRP dengan berpedoman pada rekomendasi KLHS yang dirumuskan pada subbab 6.2 dan 6.3 oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan sasaran, kegiatan dan indikator kinerja memuat rekomendasi KLHS. Matriks penelaahan integrasi KLHS dan RPJMD, yang menunjukkan tindak lanjut penyempurnaan kebijakan, ditampilkan pada Tabel 56.

KLHS RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021 – 2026 diintegrasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Gorontalo dengan menjadikannya pertimbangan penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021 – 2026 terutama dalam penyusunan sasaran pokok dan arah kebijakan pada setiap misi. Integrasi dimuat dalam Lampiran RPJMD dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021 – 2026. Bagian yang diadaptasi dari KLHS meliputi:

- Permasalahan di Kabupaten Gorontalo yang sudah selaras dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMD namun belum menjadi fokus dalam RPJMD.
- Rumusan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap atau kesenjangan pada kebijakan pembangunan RPJMD.
- Gambaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah selaras dan diakomodasi dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2021 – 2026

Tabel 60. Matriks penelaahan integrasi KLHS dalam RPJMD

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dana rah kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1: Mengakhiri segala bentuk kemiskinan	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	- Meningkatkan akses jaminan sosial dan kesehatan, akses terhadap pelayanan dasar untuk masyarakat miskin,	- Persentase penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional 17,56% - Proporasi SJSN 82,8%	- Persentase penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional 17,56% - Proporsi jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan 82,8% - Total pendapatan untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan sebesar 33,7% - Belum terjaminnya masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar dan jasa keuangan yang	Tertuang dalam Misi 1: Manusia tangguh dan produktif Tertuang dalam Tujuan 1.1: Insan sehat dan cerdas Tujuan 1.2: SDM berkarakter dan kompetitif		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	1.3.1(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	- Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; mengadakan pendidikan dan ketrampilan bagi masyarakat miskin khususnya golongan pemuda dan orang dewasa; - Peningkatan pemberian kesempatan pendidikan wajib belajar bagi masyarakat miskin; dan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.					

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
				tepat, termasuk keuangan mikro - Masih kurangnya pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan			
Tujuan 2: tanpa kelaparan	2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	- Peningkatan manajemen distribusi pengelolaan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) - Meningkatkan ketahanan masyarakat rentan dengan infrastruktur penunjang - perlu dilakukan pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk lebih mengoptimalkan capaian pajak daerah		Kejadian mal nutrisi pada anak meningkat	Misi 3: Ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas Tujuan: 3.1 Ketahanan pangan berkelanjutan		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
		- pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial mengingat anggaran untuk fungsi ini terkait dengan masyarakat penyandang masalah social yang sangat rentan dengan kemiskinan - mengingat keterbatasan APBD, maka pemerintah daerah harus mampu memobilisasi dana – dana non APBD untuk turut mengintervensi pelaksanaan pembangunan daerah, misalnya dari filantropi					
Tujuan 3: kehidupan sehat sejahtera	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 3.3.2(a) Insiden Tuberkulosis (ITB)	- Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar dan jaminan kesehatan untuk seluruh kalangan, khususnya masyarakat miskin	- Angka kematian bayi meningkat - Insiden penyakit meningkat	- Angka kematian pada bayi cenderung meningkat dari tahun ke tahun - Angka kematian neonatal meningkat - Kejadian malaria dan TB meningkat	Tertuang dalam Misi I: Manusia tangguh dan produktif Tujuan : 1.1. Insan cerdas dan sehat		- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dana rah kebijakan	Program Unggulan
	per 100.000 penduduk. 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.						Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Tujuan 4: pendidikan berkualitas	4.1.1(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 4.1.1(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	- Meningkatkan kualitas pengajar dan mutu pendidikan, perbaikan dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pendidikan yang inklusif dan merata, pelaksanaan program wajib pendidikan dasar Sembilan tahun, serta tersosialisasinya arahan mengenai pentingnya pendidikan. - Meningkatkan kuantitas maupun kualitas lembaga kependidikan keagamaan; meningkatkan kesadaran dan peran serta orang tua, tenaga pengajar dan	Masih terdapat sekolah yang tidak terakreditasi Angka partisipasi kasar SMP belum mencapai target	Kurang meratanya akses terhadap pendidikan untuk semua anak perempuan dan laki-laki	Tertuang dalam Misi I: Manusia tangguh dan produktif Tujuan : 1.2. Insan cerdas dan sehat 1.3. SDM berkarakter dan kompetitif		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
		masyarakat dalam peningkatan pendidikan keagamaan sejak dini. Serta mengembangkan penerapan pengamalan akhlak mulia dalam ruang public - Melestarikan dan mengembangkan nilai kebudayaan lokal dalam sistem pendidikan dan berbagai kegiatan masyarakat, mempromosikan budaya dan produk lokal baik di dalam maupun di luar Kabupaten Gorontalo					
Tujuan 5 Kesenjangan Gender	5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Perlu dilakukan pendataan	Tidak ada data	Kurangnya partisipasi penuh dan efektif, serta kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mendukung SDM dalam setiap OPD Kasus kekerasan seksual perempuan dan kekerasan terhadap anak terjadi di Kabupaten Gorontalo	Tertuang dalam Misi 1: Manusia tangguh dan produktif TUjuan : 1.2.3.Pemenuhan hak perempuan dan anak		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 6: Air bersih dan sanitasi layak	6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 6.1.1(b) kapasitas prasarana air baku 6.1.1(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga kualitas air, udara serta tingkat tutupan lahan. - Meningkatkan konservasi air untuk menjaga dan memelihara ketersediaan air, meningkatkan pemanfaatan air permukaan dan sumber air non tanah untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air. - Mengadakan dan meningkatkan akses air minum bersih secara merata yang disertai dengan pengelolaan air limbah dan efisiensi penggunaan air secara terpadu di semua sector - Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap air	- Masih terdapat 17,3% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	Belum mencapai target	Tujuan: 4. 2. Air Minum dan Sanitasi Layak Bagi Masyarakat		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dana rah kebijakan	Program Unggulan
		minum bersih, sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi semua kalangan - Melakukan kajian risiko bencana di Kabupaten Gorontalo - Menyediakan fasilitas layan untuk korban bencana social					
Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	8.9.1(a) Jumlah wisatawan mancanegara.	- Peningkatan manajemen distribusi pengelolaan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) - Meningkatkan ketahanan masyarakat rentan dengan infrastruktur penunjang - Peningkatan kemandirian fiscal dapat dicapai dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah - perlu dilakukan penataan dan peningkatan fasilitas layanan umum untuk meningkatkan		Kunjungan wisatawan mancanegara menurun	Misi 3: Ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas Tujuan 3.2 Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dana rah kebijakan	Program Unggulan
		penerimaan retribusi daerah - perlu dilakukan pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk lebih mengoptimalkan capaian pajak daerah - efisiensi belanja operasi agar dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah - pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial mengingat anggaran untuk fungsi ini terkait dengan masyarakat penyandang masalah social yang sangat rentan dengan kemiskinan mengingat keterbatasan APBD, maka pemerintah daerah harus mampu memobilisasi dana – dana non APBD untuk turut mengintervensi pelaksanaan pembangunan daerah, misalnya dari filantropi					

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dana rah kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. 9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	- Meningkatkan akses UMKM pada jasa keuangan, teknologi informasi dan perdagangan - Peningkatan kesempatan kerja secara terbuka tanpa diskrimnasi	Proporsi tenaga kerja pada industry manufaktur menurun	Akses UMKM pada layanan jasa keuangan masih terbatas	Misi 4 : Meningkatkan Infrastruktur Wilayah Membuka Konektivitas Tujuan: 4. 1. Infrastruktur Dasar dan ekonomi wilayah terbangun		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial
Tujuan 10: berkurangnya kesenjangan	10.1.1(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	- Peningkatan manajemen distribusi pengelolaan zakat infaq dan shadaqah (ZIS) - Meningkatkan ketahanan masyarakat rentan dengan infrastruktur penunjang - perlu dilakukan penataan dan peningkatan fasilitas layanan umum untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah - pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial mengingat anggaran untuk fungsi ini terkait	Presentasi kemiskinan di Kabupaten Gorontalo masih tinggi	Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan masih tingginya koefisien gini yang menunjukkan besarnya kesenjangan sosial di Kab Gorontalo	Tertuang dalam Misi 3: Ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas Tujuan: 3. 2. Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dana rah kebijakan	Program Unggulan
		dengan masyarakat penyandang masalah social yang sangat rentan dengan kemiskinan - mengingat keterbatasan APBD, maka pemerintah daerah harus mampu memobilisasi dana – dana non APBD untuk turut mengintervensi pelaksanaan pembangunan daerah, misalnya dari filantropi					
Tujuan 11: Kota dan pemukiman berkelanjutan	11.1.1(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga kualitas air, udara serta tingkat tutupan lahan. - Meningkatkan konservasi air untuk menjaga dan memelihara ketersediaan air, meningkatkan pemanfaatan air permukaan dan sumber air non tanah untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan air. - Mengadakan dan meningkatkan akses air minum	Sampah yg tertangani masih 13,4% Belum adanya dokumen strategis pengurangan risiko bencana		Tertuang dalam tujuan: 4.3. Perumahan Sehat, produktif dan ramah lingkungan		Program Pengembangan Perumahan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
		bersih secara merata yang disertai dengan pengelolaan air limbah dan efisiensi penggunaan air secara terpadu di semua sector - Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap air minum bersih, sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi semua kalangan - Melakukan kajian risiko bencana di Kabupaten Gorontalo - Menyediakan fasilitas layanan untuk korban bencana social					
Tujuan 12: konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap air minum bersih, sanitasi, dan kebersihan			Tertuang dalam tujuan: 5.2.1. Limbah tertangani dengan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, Recycle)		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan

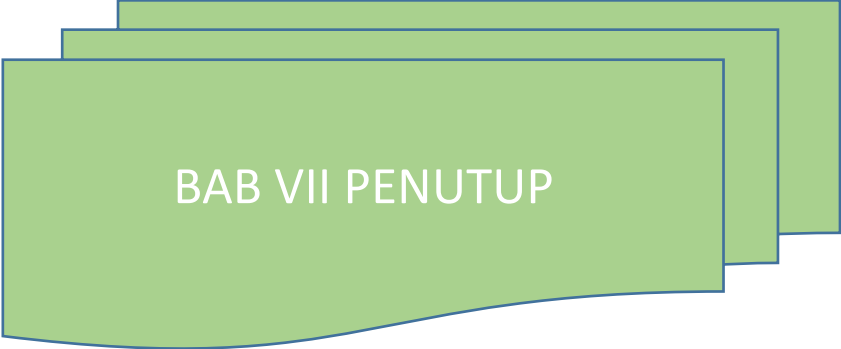
Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
		yang memadai bagi semua kalangan					Limbah Bahan Berbahaya beracun Program Pengelolaan Persampahan
Tujuan 13: penanganan perubahan iklim	13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga kualitas air, udara serta tingkat tutupan lahan. - Melakukan kajian risiko bencana di Kabupaten Gorontalo - Menyediakan fasilitas layanan untuk korban bencana social	Belum tersedia dokumen strategis pengurangan risiko bencana (PRB)	Kurangnya kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya yang terkait iklim dan bencana alam karena belum adanya dokumen pengurangan risiko bencana serta kurang mendukungnya infrastruktur untuk mitigasi bencana , misalnya early warning system	Tertuang dalam Misi 5 : Pembangunan Berbasis Kependudukan & Adaptasi Perubahan Iklim Tujuan : 5.1. Resiko bencana alam Minim		Program Penanggulangan Bencana Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Tujuan 15: ekosistem daratan	15.3.1(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga kualitas air, udara serta tingkat tutupan lahan. - Meningkatkan konservasi air untuk menjaga dan memelihara ketersediaan air, meningkatkan pemanfaatan air permukaan dan sumber air non tanah untuk	Program rehabilitasi masih rendah	Adanya lahan dan tanah kritis akibat adanya alih fungsi lahan ke permukiman dan bangunan.	Tertuang dalam tujuan: 5. 2. Kerusakan sumber daya alam Berkurang		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dana rah kebijakan	Program Unggulan
		- menjaga keberlanjutan ketersediaan air. - Mengadakan dan meningkatkan akses air minum bersih secara merata yang disertai dengan pengelolaan air limbah dan efisiensi penggunaan air secara terpadu di semua sector - Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap air minum bersih, sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi semua kalangan - Melakukan kajian risiko bencana di Kabupaten Gorontalo - Menyediakan fasilitas layan untuk korban bencana social					
Tujuan 16: Perdamaian,	16.6.1* Proporsi pengeluaran utama	- Peningkatan kemandirian fiscal dapat dicapai	Proporsi pengeluaran utama	Kurangnya partisipasi	Tertuang dalam Misi 2:		

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan arah kebijakan	Program Unggulan
keadilan dan kelembagaan yang tangguh	pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah - perlu dilakukan penataan dan peningkatan fasilitas layanan umum untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah - perlu dilakukan pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk lebih mengoptimalkan capaian pajak daerah - efisiensi belanja operasi agar dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah - pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial mengingat anggaran untuk fungsi ini terkait dengan masyarakat penyandang masalah social yang sangat rentan dengan kemiskinan - mengingat keterbatasan APBD,	pemerintah terhadap anggaran yang disetujui menurun	pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan	Tata kelola pemerintahan bersih, dinamis dan terpercaya Tujuan: 2.1 Kinerja birokrasi dan pelayanan publik Meningkat 2. 2. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya 2. 3. Pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan		

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dana rah kebijakan	Program Unggulan
		maka pemerintah daerah harus mampu memobilisasi dana – dana non APBD untuk turut mengintervensi pelaksanaan pembangunan daerah, misalnya dari filantropi					
Tujuan 17: kemitraan untuk mencapai tujuan	17.1.1(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	- Peningkatan kemandirian fiskal dapat dicapai dengan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah - perlu dilakukan penataan dan peningkatan fasilitas layanan umum untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah - perlu dilakukan pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk lebih mengoptimalkan capaian pajak daerah - efisiensi belanja operasi agar dapat meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah	Rasio penerimaan pajak daerah masih 0,24%		Tertuang dalam Misi 2: Tata kelola pemerintahan bersih, dinamis dan terpercaya Tujuan: 2.1 Kinerja birokrasi dan pelayanan publik Meningkat 2. 2. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya 2. 3. Pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan		

Tujuan	Indikator	Integrasi dalam RPJMD					
		Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dana rah kebijakan	Program Unggulan
		- pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk Fungsi Perlindungan Sosial mengingat anggaran untuk fungsi ini terkait dengan masyarakat penyandang masalah social yang sangat rentan dengan kemiskinan mengingat keterbatasan APBD, maka pemerintah daerah harus mampu memobilisasi dana – dana non APBD untuk turut mengintervensi pelaksanaan pembangunan daerah, misalnya dari filantropi					



BAB VII PENUTUP

BAB VII. PENUTUP

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang ditujukan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Gorontalo, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KLHS ini disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan isu pembangunan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap KRP. KLHS ini disusun dengan sasaran untuk:

1. Tersedianya analisis mengenai pengaruh kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo terhadap kondisi dan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan di Kabupaten Gorontalo
2. Tersedianya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo
3. Tersedianya rekomendasi perbaikan dan/atau revisi kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo
4. Tersedianya analisis dan alternatif rekomendasi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dapat dijadikan rujukan dan diadopsi dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Hasil kajian lingkungan hidup strategis diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi pencapaian TPB di Kabupaten Gorontalo diperoleh 66 indikator (30%) indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional. Indikator yang telah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional berjumlah 56 indikator (25,45%). Indikator yang belum dilaksanakan berjumlah 15 indikator (6,82%). Indikator yang belum ada data sejumlah 83 indikator (37.73%).
- Alternatif kebijakan berjumlah 37 alternatif dan 20 rekomendasi untuk RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Alayli, M. A. (2005, December 4). *Resource Rich Countries and Weak Institutions: The Resource Curse Effect*. Retrieved Juli 30, 2021, from Wayback Machine: https://web.archive.org/web/20110612124421/http://are.berkeley.edu/course/s/EEP131/fall2006/NotableStudent05/Resource%20CurseM_Alayli.pdf
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2020). *Provinsi Gorontalo dalam Angka Tahun 2020*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.
- BALITBANG Kabupaten Gorontalo. (2020). *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo*. Limboto: Balitbang Kabupaten Gorontalo.
- BAPPEDA Kabupaten Gorontalo. (2021). *Laporan RPJMD Teknokratik Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026*. Limboto: BAPPEDA Kabupaten Gorontalo.
- BPS Kabupaten Gorontalo. (2019). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2019*. Limboto: BPS Kabupaten Gorontalo.
- BPS Kabupaten Gorontalo. (2020). *Kabupaten Gorontalo dalam Angka Tahun 2020*. Limboto: BPS Kabupaten Gorontalo.
- De Groot, R. (1992). *Evaluation of Environmental Functions as a Tool in Planning, Management and Decision-Making*. Thesis, Wageningen.
- Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo. (2012). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo 2012-2032*. Limboto: Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.
- Dirjen Bina Pembangunan Daerah. (2019). *MEMASTIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI KLHS RPJMD*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Djuwita, F. (2019). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam UU No. 32 Tahun 2009*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Gorontalo, B. K. (2021). *RPJMD Teknotkratik Kabupaten Gorontalo 2021-2026*. Limboto: BAPPEDA.
- Murdiyarso, D. (2005). *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*. Jakarta: Buku Kompas.
- Muta'ali. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.
- Nastiti, A., Kusumah, S. W., Monica, A., & Phanjaya, D. (2019). *Muatan Perhitungan Risiko Lingkungan dalam KLHS*. Bandung: PSLH ITB.
- Paino, C. (2016, Agustus 16). *Menanti Kunjungan Burung Migran di Danau Limboto*. Retrieved from Mongabay Situs Berita Lingkungan: <https://www.mongabay.co.id>

- RI, K. L. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Subandi, E. L., Widiatmaka, & Ardiansyah, M. (2019). Saptial modeling of paddy fields in Gorontalo Regency, Indonesia. *ISenREM 2019*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR : 69 /11/I/2021

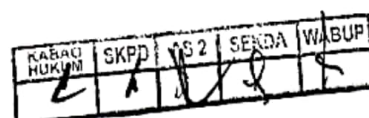
TENTANG
PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA), TIM AHLI, MODERATOR DAN
SEKRETARIAT PADA KEGIATAN PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN
GORONTALO
TAHUN 2021-2026

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program;
- b. bahwa sesuai dengan peran Pemerintah Daerah dalam menjamin keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan di daerah, maka dilakukan upaya peningkatan koordinasi dan merumuskan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam Kajian Lingkungan Hidup Daerah (KLHS) di daerah, maka perlu menetapkan tim yang bertugas dan bertanggung jawab pada kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja (POKJA), Tim Ahli, Moderator, Dan Sekretariat Pada Kegiatan Penyusun

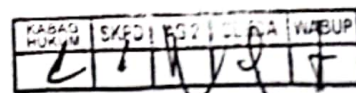
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara. Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 729);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati



Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

2. Telaahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo Nomor 660/DLH-SDA/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo 2021-2026 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Kelompok Kerja (POKJA), Tim Ahli, Moderator Dan Sekretariat Pada Kegiatan Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a mengumpulkan data yang dibutuhkan;
 - b melakukan kajian pembangunan berkelanjutan;
 - c melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan;
 - d melakukan FGD untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak; dan
 - e melakukan penjaminan kualitas, validasi dan pendokumentasian.
 - f bertindak sebagai penjembatan, penengah, pemandu, dan pengendali pada pelaksanaan kegiatan;
 - g memandu jalannya acara pada pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KABAG HIDUP	SKPD	AS 2	SEKDA	WASUP
				

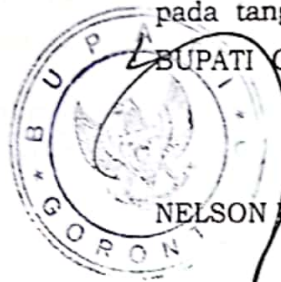
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 DPA Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 69/U/1/2021

**TENTANG : PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)
TIM AHLI, DAN MODERATOR PENYUSUN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN
2021-2026**

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA), TIM AHLI, DAN MODERATOR
PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

- I. Pengarah : Bupati Gorontalo
- II. Ketua : Rahmat Dony Lahatic, SE,.MH (Asisisten Perekonomian dan Pembangunan)
- III. Wakil Ketua I : Syaiful Kiraman, SE,.ME (Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo)
- IV. Wakil Ketua II : Drs. Cokro R. Katili, ME (Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo)
- IV. Sekretaris : DR. Bambang Suprianto, M.Pd (Unsur Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo)
- V. Anggota :
 - 1. Pokja I Pembangunan Sosial
 - 1. Muslichin Yusuf Mahmud, SH,.MH (Unsur Dinas Pelkerjaan Umum dan PR Kabupaten Gorontalo)
 - 2. Mohamad Bayu Musa, SE,.MM (Unsur Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo)
 - 3. Fatma Yeni Geruh, S.Sos (Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo)
 - 4. Elvis D. Eyato, SKM (Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo)
 - 5. Novi Oktavianti Nasir, STP,.M.Si (Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo)

2. Pokja II Pembangunan Ekonomi
 1. Rismawaty Arsyad, SE,.M.Si (Koordinator, Unsur Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo)
 2. Dedy Setiady Jahya, S.Hut,.M.Si (Unsur Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo)
 3. Edi Winarto (Unsur Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo)
 4. Ronny Limonu, S.Sos (Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo)
 3. Pokja III Pembangunan Lingkungan
 1. Winansih Kadir, SP,.M.Si (Koordinator, Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo)
 2. D. Israaq Purnama R. S.IP (Unsur BPBD Kabupaten Gorontalo)
 3. Golfred Kojongkam, ST (Unsur Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo)
 4. Warman Kasim, SE (Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo)
 4. Pokja IV Pembangunan Hukum dan Tata Kelola
 1. Anita Hippy, SH (Koordinator, Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo)
 2. DJustin M. Ibrahim, SH (Unsur Bagian Hukum Kabupaten Gorontalo)
 3. Mohammad Faqih Isa, ST (Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo)
 4. Makmur, S.Si (Unsur Badan Perencanaan Kabupaten Gorontalo)
 5. Pendamping Pokja :
 1. Nasruddin, SKM,.M.Si (Ketua)
 2. Muhammad Irwan, ST,.M.Si (Anggota)
 3. Awaludin Olli (Anggota)
- II Tim Ahli :
1. Dr. Ftiriane Lihawa, MSi (Ketua Tim/Ahli Lingkungan)
 2. Dr. eng. Siri Maryati (Anggota/Ahli GIS)
 3. Ahmad Djaenuri, S.Pd. MT (Anggota/Ahli Hidrologi)
 4. Yanti Saleh, SPi, MPd (Anggota/Ahli Sosial Ekonomi)

III. Moderator : Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo

IV. Kesekretariatan Tim KLHS :

1. Salma Monoarfa, SIP
2. Vickal Patute
3. Jefri Buckman

